



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan II

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Kata Pengantar



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 triwulan II tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Interim Triwulan II Tahun

2023 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Triwulan II Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas

efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada triwulan selanjutnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Surabaya,



Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis triwulan II pada tahun 2023 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi, hanya 6 sasaran strategis yang bisa dievaluasi karena realisasi indikator dari 5 sasaran strategis lainnya belum tersedia atau baru dapat diperoleh sesuai penilaian di akhir tahun. Dari 6 sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh bahwa semua sasaran strategis memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,65% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
2. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan II tahun 2023, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
3. Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan II tahun 2023, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 103,23% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
5. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 110,74% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
6. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 108,79% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam

meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;

7. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 120% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
8. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan II tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal;
9. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan II tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal;
10. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan II tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 110,41% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan II tahun 2023.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023 antara 96,49% sampai dengan 144,09%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" disebabkan karena Sistem ebpom untuk proses SKI bermasalah sehingga tidak dapat diakses pada waktu tertentu padahal sudah banyak pengajuan yang masuk. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator "Jumlah desa pangan aman", hal ini disebabkan karena intervensi terhadap desa tahun sebelumnya dilaksanakan lebih cepat dari jadwal sehingga capaian yang diperoleh sangat tinggi.

Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan 8 kegiatan tidak efisien dan 2 sasaran tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,063 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM) hingga 73,42 (Layanan Umum). Sedangkan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) 6 sasaran diperoleh bervariasi antara 0,20 hingga 1,15. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan

Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 61.048.715.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 adalah Rp 23.443.793.823,- atau 38,40%.

BBPOM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

Surabaya, 20 Juli 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Surabaya,



Dra. R. Koranti Mustikawati, Apt.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Latar Belakang</i>	1
1.2. <i>Gambaran Umum Organisasi</i>	2
1.3. <i>Struktur Organisasi</i>	3
1.4. <i>Aspek Strategis Organisasi</i>	4
1.5. <i>Analisis Lingkungan Strategis</i>	5
1.6. <i>Isu Strategis</i>	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. <i>Rencana Strategis</i>	13
2.2. <i>Rencana Kerja Tahun 2023</i>	15
2.3. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i>	16
2.4. <i>Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)</i>	18
2.5. <i>Metode Pengukuran</i>	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	23
3.2. <i>Realisasi Anggaran</i>	177
3.3. <i>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	177
BAB IV. PENUTUP	171
4.1 <i>Kesimpulan</i>	171
4.2 <i>Saran</i>	173
LAMPIRAN	175

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya	3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM	6
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur	7
Gambar 4. Visi dan Misi	13
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya	14
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator	21

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya	15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023	16
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023	19
Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023	23
Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan I tahun 2023	26
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	27
Tabel 9. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	28
Tabel 10. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	28
Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang memenuhi syarat sebelumnya	29
Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan I tahun 2023	30
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	31
Tabel 14. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	32
Tabel 15. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	33
Tabel 16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya	33
Tabel 17. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023	34
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	35
Tabel 19. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	36
Tabel 20. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	37
Tabel 21. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebelumnya	37
Tabel 22. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023	38
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	39
Tabel 24. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	40
Tabel 25. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	41
Tabel 26. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	41
Tabel 27. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan I tahun 2023	42
Tabel 28. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target tahun 2023	43
Tabel 29. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	44
Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	45
Tabel 31. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	45

Tabel 32. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan I tahun 2023	46
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	48
Tabel 34. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	52
Tabel 35. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	53
Tabel 36. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya	53
Tabel 37. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023	54
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	56
Tabel 39. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	56
Tabel 40. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	57
Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya	57
Tabel 42. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023	59
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	60
Tabel 44. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	63
Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	64
Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya	65
Tabel 47. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I tahun 2023	66
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	67
Tabel 49. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	69
Tabel 50. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	70
Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya	70
Tabel 52. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan I tahun 2023	71
Tabel 53. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	73
Tabel 54. Rencana Aksi pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	74
Tabel 55. Efisiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	75
Tabel 56. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sebelumnya	75
Tabel 57. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023	76
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	78

Tabel 59. Rencana Aksi pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	79
Tabel 60. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023	79
Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebelumnya	79
Tabel 62. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu triwulan I tahun 2023	81
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	82
Tabel 64. Rencana Aksi pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86
Tabel 65. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86
Tabel 66. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebelumnya	86
Tabel 67. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023	89
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	90
Tabel 69. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	92
Tabel 70. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	92
Tabel 71. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	93
Tabel 72. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	94
Tabel 73. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	96
Tabel 74. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	97
Tabel 75. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	98
Tabel 76. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	98
Tabel 77. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan I tahun 2023	100
Tabel 78. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	101
Tabel 79. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Pelayanan Publik	102
Tabel 80. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik	103
Tabel 81. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik	103
Tabel 82. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I tahun 2023	104
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	106
Tabel 84. Rencana Aksi pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	107
Tabel 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	108
Tabel 86. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sebelumnya	109
Tabel 87. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023	110

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	112
Tabel 89. Rencana Aksi pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	113
Tabel 90. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	114
Tabel 91. Tindak lanjut reokmendasi hasil evaluasi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebelumnya	114
Tabel 92. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I tahun 2023	115
Tabel 93. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I tahun 2023 Dengan Target tahun 2023	117
Tabel 94. Rencana Aksi Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119
Tabel 95. Efisiensi Anggaran Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	120
Tabel 96. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebelumnya	120
Tabel 97. Jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2023	121
Tabel 98. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	122
Tabel 99. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah desa pangan aman	124
Tabel 100. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman	125
Tabel 101. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya	126
Tabel 102. Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan I tahun 2023	127
Tabel 103. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan I tahun 2023 Dengan Target tahun 2023	128
Tabel 104. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	129
Tabel 105. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	129
Tabel 106. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebelumnya	130
Tabel 107. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023	131
Tabel 108. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	132
Tabel 109. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	134
Tabel 110. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	135
Tabel 111. Tindak lanjut rekoemndasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya	135
Tabel 112. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023	138
Tabel 113. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	139
Tabel 114. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	140
Tabel 115. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	141
Tabel 116. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya	142
Tabel 117. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2023	143
Tabel 118. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	144
Tabel 119. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	147
Tabel 120. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	148

Tabel 121. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya	149
Tabel 122. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023	151
Tabel 123. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	152
Tabel 124. Rencana Aksi pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya	153
Tabel 125. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya	154
Tabel 126. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya sebelumnya	154
Tabel 127. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023	155
Tabel 128. Kategori Penilaian SAKIP	155
Tabel 129. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya Triwulan I tahun 2023 dengan Target tahun 2023	156
Tabel 130. Rencana aksi pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	157
Tabel 131. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	157
Tabel 132. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya	158
Tabel 133. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023	159
Tabel 134. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	160
Tabel 135. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN	161
Tabel 136. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN	161
Tabel 137. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	162
Tabel 138. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan I tahun 2023	163
Tabel 139. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan target tahun 2023	163
Tabel 140. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	166
Tabel 141. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	166
Tabel 142. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebelumnya	167
Tabel 143. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2023	168
Tabel 144. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	170
Tabel 145. Rencana Aksi pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	171
Tabel 146. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	171
Tabel 147. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal sebelumnya	171
Tabel 148. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023	172
Tabel 149. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023	174
Tabel 150. Rencana Aksi pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran	175
Tabel 151. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran	176
Tabel 152. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya sebelumnya	176
Tabel 153. Tingkat Efisiensi Kegiatan	178
Tabel 154. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis	180



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial Masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BBPOM di Surabaya dengan kebijakan penguatan kapasitas BBPOM di Surabaya untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa

memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

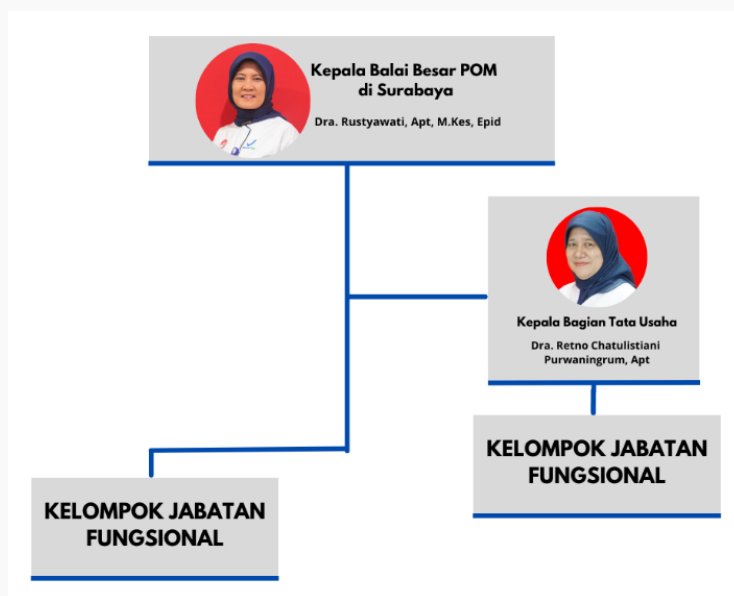
Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 23 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Surabaya yang mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 138 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA
Balai Besar POM di Surabaya	10	49	55	12	12

Sumber Daya Lainnya

- Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m² dan luas bangunan 4.496,09 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas

- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

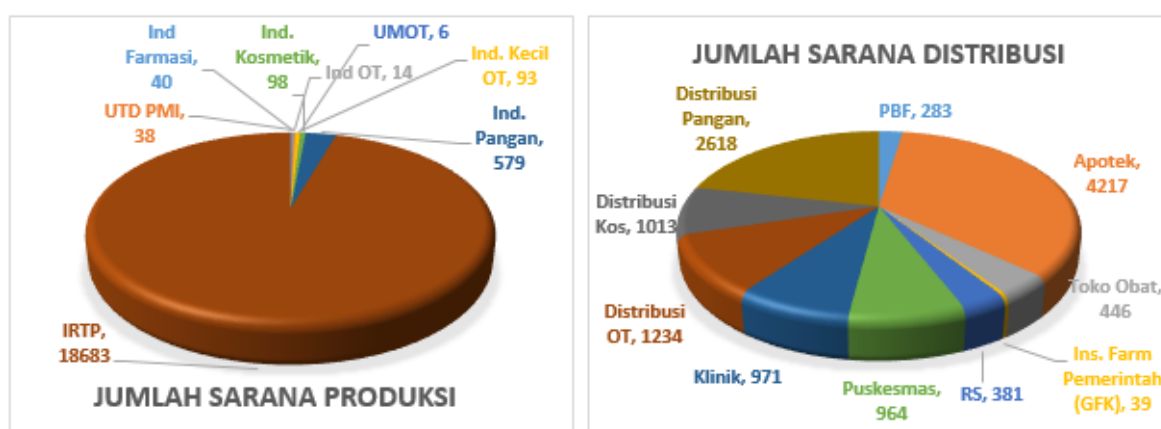
Provinsi Jawa Timur terletak pada 111⁰ hingga 1114⁰⁴' Bujur Timur dan 7⁰¹²' hingga 8⁰⁴⁸' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini.



Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain: :

1. Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization (WHO)* dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online***

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. **Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. **Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 572 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Triwulan I tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya berkomitmen untuk mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dengan upaya menambah inovasi dari 29 inovasi menjadi 31 inovasi, Inovasi baru pada triwulan I tahun 2023 diantaranya Gerakan komitmen menumbuhkan pangan aman berkualitas untuk PKL Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Kompetensi

Penanggung Jawab Obat dan Makanan Terstruktur (Kembang Aster). Inovasi GEMPUR Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jatim) yang merupakan inovasi unggulan Balai Besar POM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023 berhasil meraih penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, *monitoring* tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan *monitoring* pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. UMKM di Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman

adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program *One Pesantren One Product* (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantren preneur di bawah naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara signifikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Balai Besar POM di Surabaya turut berkontribusi dalam penanganan kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit

perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 30 indikator menjadi 29 indikator.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	24

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2023, terdapat perubahan target PK tahun 2023 pada indikator Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPOM per 2 Januari 2023. Perubahan target dari 4,51 menjadi 4,60 dikarenakan adanya perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		Indeks Pelayanan Publik	4,60
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2
	Kegiatan :		Anggaran :
	Pengawasan Obat dan Makanan di	Seluruh Indonesia	61.048.715.000

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu di-*monitoring* dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)	
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	595.329.600	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	289.803.360	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	148.832.400	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	149.292.640	
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63.394.000	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	280.539.000	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan													85,7	223.620.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan													78,55	209.320.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM													91	64.653.500
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	46.830.000	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	283.620.000	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	525.300.000	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	452.771.000	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	792.959.000	
		Indeks Pelayanan Publik							4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	64.653.500	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan	4,3	10,8	31,1	50,8	59,5	70,6	76,5	83,8	89,1	91,33	96	65	315.156.000	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	OT dan Kosmetik yang baik													
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	18.943.840.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0,8	2,1	17,1	32,1	39,6	47,1	57,1	62,1	72,1	82,2	95,5	112	811.162.000
		Jumlah desa pangan aman	5	10	20	31,7	35	42,8	54,4	67,8	77,8	80	90	37	1.154.484.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,8	1,7	13,3	41,1	52,9	59,5	72,9	72,9	85,4	97,9	100	24	575.545.000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	27	35	45	55	65	75	85	95	100	744.162.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	30	38	45	55	65	75	85	95	100	439.096.000
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2	6,8	12,1	14,3	18,5	26,5	33,4	37,7	50,7	59,1	66,8	72	1.312.841.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya												89,7	28.786.178.000
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya													85,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya												85,5	246.648.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												88	2.835.300.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal			2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	514.075.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya		46	56	61	63	66	67	69	71	72	74	95,2	88.500.000

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Triwulan I tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi *e-performance*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan triwulan I, membandingkan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2023, diperoleh nilai NPSS sementara sebesar 108,36% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 104,65%, NPS perspektif internal proses sebesar 110,69%, NPS perspektif learning & growth sebesar 109,75%. Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 6 sasaran strategis dari 11 sasaran strategis yang harus dievaluasi. 5 sasaran strategis lainnya belum bisa dievaluasi menunggu penilaian indikator di akhir tahun oleh pusat. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	104,65	Sesuai Ekspektasi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	103,23	Sesuai Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	110,74	Sesuai Ekspektasi
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	108,79	Sesuai Ekspektasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	120	Sesuai Ekspektasi
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	110,41	Sesuai Ekspektasi

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN II 2023	REALISASI TRIWULAN II 2023	CAPAIAN TRIWULAN II 2023	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	91,98	99,98
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	91,3	108,69
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	93,41	103,79
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	82,05	112,40
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	88,57	98,41
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	99,09	106,55
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	78,3	101,69
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	95,53	96,49

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN II 2023	REALISASI TRIWULAN II 2023	CAPAIAN TRIWULAN II 2023	
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	100,00
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	70,08	109,50
		15	Indeks Pelayanan Publik		-	-
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,6	74,25	105,17
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38	93,38	100,00
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	47,1	62,2	120,00
		19	Jumlah desa pangan aman	42,8	61,67	120,00
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	59,5	61,25	102,94
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	48,27	107,27
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	49,64	110,31
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	26,5	38,14	120,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Surabaya		-	-
		25	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya		-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya		-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	-
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75	3	109,09
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	66	72,87	110,41

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator, hanya 20 indikator yang dapat dievaluasi. **Dari 20 indikator tersebut** terdapat **17 indikator** yang sudah mencapai target dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**, dan **3 indikator** dengan kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**, Kriteria memenuhi ekspektasi menunjukkan bahwa target triwulan II tahun 2023 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI LINGKUP BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	92	94,69	102,92	Memenuhi ekspektasi
Mei	92	92,27	100,29	Memenuhi ekspektasi
Juni	92	91,98	99,97	Belum Memenuhi ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 adalah 91.98%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 711 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 654 sampel MS (memenuhi syarat), 57 sampel TMS (tidak memenuhi syarat hasil uji dan atau tidak memenuhi ketentuan penandaan). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 **tidak mencapai target** yaitu 99.97% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	92	94,69	102,92	Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	92	91,98	99,97	Belum Memenuhi ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan II mengalami penurunan dibandingkan triwulan I sehingga Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat belum memenuhi target tahun 2023 yaitu 92%. Perlu dilakukan intervensi pada para pelaku usaha agar produk Obat yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2023 dengan target 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	92	91,98	99,97	Belum Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **belum mencapai target** Tahun 2023 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. sehingga perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hingga triwulan II tahun 2023, diperoleh sampel obat yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 57 sampel. Sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan atau hasil uji terdiri dari komoditi Obat Tradisional 45 sampel, 10 sampel Kosmetik dan 2 sampel obat. Sampel Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian adalah terkait pengujian mikrobiologi yang melebihi batas persyaratan yaitu Enterobacteriaceae dan Angka Lempeng Total (ALT) sedangkan Sampel Kosmetik yang tidak memenuhi syarat pengujian adalah Kadar Metanol yang melebihi batas persyaratan pada sediaan wangi-wangian.

Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan yaitu produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak mencantumkan nomor batch/kode produksi pada kemasan primer, alamat produsen dan klaim yang berlebihan. Sampel

obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan terkait dengan desain kemasan di produk obat tidak sesuai dengan desain persetujuan kemasan yang dikeluarkan oleh Badan POM.

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 10. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		APRIL		MEI		JUNI	
				T	R	T	R	T	R		
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A Pengadaan Sampel (acak)	24	kali/trip	2	2	2	1	2	2
	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	1	pkt lelang	0	0	1	0	0	0

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang memenuhi syarat antara lain : melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Dari 988 sampel Obat yang disampling BBPOM di Surabaya, baru 711 sampel yang selesai diuji.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 11. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase obat yang memenuhi syarat	490.001.281	352.396.934	71,92	99.97	95% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran. Beberapa

reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. Selain itu juga dilakukan revisi pengurangan anggaran reagen untuk dialihkan ke anggaran media mikro. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 12. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang memenuhi syarat sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Belum dilakukan sampling untuk komoditi obat kuasi	Telah dilakukan sampling obat kuasi tetapi realisasi belum sesuai dgn jumlah total target sd bulan Mei dan untuk obat kuasi yang masuk ke laboratorium belum dilakukan pengujian	Telah dilakukan sampling obat kuasi dengan realisasi sampai dengan Juni adalah 12 sampel. Belum semua sampel acak yang disampling telah dilakukan pengujian (dari 988 sampel obat yang masuk ke laboratorium, yang telah diuji adalah 711 sampel dan yang belum diuji 277 sampel). Realisasi Indikator persentase obat yang memenuhi syarat adalah 91.98% dari target 92% sehingga capaiannya adalah 99.97%. Hal ini disebabkan banyaknya sampel yang TMK Penandaan dan TMS Uji ,(57 sampel) dimana penyumbang jumlah terbanyak adalah dari sampel kosmetik sebanyak 10 sampel (TMS Uji= 1 sampel; TMK Penandaan =9 sampel) dan obat tradisional sebanyak 45 sampel (TMS Uji= 37 sampel ;TMK penandaan = 6 sampel dan TMK Penandaan dan TMS Uji= 2 sampel
Rekomendasi Perbaikan	-melakukan penjadwalan kembali sampling obat kuasi	Percepatan pengujian sampel dan penjadwalan sampling di bulan Juni sehingga target jumlah sampling sampai dengan bulan Juni dapat tercapai	Percepatan pengujian sampel dan identifikasi sampel dengan produk Jawa Timur sehingga dapat dilakukan intervensi ke pelaku usaha pemilik sarana dengan produk TMS Uji maupun TMK Penandaan.
Rencana Aksi	-merencanakan sampling obat kuasi pada bulan Mei dan Juni untuk memenuhi target sampling bulan Jan sampai dengan April	Percepatan pengujian obat kuasi acak di bulan berikutnya dan penjadwalan sampling di bulan Juni sehingga target total obat kuasi sampai dengan bulan Juni dapat tercapai	Percepatan pengujian obat sampel acak di bulan berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi April: - Sampling obat kuasi	Kondisi Mei: - Kekurangan jumlah sampling obat kuasi	Kondisi Juni: - Telah dilakukan sampling

Keterangan	April	Mei	Juni
	direncanakan pada bulan Mei dan Juni	direncanakan sampling di bulan Juni	obat kuasi sesuai target yang diberikan (12 sampel)
Status	open	Open	open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target triwulan I sudah tercapai dan berdasarkan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 tidak tercapai karena terdapat peningkatan sampel yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Uji, dimana TMK Penandaan dan TMS Uji untuk sampel acak mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Memenuhi syarat. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 juga diperoleh informasi bahwa target tidak tercapai, sehingga akan diusulkan penurunan target pada tahun 2024.

Akan tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB dan pelaksanaan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA di tahun 2023 dengan mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 13. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	84	88,75	105,65	Memenuhi Ekspektasi
Mei	84	90,40	107,62	Memenuhi Ekspektasi
Juni	84	91,30	108,70	Memenuhi Ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat BPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2023 adalah 91,30%. Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat di triwulan II sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 108,70% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	84	93,62	111,45	Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	84	91,30	108,70	Memenuhi Ekspektasi

Terjadi penurunan realisasi dan capaian di triwulan II dibandingkan dengan realisasi triwulan I dikarenakan adanya peningkatan jumlah sampel yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Meskipun target sudah tercapai dengan kriteria memenuhi ekspektasi, hal ini menjadi perhatian supaya realisasi dan capaian tidak terus menurun di triwulan selanjutnya.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00	91,30	108,70	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2023 **sudah mencapai target** tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Tetap dilakukan monitoring agar target di tahun 2023 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sampai triwulan II sampel acak yang masuk pengujian sebanyak 428 sampel, 299 sampel sudah dilakukan pengujian dan sebanyak 129 sampel belum selesai dilakukan pengujian. Dari 299 sampel yang selesai diuji terdapat 273 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 26 sampel TMS. Sesuai Pedoman Sampling, bahwa pada sampel acak dilakukan evaluasi penandaan sehingga hasil penandaan mempengaruhi kesimpulan hasil uji akhir. Sampai triwulan II terdapat 1 sampel rusak dan 30 sampel TMK Penandaan (10 TMK Mayor dan 20 TMK Minor). Hasil Uji yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kimia antara lain pengawet pada minuman kopi dan toping/selai dan manisan, pemanis sakarin/siklamat pada kecap, manisan, kacang atom, sulfit pada gula dan BHA pada minyak wijen. TMS Mikrobiologi Angka Kapang Khamir pada kopi bubuk dan Enterobacteriaceae pada wafer.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk pencapaian target adalah melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pengawasan rutin agar sarana produksi tetap konsisten untuk menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan sesuai standar keamanan dan mutu serta aspek penandaannya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 16. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI		
					T	R	T	R	T	R	
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1	pkt lelang	0	0	1	0	0	0
	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A Pengadaan Sampel (acak)	8	kali/trip	1	1	0	0	1	1

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan Pengadaan sampel makanan acak. Selama triwulan II tahun 2023 telah dilakukan sampling terhadap 428 sampel makanan, dengan realisasi sampel yang sudah diperiksa dan diuji 299 sampel saja. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai

Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 17. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase makanan yang memenuhi syarat	256.196.848.2	44.762.145,792	17,47	108,70	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat **tidak efisien** karena % realisasi anggaran terlalu rendah daripada % capaian indikator. Hal ini disebabkan karena pembayaran pengadaan reagen dan media mikrobiologi belum dilakukan, sehingga realisasi anggaran kecil. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. selain itu juga dilakukan revisi pengurangan anggaran media mikro untuk ditambahkan ke anggaran reagen kegiatan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 18. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel.	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 254 sampel acak yang disampling sd bulan April (1 sampel rusak, sehingga masuk lab adalah 253 sampel), baru dilakukan pengujian 159 sampel	Dari 350 sampel acak yang disampling sd bulan Mei(1 sampel rusak, sehingga masuk lab adalah 349 sampel), baru dilakukan pengujian 235 sampel (67% selesai uji)	Dari 428 sampel acak yang disampling sd bulan Juni (1 sampel rusak tidak masuk lab), terdapat 129 yang belum dilakukan pengujian
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 88,75%dari target 84 %	Kondisi Juni : Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 90.40%dari target 84 %	Kondisi Juli : -

Keterangan	April	Mei	Juni
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target triwulan I sudah tercapai meskipun terdapat 85 yang belum selesai diuji dimana sampel dengan kesimpulan TMS tidak hanya dari hasil uji kimia maupun mikrobiologi namun juga dari TMK Penandaan. Berdasarkan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 sudah tercapai namun masih terdapat sampel yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) pada evaluasi penandaan, dimana TMK penandaan untuk sampel acak mempengaruhi hasil akhir pengujian sehingga bisa meningkatkan hasil uji sampel tidak memenuhi syarat. Meskipun target triwulan II sudah tercapai, namun kegiatan sampling dan pengujian masih sekitar 50% yang belum selesai dilakukan. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tidak tercapai, sehingga akan diusulkan penurunan target tahun 2024.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 19. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	90	95.98	106.64	memenuhi ekspektasi
Mei	90	95,43	106.04	memenuhi ekspektasi
Juni	90	93.41	103.79	memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}}{\text{Total Sampel Targeted Obat MS}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak

memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu triwulan II, dari 359 sampel yang masuk laboratorium dan telah dilakukan pengujian sebanyak 273 sampel yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 255 sampel MS (memenuhi syarat) dan 18 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang aman dan bermutu pada triwulan II tahun 2023 **mencapai target** yaitu 103.79 % dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	90	96,61	107,34	memenuhi ekspektasi
Triwulan II	90	93.41	103.79	memenuhi ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu pada triwulan II mengalami penurunan namun masih mencapai target dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Hal ini menjadi perhatian agar target tetap dapat tercapai di akhir tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	93.41	103.79	memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 **mencapai target** Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Tetap dilakukan monitoring agar target di tahun 2023 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu hingga triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi . Sampai triwulan II sampel targeted yang masuk pengujian sebanyak 359 sampel, 273 sampel sudah dilakukan

pengujian dan sebanyak 86 sampel belum selesai dilakukan pengujian. Dari 273 sampel yang selesai diuji terdapat 255 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 18 sampel TMS (11 sampel TMS uji; 6 sampel TMK Penandaan, 1 sampel TMK Penandaan dan TMS Uji). Sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan atau hasil uji terdiri dari komoditi Obat Tradisional 13 sampel (11 sampel TMS Uji 2 sampel TMK Penandaan) dan 5 sampel Kosmetik (4 sampel TMK Penandaan dan 1 sampel TMK Penandaan dan TMS Uji).

Sampel Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian adalah terkait pengujian mikrobiologi yang melebihi batas persyaratan yaitu Enterobacteriaceae dan Angka Lempeng Total (ALT) sedangkan Sampel Kosmetik yang tidak memenuhi syarat pengujian adalah Kadar Angka Lempeng Total (ALT) yang melebihi batas persyaratan pada sediaan bedak wajah.

Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan yaitu produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak mencantumkan nomor batch/kode produksi pada kemasan primer, alamat produsen dan klaim yang berlebihan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk pencapaian target adalah melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 22. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A Pengadaan Sampel (targeted)	6 kali/trip	0	0	1	1	0	1
	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (targeted)	1 pkt lelang	0	0	1	0	0	0

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang aman dan bermutu antara lain kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Selama triwulan II telah dilakukan sampling Obat targeted sebanyak 359 sampel, namun sampel yang selesai diperiksa dan diuji hanya 273 sampel. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka

POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 23. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	117.187.419	84.278.325	71,92	103,79	92% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. Selain itu juga dilakukan revisi pengurangan anggaran reagen untuk dialihkan ke anggaran media mikro. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 24. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Belum dilakukan sampling untuk komoditi obat kuasi	Telah dilakukan sampling obat kuasi tetapi realisasi belum sesuai dgn jumlah total target sd bulan Mei dan untuk obat kuasi yang masuk ke laboratorium belum dilakukan pengujian	Telah dilakukan sampling obat kuasi dengan realisasi sampai dengan Juni adalah 6 sampel. Belum semua sampel targeted yang disampling telah dilakukan pengujian (dari 359 sampel obat yang masuk ke laboratorium, yang telah diuji adalah 273 sampel dan yang belum diuji 86 sampel).
Rekomendasi Perbaikan	-melakukan penjadwalan kembali sampling obat kuasi	Percepatan pengujian sampel dan penjadwalan sampling di bulan Juni sehingga target jumlah sampling sampai dengan bulan Juni dapat tercapai	Percepatan pengujian sampel
Rencana Aksi	-merencanakan sampling obat kuasi pada bulan Mei dan Juni untuk memenuhi target sampling bulan Jan sampai dengan April	Percepatan pengujian obat kuasi acak dan target di bulan berikutnya dan penjadwalan sampling di bulan Juni sehingga target total obat kuasi sampai dengan bulan Juni dapat tercapai	Percepatan pengujian sampel makanan targeted di bulan berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi April: - Sampling obat kuasi direncanakan pada bulan Mei dan Juni	Kondisi Mei: - Kekurangan jumlah sampling obat kuasi direncanakan sampling di bulan Juni	Kondisi Juni: - Telah dilakukan sampling obat kuasi sesuai target yang diberikan (6 sampel)

Keterangan	April	Mei	Juni
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	Open	closed	Closed

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan Laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target triwulan I sudah tercapai dan berdasarkan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 sudah tercapai namun masih terdapat sampel yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) pada evaluasi penandaan, dimana TMK Penandaan untuk sampel obat targeted mempengaruhi hasil akhir pengujian sehingga bisa meningkatkan hasil uji sampel tidak memenuhi syarat. namun demikian, masih ada sekitar 50% sampel yang belum disampling dan diuji, sehingga hasil masih bisa berubah. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target tidak tercapai, sehingga akan diusulkan penurunan target pada tahun 2024.

Akan tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB dan pelaksanaan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA di tahun 2023 dengan mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 25. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	73	82,09	112,45	Memenuhi Ekspektasi
Mei	73	80,00	109,59	Memenuhi Ekspektasi
Juni	73	82,05	112,40	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 78 sampel *targeted* pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 64 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 14 TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di TW II tahun 2023 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 112,40 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	73	80,77	110,64	memenuhi ekspektasi
Triwulan II	73	82,05	112,40	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 meningkat dibandingkan triwulan I dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Diperlukan upaya untuk dapat mempertahankan capaian agar target triwulan berikutnya tetap tercapai.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	80,77	110,64	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 **mencapai** target Tahun 2023 dengan kategori memenuhi ekspektasi. Tetap dilakukan monitoring disetiap triwulan agar target tahun 2023 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sampai triwulan II sampel targeted yang masuk pengujian sebanyak 91 sampel, 78 sampel sudah dilakukan pengujian dan sebanyak 13 sampel belum selesai dilakukan pengujian. Dari 78 sampel yang selesai diuji terdapat 64 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 14 sampel TMS. Sesuai Pedoman Sampling, bahwa sampel targeted tidak dilakukan evaluasi penandaan sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium. Hasil TMS tersebut terdapat pada 4 sampel kasus kerupuk mentah yang mengandung pemanis yang dilarang dan 5 sampel PJAS (dari 36 sampel PJAS) karena TMS Mikrobiologi MPN E Coli dan 2 sampel lokal spesifik TMS Mikrobiologi ALT (Angka Lempeng Total) dan 2 sampel kasus minyak goreng rekomendasi dari Wasprod Pangan Olahan Badan POM TMS Vitamin A. Sampel PJAS merupakan sampel yang disampling di sekolah yang sudah diintervensi oleh BBPOM di Surabaya di Kota Mojokerto dan Kota Batu, sehingga masih perlu dilakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut agar PJAS yang dikonsumsi anak sekolah seluruhnya aman.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah bahwa BBPOM di Surabaya tetap konsisten untuk melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pengawasan rutin sehingga sarana produksi tetap konsisten untuk menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan sesuai standar keamanan dan mutu serta aspek penandaannya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 28. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI		
					T	R	T	R	T	R	
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1	pkt lelang	0	0	1	0	0	0
	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A Pengadaan Sampel (Targeted)	4	kalitrip	1	1	0	0	0	0

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Pengujian laboratorium sampel makanan targeted dan Pengadaan sampel makanan targeted. Selama triwulan II telah dilakukan sampling makanan targeted sebanyak 91 sampel namun hanya 78 sampel yang selesai diperiksa dan diuji. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 29. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	135.541.451	23.681.502	17,40	112,40	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **tidak efisien** karena % realisasi anggaran terlalu rendah daripada % capaian indikator. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. selain itu juga dilakukan revisi pengurangan anggaran media mikro untuk dialihkan ke anggaran reagen. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 30. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Aman dan bermutu sudah tercapai	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Aman dan bermutu sudah tercapai	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang aman dan bermutu sudah tercapai
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel

Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel makanan targeted di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel makanan targeted di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel makanan targeted di bulan berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 72 sampel targeted yang disampling sd bulan April , baru dilakukan pengujian 67 sampel	Dari 81 sampel targeted yang disampling sd bulan Mei (1 sampel TIE sehingga masuk lab 80 sampel) , baru dilakukan pengujian 70 sampel	Dari 91 sampel targeted yang disampling sd bulan Juni, terdapat 13 sampel yang belum dilakukan pengujian
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi April: - Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 82.09% dari target 73 %, dengan capaian 112.45%	Kondisi Mei: - Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 80,00 % dari target 73 %, dengan capaian 109,59%	Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 82.05 % dari target 73 % dengan capaian 112.40%
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja Lapkin interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target triwulan I sudah tercapai dengan masih ditemukan 5 sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat meskipun lokasi sampling merupakan sekolah yang dilakukan intervensi oleh BBPOM di Surabaya. Terhadap hasil uji yang TMS telah dilakukan koordinasi dengan bersurat ke Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan kembali kepada pihak sekolah. Sedangkan untuk sampel yang TMS lainnya dikarenakan mempunyai Nomor Izin Edar MD maka ditindaklanjuti dengan bersurat ke Badan POM dengan tembusan P3OMN. Pada triwulan II tidak dilakukan sampling PJAS karena direncanakan di bulan Juli (triwulan III). Diharapkan dengan adanya intervensi dari BBPOM di Surabaya di sekolah-sekolah, dapat menurunkan sampel pangan yang tidak memenuhi syarat. Tetap diupayakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar IKU Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu tetap tercapai sampai akhir tahun. Selain itu, pada tahun 2023 akan direncanakan kembali pelaksanaan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA, mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana produksi tidak memenuhi ketentuan sebagai upaya meminimalisir produk yang TMS.

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 31. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	90	90,91	101,01	Memenuhi Ekspektasi

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Mei	90	88,57	94,41	Belum Memenuhi Ekspektasi
Juni	90	88,57	94,41	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Pangan fortifikasi MS} = (\text{Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS dibagi Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Hasil pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Realisasi persentase makanan fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan II tahun 2023 adalah 88,57%. Capaian persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 **Tidak Mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99,41% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	90	90,91	101,01	memenuhi ekspektasi
Triwulan II	90	88,57	94,41	belum memenuhi ekspektasi

Terjadi penurunan realisasi dan capaian di triwulan II dibandingkan dengan realisasi triwulan I dikarenakan adanya peningkatan sampel yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

- c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 33. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	88,57	94,41	belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2023 **tidak mencapai target** tahun 2023 dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkesinambungan agar dapat mencapai target tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2023 tidak mencapai target dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Sampai triwulan II sampel pangan fortifikasi yang masuk pengujian sebanyak 70 dan sudah dilakukan pengujian. Dari 70 sampel yang selesai diuji terdapat 62 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 8 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah garam beryodium dengan tidak memenuhi standar kadar KIO₃ dan 3 tepung terigu dengan tidak memenuhi syarat Penetapan Kadar Asam Folat dan 2 sampel TMS Identifikasi Fe. Untuk sampel fortifikasi dengan TMS Kadar Asam Folat dan Identifikasi Fe merupakan sampel dengan hasil uji yang TMS berulang seperti tahun 2022. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya sudah berkirim surat ke Badan POM dengan tembusan P3OMN dan melakukan intervensi dengan pemeriksaan sarana terhadap produsen tepung terigu tersebut serta melakukan pembinaan kepada sarana agar menggunakan fortifikan sesuai yang dipersyaratkan SNI.

Kegiatan sampling pangan fortifikasi sesuai Pedoman sampling di tahun 2023 dilakukan di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya. Kabupaten Bangkalan yang merupakan wilayah stunting tertinggi kedua di Jawa Timur dan Kota Surabaya yang merupakan wilayah stunting terendah di Jawa Timur.

Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3751-2018.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 34. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	QIA.008.051	Pengadaan sampel makanan	A Pengadaan Sampel Pangan Fortifikasi	20 kali/trip	2	0	2	0	2	0

Kegiatan yang menunjang IKU persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi dan Pengadaan sampel pangan fortifikasi. Selama triwulan II telah dilakukan sampling makanan targeted sebanyak 70 sampel dan seluruhnya telah selesai diperiksa dan diuji.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 35. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	30.740.000	16.753.150	54.50	98.41	88% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran. Beberapa reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia dan terlalu lama bila menunggu proses lelang, sehingga sudah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Tindak lanjut hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 36. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Terdapat hasil uji tidak memenuhi syarat sebanyak 5 sampel dari 70 sampel jenis fortifikasi yang disampling namun Target Persentase fortifikasi yang Memenuhi Syarat masih tercapai	Terdapat hasil uji tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel di bulan Mei sehingga total TMS uji sd bulan Mei adalah 8 sampel dari 70 sampel jenis fortifikasi yang disampling dan mengakibatkan Persentase fortifikasi yang Memenuhi Syarat tidak tercapai	Terdapat hasil uji tidak memenuhi syarat sd bulan Juni adalah 8 sampel (garam= 5 sampel ; tepung terigu= 3 sampel) dari 70 sampel jenis fortifikasi yang disampling dan mengakibatkan Persentase fortifikasi yang Memenuhi Syarat tidak tercapai (realisasi 88.57 dari target 90 sehingga capaian 98.41 %). Belum semua sampel pangan fortifikasi dilakukan sampling (MGS)
Rekomendasi Perbaikan	Monitoring jenis sampling fortifikasi	Monitoring jenis sampling fortifikasi	Monitoring jenis sampling fortifikasi dan percepatan sampling pangan fortifikasi
Rencana Aksi	Monitoring jenis sampling fortifikasi setiap bulan	Monitoring jenis sampling fortifikasi setiap bulan	Monitoring jenis sampling fortifikasi dan percepatan sampling pangan fortifikasi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Sampel fortifikasi hingga bulan April adalah garam konsumsi Beryodium dan tepung terigu - Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 101.01%	- Sampel fortifikasi hingga bulan Mei adalah garam konsumsi Beryodium dan tepung terigu - Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 98.41%	- Sampel fortifikasi hingga bulan Juni adalah garam konsumsi Beryodium dan tepung terigu - Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 98.41%

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : Realisasi fortifikasi yang MS 88,57% dari target 90 % dengan capaian 98,41 %	Kondisi Juni : - Realisasi fortifikasi yang MS 88.57% dari target 90 % dengan capaian 98.41 %	Kondisi Juli :
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diketahui bahwa target tahun 2022 tidak tercapai. Pada triwulan II tahun 2023, target juga tidak tercapai sehingga akan diusulkan penurunan target di tahun 2024. Lokasi sampling adalah wilayah tinggi stunting dan rendah stunting sehingga sangat mempengaruhi capaian IKU, maka upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya adalah tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB termasuk dalam penggunaan fortifikan yang dipersyaratkan oleh SNI 3556-2016 untuk garam dan SNI 3751-2018 untuk tepung terigu.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu obat dan makanan di Lingkup BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 37. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean*)

score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pada triwulan II tahun 2023 **belum diperoleh hasil** pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Survey pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat akan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Pada triwulan II tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Survey Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat baru diperoleh pada bulan November 2023. Pengambilan data baru akan dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2023.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2023 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Hasil Survey Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat baru diperoleh pada bulan November 2023.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2022 didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat adalah 83,47; nilai sikap masyarakat adalah 84,59 dan nilai perilaku masyarakat adalah 76,63.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label.

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut: obat 84,20 (Baik); Obat Tradisional 79,47 (Baik); Suplemen Kesehatan 79,95 (Baik); Kosmetik 79,82 (Baik); Pangan Olahan 82,80 (Baik).

Dari survey diketahui bahwa pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variable kadaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk. Perilaku masyarakat

cenderung meningkat pada semua variable, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk.

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat, terutama setelah terjadi pandemi Covid 19 maupun kejadian kejadian lain yang terjadi di masyarakat misalnya kasus Sirup yang tercemar EG DEG, kosmetik illegal dan mengandung bahan berbahaya, obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat, dll.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah: pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang : petunjuk penyimpanan, produk yang tidak terdaftar di BPOM, dan tanggal kedaluwarsa produk. Hal lain ditanyakan antara lain adalah: pengetahuan masyarakat terkait logo obat, pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO, pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri, pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Dari hasil survey juga diketahui bahwa sikap masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 84,59 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 76,63. Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling

efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu serta mendukung berbagai program pemerintah terkait pengawasan obat dan makanan.

Pada masa peralihan dari pandemi covid 19 menjadi endemi, BBPOM di Surabaya harus menyesuaikan strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Masa pandemi covid 19 telah menyebabkan terjadinya transformasi digital yang sangat drastis. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang harus disertai dengan layanan melalui telpon dan media sosial antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Masyarakat selalu mencari media sosial jika ingin mengetahui seluk beluk suatu organisasi.

Selama triwulan II tahun 2023 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 802 layanan tatap muka langsung, melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Selain itu BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan namun dengan tagline “Anda Menanyakan Kami Menjawab”. Selama triwulan II tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 5 kali yang diikuti oleh 64 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, kelompok usaha pangan, lintas sektor, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain : Konsultasi langsung Anda Menanyakan Kami Menjawab, Sosialisasi Standar Pelayanan Publik BBPOM Surabaya tahun 2023, Jenis Layanan Publik BBPOM Surabaya, Persyaratan IP CPPOB melalui e sertifikasi. Selain itu, pada bulan April, BBPOM Surabaya melaksanakan operasionalisasi Laboratorium Keliling di wilayah pasar Kepanjen Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang kreatif lapangan yang berjualan di sekitar wilayah pasar Kepanjen tentang prinsip prinsip keamanan pangan, bagaimana menerapkan hygiene dan sanitasi, bagaimana mengenali tanda tanda pangan yang

mengandung bahan berbahaya yang sering disalagunakan pada pangan, dll. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 12 orang pedagang kreatif lapangan bersama lintas sektor terkait. Pada bulan Mei BBPOM Surabaya menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik yang dihadiri oleh 55 orang peserta yang terdiri dari unsur akademisi, lintas sektor, media, LSM, wakil kelompok rentan, asosiasi pelaku usaha, dll.

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial secara maksimal karena telah terbiasa menggunakan layanan melalui media sosial selama masa pandemi covid 19 dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat meskipun masa pandemi sudah semakin mereda dan berubah menjadi endemi. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama Triwulan II tahun 2023, BBPOM Surabaya telah menayangkan 236 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut dengan topik antara lain Update Daftar Sirop Obat, OT dan SK yang aman; Tips Sehat Berbuka Puasa; Terapkan 5 Kunci Keamanan Pangan saat sahur dan berbuka puasa; Minum 8 Gelas air sehari saat ramadan; Makan Gorengan Aman; Mengapa harus menjaga pangan pada suhu aman; Jangan Lupa Cek Klik sebelum membeli parcel; Reels Tips membeli takjil aman; Cermati Informasi Nilai Gizi; Hindari Penggunaan koran untuk bungkus makanan; Bahaya menggunakan minyak goreng berulang; Rekomendasi urutan membeli pangan; Tips Mudik agar tetap fit; Yuk Batasi dan Bijak konsumsi gula; Cek Izin Edar semakin mudah dengan BPOM Mobile; Repost Pemberitaan Hasil Pengawasan Produk mi instan asal Indonesia di Taiwan; Bagaimana Mencegah PTM, dll. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor, hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya, dll. Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, selama triwulan II tahun 2023, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik melalui Radio Karimata (Pamekasan), Radio Songgolangit (Ponorogo), Koran Radar Surabaya, Koran Online, Bioskop CGV (Malang), Bioskop CGV (Malang), Bioskop CGV (Malang).

Koran Radar Surabaya (Gerbangkertasusila), dengan berbagai topik tentang Obat dan Makanan yang sangat penting untuk diketahui masyarakat antara lain: Waspada obat tradisional mengandung BKO, CEK KLIK, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Konsultasi rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama pada saat menjadi

narasumber berdasarkan undangan dari lintas sektor, perguruan tinggi, asosiasi, maupun berbagai komunitas lainnya.

Pada Triwulan II tahun 2023, BBPOM Surabaya telah memberikan informasi secara langsung melalui berbagai kegiatan misalnya pada Unjuk Kerja dan Karya Ilmiah Higiene dan Sanitasi dalam Pembuatan Produk Makanan dan Minuman, Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan Angkatan IV Tahun 2023, Sosialisasi Keamanan Pangan Olahan bagi Keluarga Resiko Stunting (KRS), Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Keamanan Pangan Angkatan III Tahun 2023, Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN- 2 - Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Peningkatan Kompetensi Penjamah Pangan, Bimbingan Teknis Penjamah dan Pengelola Makanan Tahun 2023, Bimbingan Teknis Wirausaha Baru (WUB) Produksi Minuman Herbal bagi Masyarakat Ds. Gedongombo, Kecamatan Semanding, di Kabupaten Tuban yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jawa Timur, Pemberdayaan pelaku usaha IRTP, Dampak Konsumsi Makanan Mengandung Bahan Kimia, Bimtek Ijin Edar dan masa kadaluarsa produk, Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Tahun 2023, Sosialisasi Penerapan Mutu dan Sertifikasi SNI Produk Perikanan, Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Produk Olahan Makanan Minuman, yang diselenggarakan lintas sektor dan pemerintah daerah se Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BBPOM Surabaya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 39. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	BMB.001.051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A Penyebaran Informasi Melalui Media	80 pkt lelang	7	10	6	6	6	6

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator selama Triwulan II tahun 2023 BBPOM Surabaya antara lain pembuatan video; iklan layanan masyarakat di Radio Karimata (Pamekasan), Radio Songgolangit (Ponorogo), Koran Radar Surabaya, Koran Online, Bioskop CGV (Malang), Bioskop CGV (Malang), Bioskop CGV (Malang), Koran Radar Surabaya (Gerbangkertasusila), dengan berbagai topik tentang Obat dan Makanan yang sangat penting untuk diketahui masyarakat antara lain: Waspada obat tradisional

mengandung BKO, CEK KLIK, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Konsultasi rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika. Dengan aktifnya penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 40. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	144.576.150	144.576.150	100	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan II tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Tidak ada revisi anggaran pada RO yang ditagging untuk pencapaian indikator indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan makanan aman dan bermutu.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 41. Tindak lanjut rekomenasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	masyarakat semakin aware untuk melakukan pendaftaran produk pangan, di satu sisi masih ada kendala di sistem registrasi	Belum adanya data kepuasan masyarakat yang khusus mewakili kelompok rentan. Perlunya menyusun kuesioner untuk pelanggan difabel	Kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan pada Semester I
Rekomendasi Perbaikan	memberikan pengertian kepada pelanggan tentang kendala sistem yang terjadi	Melakukan pemilahan data kuesioner kelompok rentan dan membuat kuesioner dengan huruf braile	Menjadwalkan KIE yang belum terlaksana agar tidak menumpuk di akhir tahun
Rencana Aksi	pengumuman yang komunikatif apabila ada kendala sistem, dan meningkatkan responsifitas petugas dalam memberikan penjelasan kepada pelanggan	membuat tools kuesioner dan pengambilan data	Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Tomas untuk menjadwalkan pelaksanaan KIE pada Semester II
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	masih ada kendala di sistem registrasi	belum adanya evaluasi kepuasan masyarakat yang khusus mewakili kelompok rentan	KIE tidak dapat dilaksanakan sesuai target Semester I
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : kendala aplikasi dapat teratasi	Kondisi Juni : adanya kuesioner dan evaluasi yang mewakili kelompok rentan	Tokoh Masyarakat Anggota DPR Komisi IX memiliki kesibukan yang sangat padat sehingga belum dapat melaksanakan KIE

Keterangan	April	Mei	Juni
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2022 telah tercapai dengan capaian 102,86%. Namun demikian, sejak akhir tahun 2022 hingga triwulan II tahun 2023 Badan POM diterpa isu sirup obat yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sehingga dikhawatirkan nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu akan menurun di tahun 2023 seiring dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Badan POM. Oleh karena itu dilakukan peningkatan upaya sosialisasi Obat dan Makanan melalui media cetak dan elektronik, terlihat dari peningkatan target dari 50 layanan di tahun 2022 menjadi 80 layanan di tahun 2023. Diharapkan upaya ini dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada Badan POM khususnya Balai Besar POM di Surabaya dapat kembali meningkat dan target IKU tahun 2023 dapat tercapai. Selain itu jumlah KIE bersama Tokoh Masyarakat yang meningkat di tahun 2023 ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat kepada BBPOM Surabaya dan Badan POM.

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**
 - a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023**

Tabel 42. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Hingga triwulan II tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Hasil sepenuhnya akan diperoleh di triwulan IV. Sedangkan hasil sementara yang diperoleh di bulan Juni 2023 adalah 95,63.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 belum tersedia, menunggu hasil akhir di Bulan Desember 2023. Namun, administrator Balai dapat menarik data kepuasan

pelaku usaha secara mandiri melalui link survei yang diberikan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Dibandingkan indeks kepuasan pelaku usaha di triwulan I, yaitu 94,38, terdapat kenaikan menjadi 95,63 pada triwulan II.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7	-	-	-

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2023, karena nilai indeks baru diperoleh di akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan II dilakukan Desk Konsultasi dalam rangka penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik maupun terkait pemenuhan SPA CPKB dan SPA CPOTB Bertahap di Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Dari seluruh kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya. Kegiatan berlangsung pada bulan Mei dan Juni 2023. Indeks kepuasan pelaku usaha yang diperoleh sementara adalah 95,63. Hasil tersebut melebihi target tahun 2023, yaitu 85,7. Namun nilai ini masih akan berubah hingga diperoleh nilai akhir di akhir tahun 2023.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 44. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan	2 kegiatan	0	0	1	1	0	0
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	C Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Tradisional	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			D Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong Melalui Fasilitator UMKM OT	1 kali/trip	1	0	0	0	0	0
			E PELATIHAN FASILITATOR UPT B POM PENYULUH KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PENERAPAN CPPOB/HACCP di UMKM	1 kali/trip	0	0	0	0	1	0
			G Klinik POM	2 kegiatan	0	0	1	0	0	1
			H Peningkatan Kapasitas UPT dalam rangka percepatan/kemudahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan mapping untuk UMKM naik tahapan CPOTB	1 kali/trip	1	0	0	0	0	0

Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BBPOM di Surabaya pada triwulan II meliputi *Desk Consultation* melalui kegiatan Klinik POM terkait Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dalam rangka Gempur Jatim, pendampingan UMKM obat tradisional melalui inovasi Sippotra, dan pendampingan bagi UMKM kosmetik melalui inovasi Jatim Glowing. Kegiatan Desk Konsultasi dilakukan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota untuk mempermudah proses perbaikan terkait sistem OSS.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 20212	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase obat yang memenuhi syarat	122.290.000	99.936.220	181,72	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan II tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Telah dilakukan revisi anggaran di triwulan I untuk menambah kegiatan pertemuan pada inovasi klinik pom yang merupakan upaya pendampingan pelaku usaha untuk melakukan registrasi produk yang bekerjasama dengan DPMPTSP di kabupaten di Jawa Timur, sedangkan di triwulan II tidak ada revisi anggaran.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Tidak ada kegiatan bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	Tidak semua peserta mengisi survei keluasan pelaku usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh peserta	Tidak semua peserta mengisi survei keluasan pelaku usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh peserta

Keterangan	April	Mei	Juni
		terutama untuk kegiatan secara daring (<i>online</i>) dan pelaku usaha UMK	terutama untuk kegiatan secara daring (<i>online</i>) dan pelaku usaha UMK
Rekomendasi Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala Menyiapkan survei <i>paperbased</i> bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei <i>online</i> Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/ <i>gimmick</i> /modul)	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala Menyiapkan survei <i>paperbased</i> bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei <i>online</i> Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/ <i>gimmick</i> /modul)	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala Menyiapkan survei <i>paperbased</i> bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei <i>online</i> Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/ <i>gimmick</i> /modul)
Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala Menyiapkan survei <i>paperbased</i> bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei <i>online</i> Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/ <i>gimmick</i> /modul)	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala Menyiapkan survei <i>paperbased</i> bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei <i>online</i> Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/ <i>gimmick</i> /modul)	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala Menyiapkan survei <i>paperbased</i> bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei <i>online</i> Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/ <i>gimmick</i> /modul)
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulan April dengan nilai 94,42 (tidak ada perubahan dibanding bulan Maret)	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulan Mei dengan nilai 94,46	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulan Juni dengan nilai 95,63
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei:	Kondisi Juni: Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan untuk kegiatan desk CPKB, CPOTB, dan IP CPPOB (klinik POM)	Kondisi Juli:
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	open	open	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2022 sudah mencapai target tahun 2024, namun tidak dilakukan usulan menaikkan target karena sejak akhir tahun 2022 hingga triwulan II tahun 2023 Badan POM diterpa isu sirup obat yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sehingga dikhawatirkan nilai indeks indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan

dan pembinaan pengawasan obat dan makanan akan menurun di tahun 2023 seiring dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Badan POM

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 47. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service

Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Hingga triwulan II tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Hingga triwulan II tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Survey Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat baru diperoleh pada bulan November 2023. Pengambilan data baru akan dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55	-	-	-

Hingga triwulan II tahun 2023 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan targeta tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indeks Kepuasan Masyarakat untuk Propinsi Jawa Timur 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun 2019 : 69,78

Tahun 2020 : 74,18

Tahun 2021 : 66,55

Tahun 2022 : 78,14

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 4 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang sangat signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah inovasi Cangkrū'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkrū'an adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. Cangkrū'an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadopsi konsep Cangkrū'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkrū'an ini mendapat sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan memulai berusaha. Masih dalam format Cangkrū'an, BBPOM Surabaya juga memberikan layanan konsultasi informasi secara langsung yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui zoom meeting dalam format AMKM "Anda Menanyakan Kami Menjawab" dimana setiap pelanggan dilayani oleh seorang pemberi layanan informasi melalui zoom meeting.

Selama Triwulan II tahun 2023, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 5 kali kegiatan Cangkrū'an dengan jumlah total peserta oleh 64 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, kelompok usaha pangan, lintas sektor, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrū'an antara lain : Konsultasi langsung Anda Menanyakan Kami Menjawab, Sosialisasi Standar Pelayanan Publik BBPOM Surabaya tahun 2023, Jenis Layanan Publik BBPOM Surabaya, Persyaratan IP CPPOB melalui e sertifikasi.

BBPOM Surabaya baru baru ini juga melahirkan program inovasi baru yaitu Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) yang merupakan program pendampingan dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata. Program ini dimulai di kota yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur yaitu Kota Batu. Sebanyak 100 orang lebih pedagang kreatif lapangan telah mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan terutama tentang hygiene dan sanitasi serta penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi, para PKL mendapatkan praktek langsung bagaimana menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan pada gerobak mereka (street food booth/stall). Setelah memenuhi semua persyaratan, para PKL akan mendapatkan stiker keamanan pangan dari BBPOM Surabaya. Target program Jatim truly selanjutnya adalah PKL di wilayah alun alun kota Pasuruan dan sekitarnya yang merupakan permintaan dari Walikota Pasuruan agar semua PKL disertifikasi oleh BBPOM Surabaya. Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan Tagline baru yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negative dan Hoax yang beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga membentuk kader dan duta untuk menjadi Agent of Change

BBPOM di Surabaya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan terdekatnya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Kasus EG DEG yang terjadi pada tahun 2022 harus menjadi peringatan dan kewaspadaan bagi BPOM agar senantiasa meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat mengantisipasi semua tahap dan perilaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya. Tindakan pengawasan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam mengatasi kasus EG DEG diharapkan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BPOM. Masyarakat awam membutuhkan informasi yang menenangkan dan membuat mereka yakin akan produk yang akan dikonsumsi. Regulatory Action yang dilakukan BPOM memaksa semua pelaku usaha mengevaluasi kembali semua SOP dan tahapan yang mereka lakukan dan meyakinkan masyarakat bahwa produk yang mereka hasilkan aman dikonsumsi. Tindakan bersama sama yang dilakukan semua pihak baik BPOM, Pelaku Usaha, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan iklim usaha yang sehat. Tenaga Kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan juga aware dan waspada dengan informasi up date yang disampaikan oleh BPOM.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 49. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	QDC.001.051	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	A Pemberdayaan Masyarakat Melalui Webinar Keamanan Obat dan Makanan	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			B Pemilihan Duta Jamu Jawa Timur (Obat Tradisional Aman dari Bahan Kimia Obat)	1 kegiatan	0	0	0	0	1	0
			C Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling	8 kali/trip	8	2	0	0	0	0
			D Penyebaran Informasi Keamanan Obat dan Makanan Melalui Pameran	1 kegiatan	0	0	0	1	0	1
			E Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
QDC.001.052	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan		A Pelatihan Peningkatan Kompetensi	2 kegiatan	0	0	0	0	1	0
			B Koordinasi Teknis Antar Instansi	30 kali/trip	3	2	3	0	3	0
			C Pemantauan Toksikovigilans	3 bulan	1	1	0	0	0	0
			D Sosialisasi Pelaporan Data Keracunan	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung telah dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama triwulan II tahun 2023 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 1.597 melalui berbagai media antara lain secara langsung, melalui WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, radio, televisi, webinar (Cangkruan) dan pameran. Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan berbagai materi pemberian informasi sesuai dengan permintaan stakeholder.

Selama Triwulan II tahun 2023, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 16 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Unjuk Kerja dan Karya Ilmiah Higiene dan Sanitasi dalam Pembuatan Produk Makanan dan Minuman, Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan Angkatan IV Tahun 2023, Sosialisasi Keamanan Pangan Olahan bagi Keluarga Resiko Stunting (KRS), Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Keamanan Pangan Angkatan III Tahun 2023, Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN- 2 - Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Peningkatan Kompetensi Penjamah Pangan, Bimbingan Teknis Penjamah dan Pengelola Makanan Tahun 2023, Bimbingan Teknis Wirausaha Baru (WUB) Produksi Minuman Herbal bagi Masyarakat Ds. Gedongombo, Kecamatan Semanding, di Kabupaten Tuban yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jawa Timur, Pemberdayaan pelaku usaha IRTP, Dampak Konsumsi Makanan Mengandung Bahan Kimia, Bimtek Ijin Edar dan masa kadaluarsa produk, Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Tahun 2023, Sosialisasi Penerapan Mutu dan Sertifikasi SNI Produk Perikanan, Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Produk Olahan Makanan Minuman, yang diselenggarakan lintas sektor dan pemerintah daerah se Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BBPOM Surabaya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 50. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	89.885.000	36.818.600	40,96	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan II tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Terdapat sedikit revisi pergeseran anggaran kegiatan penyuluhan bersama label.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Permasalahan boraks yang masih ada di masyarakat	Hasil audiensi kegiatan Pro PN ke pemerintah daerah menunjukkan harapan peran BPOM untuk mengintervensi daerahnya masing-masing. Jombang : intervensi kepada 5000 orang kader pengajian setiap bulan, Kota Pasuruan : intervensi kepada PKL di Kota Pasuruan, Sidoarjo : intervensi kepada 1000 kader desa, Kota Kediri : intervensi keamanan PJAS kepada seluruh sekolah di Kota Kediri	Pangan mengandung bahan berbahaya masih banyak beredar di masyarakat.
Rekomendasi Perbaikan	Perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan boraks	Melakukan koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah untuk merealisasikan kegiatan dengan kolaborasi sehingga tidak menghabiskan sumber daya kita	Melaksanakan sosialisasi dan KIE kepada masyarakat tentang bahan berbahaya pada pangan dan dampaknya pada kesehatan.
Rencana Aksi	- Pertemuan dengan lintas sektor di seluruh Jatim untuk menggali/mendapatkan masukan terkait permasalahan boraks - Membuat program eradikasi boraks	Koordinasi dan komunikasi dengan Pemda terkait teknis pelaksanaan	Memperbanyak Sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum ada kegiatan yang fokus untuk pemberantasan boraks	belum adanya rencana kegiatan	Masih banyak pangan mengandung bahan berbahaya yang beredar.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : sudah ada masukan dari lintas sektor terkait permasalahan boraks	Kondisi Juni : Tersusunnya rencana kegiatan	Terjadi penurunan persentase pangan mengandung bahan berbahaya.
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	close	close	close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2022 telah tercapai, namun target periode akhir renstra masih belum tercapai. Untuk perbaikan branding Balai Besar POM di Surabaya, pada triwulan I tahun 2023 telah diciptakan inovasi Jatim Truly yang merupakan upaya pembinaan dan stikerisasi pada para pedagang kaki

lima disekitar daerah wisata. Inovasi ini telah mendapat dukungan dari pemda setempat. Diharapkan hal ini dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Setelah pada awal tahun dilakukan program inovasi Jatim Truly di Kota Batu, pada tahap berikutnya direncanakan akan dilaksanakan di Kota Pasuruan dengan target para PKL yang berdagang di alun alun Kota Pasuruan dan sekitarnya.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 52. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Surabaya untuk tahun 2023 adalah 91.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya di tahun 2023 untuk 10 (sepuluh) jenis layanan yang dilakukan, yaitu layanan:

1. Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan
2. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap
3. Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan
4. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Secara Bertahap Golongan A
5. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Secara Bertahap Golongan B

6. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika
7. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
8. Pengujian Obat dan Makanan
9. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan
10. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik

Pada triwulan II tahun 2023, sedang berlangsung penyebaran kuesioner SKM kepada pelanggan, sehingga hasil SKM belum diperoleh hasil.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena belum ada hasil survey.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	-	-	-

Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM baru diperoleh di akhir tahun sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2023.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik BBPOM di Surabaya sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 9 (Sembilan) unsur penilaian (sesuai pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017) yang diukur pada SKM.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya antara lain:

- Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya yang memuat unsur-unsur pelayanan publik, yang mana dalam penyusunannya dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari pengguna layanan.
- Melengkapi Standar Pelayanan Publik terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik, BBPOM Surabaya harus memfasilitasi semua kepentingan dan kelompok masyarakat yang

membutuhkan pelayanan, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam katagori kelompok rentan yaitu disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam. Tujuan dari revisi Standar Pelayanan Publik ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

- Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut yang dititikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dan masukan/saran dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti.
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan layanan publik, antara lain dengan variasi/ragam pemberian sosialisasi kepada pelanggan.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayan publik. Kemampuan berkomunikasi dan menangani keluhan pelanggan adalah kompetensi penting dan utama sebagai pemberi layanan publik.
- Kegiatan *briefing "morning breeze"* untuk petugas pelayanan publik yang bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas pelayanan dalam menghadapi kendala di lapangan dan update regulasi/kebijakan terkini yang berkaitan dengan layanan publik.
- Kolaborasi eksternal untuk mengatasi tantangan SDM, yaitu dengan membentuk fasilitator mahasiswa magang yang dapat membantu pelanggan seperti membantu pelanggan ketika mengalami kendala di aplikasi layanan publik.
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan, terutama untuk kelompok rentan. Sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat. Hampir semua fasilitas tersebut telah berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya kecuali lift khusus karena di BBPOM Surabaya tidak tersedia lift karena Gedung layanan publik hanya 2 lantai dan ruang layanan publik ada di lantai 1.

- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan dan kompensasi kepada pelanggan.
- Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.

Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 54. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A FORUM KOMUNIKASI PENERAPAN DAN PELAYANAN SKI/SKE DENGAN LINTAS SEKTOR	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			D Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	20 kali/trip	2	6	2	5	2	2
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat	A Peningkatan Kompetensi Pegawai	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT BPOM dalam pengawasan importir OT dan SK	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya.

Kegiatan yang menunjang di triwulan II tahun 2023 antara lain Forum Konsultasi Publik dengan berbagai pemangku kepentingan (pelaku usaha, importir/eksportir, akademisi, tokoh masyarakat, lintas sektor, asosiasi, media masa, dll) untuk mendapatkan masukan dan saran tentang Standar Pelayanan Publik.

Kegiatan pemeriksaan terhadap 13 sarana importir/eksportir dalam rangka pemenuhan pemberian sertifikat SKI/SKE serta kegiatan peningkatan kompetensi untuk petugas layanan publik dilakukan melalui diseminasi melalui kegiatan internal substansi/*morning breeze* dilakukan pada triwulan II.

Selain itu, kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya adalah konsistensi dan pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **AMKM** (Anda Menanyakan Kami Menjawab), **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SIPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), **Jatim Glowing** (Jawa Timur Global Cosmetic World

Marketing), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Selain inovasi yang membantu pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung *back office* dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan *fairness*, serta akuntabilitas.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 55. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	36.218.500	18.419.645	50,86	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan II tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Telah dilakukan revisi anggaran untuk penambahan biaya kegiatan baru yaitu Desk Monitoring dan Evaluasi Realisasi Impor dan revisi penyesuaian perjalanan dinas untuk peningkatan kompetensi pegawai. Diharapkan kegiatan ini dapat menunjang peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 56. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Link survei masih menggunakan link survei yang dari Hukor.	Kendala aplikasi layanan publik dapat meningkatkan resiko ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	Aplikasi Pelayanan Publik BPOM mengalami kendala yang mengakibatkan pelaku usaha merasa dirugikan.
Rekomendasi Perbaikan	Pengisian link survei terbaru yang terintegrasi dengan SAPAPIP	- Mendampingi pelanggan apabila ada kendala aplikasi - Mengkomunikasikan dengan baik kepada pelanggan terkait kendala aplikasi yang tidak bisa diprediksi	Menjelaskan kepada pelaku usaha bahwa aplikasi pelayanan publik BPOM sedang dalam perbaikan.
Rencana Aksi	Menyebarkan survei kepada pelanggan dengan link terbaru	Pemberian Survei kepada pelanggan yang telah 100 Persen diberikan pelayanan	Membuat pengumuman di media sosial BBPOM Surabaya.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	PIC belum sepenuhnya paham adanya pergantian link	Target bulanan belum tercapai	Banyak keluhan pelanggan.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	PIC telah memahami adanya perubahan link dan dilakukan movev	Kondisi Juni : target bulanan tercapai, dan target SKM tercapai	Banyak keluhan pelanggan.
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	Close	Close	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 dan tahun 2023 telah tercapai, namun target tahun 2024 belum tercapai. BBPOM di Surabaya harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Konsultasi dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan *platform* sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Kotak saran di kantor jelas tidak dapat diandalkan sebagai satu satunya sarana pengaduan. Karena itu BBPOM di Surabaya menambahkan fitur pengaduan melalui *website* BBPOM di Surabaya di www.bbpomsurabaya.pom.go.id. Website ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT
DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 7 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 57. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	93	99,85	107,36	Memenuhi ekspektasi
Mei	93	99,00	106,45	Memenuhi ekspektasi
Juni	93	99,09	106,54	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 274 keputusan/rekomendasi dari 283 keputusan/rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Triwulan II **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 106,54 % dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	93	98,02	105,40	memenuhi ekspektasi
Triwulan II	93	99,09	106,54	memenuhi ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi di triwulan II meningkat dibandingkan dengan triwulan I dikarenakan telah diupayakan memberikan surat teguran tertulis kepada petugas yang penyelesaian surat tindak lanjutnya melebihi batas timeline serta meningkatkan monitoring evaluasi (monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 59. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	99,09	106,54	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai target** Tahun 2023, dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga akhir tahun 2023.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada triwulan II, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 106,54% , terdapat 9 (sembilan) surat tindak lanjut yang belum diselesaikan oleh petugas, karena untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan terdapat perubahan ceklist pemeriksaan dari Form B menjadi Form 33 sehingga ada perubahan ketentuan yang semula sarana dengan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan (MK) tidak perlu dibuatkan surat tindak lanjut tetapi dengan ceklist yang baru Form 33, maka sarana dengan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan (MK) tetap dibuatkan surat tindak lanjut. Kendala yang lain adalah karena penuhnya jadwal dinas luar untuk pemeriksaan sarana sehingga petugas belum membuat surat tindak lanjut tepat waktu. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 100,0% , karena terdapat 4 surat dari Deputi 2 dan 1 surat dari Deputi 3 yang masuk telah ditindaklanjuti semua. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 100,0 % , karena terdapat 3 surat Pengaduan terkait kosmetik dan 1 surat Pengaduan terkait pangan yang masuk telah ditindaklanjuti. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 100 % karena terdapat 1 surat dari Deputi 1 dan 1 surat dari Deputi 2 merupakan surat rekomendasi BBPOM di Surabaya yang ditindaklanjuti. Upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya untuk pencapaian target yaitu memberikan teguran kepada petugas yang belum membuat surat tindak lanjut sampai batas timeline, tetap meningkatkan monitoring evaluasi terhadap rekomendasi surat tindak lanjut dan tetap koordinasi/ komunikasi dengan Pusat/Kedeputian terkait surat rekomendasi BBPOM di Surabaya yang ditindaklanjuti pusat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 60. Rencana Aksi pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		APRIL		MEI		JUNI	
				T	R	T	R	T	R		
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	8	kali/trip	0	0	0	0	1	0
	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	29	kali/trip	2	2	2	2	2	0

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan II tahun 2023 adalah:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pengaduan dan pemeriksaan sebanyak 30 kegiatan.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 61. Efisiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	51.487.000	51.487.000	100	106,54	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi penambahan anggaran terhadap biaya perjadi tindak lanjut pengawasan pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti hasil pengaduan dan menindaklanjuti surat hasil pengawasan dari pusat khususnya kasus sirup obat yang mengandung EG dan DEG.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 62. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dibuat Terdapat 3 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana belum dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga melewati batas timeline. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 6 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana bulan pertengahan April yang belum dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga melewati batas timeline. Perubahan ketentuan terhadap pemeriksaan sarana distribusi dikarenakan perubahan ceklist pemeriksaan yang semula MK tidak dibuat surat tindak lanjut tetapi sekarang MK tetap dibuatkan surat tindak lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 9 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana bulan pertengahan Mei yang belum dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga melewati batas timeline. Petugas jarang berada di tempat disebabkan load pemeriksaan sarana per petugas tinggi karena ada petugas sakit , cuti haji, pelatihan
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah melewati batas timeline Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah melewati batas timeline. Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah melewati batas timeline Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Surat teguran tertulis bagi petugas yang penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang melewati batas timeline 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Teguran lisan/mengingatkan pada petugas yang penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang melewati batas timeline 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Mengingatkan pada petugas yang penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang melewati batas timeline

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Progress April : % Capaian terjadi peningkatan dari 105,40% menjadi 107,36%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi pada bulan Mei 2023	Progress Mei : % Capaian terjadi penurunan dari 107,36% menjadi 106,45%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan di bulan Juni 2023	Progress Juni : % Capaian terjadi sedikit peningkatan dari 106,45% menjadi 106,54%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di TW III 2023
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	Close	Close	Close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi telah melebihi target tahun 2023 dan bahkan target tahun 2024. Namun, tidak dilakukan pengusulan perubahan target karena terdapat beberapa perubahan untuk tindak lanjut seperti pada hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan sehingga bisa mempengaruhi pencapaian target.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 63. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	77	80,70	104,80	Memenuhi ekspektasi
Mei	77	77,23	100,30	Memenuhi ekspektasi
Juni	77	78,30	101,69	Memenuhi ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan

tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 244 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 174 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 101,69 % dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 64. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	77	79,39	103,10	memenuhi ekspetasi
Triwulan II	77	78,30	101,69	Memenuhi ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan di triwulan II turun dibandingkan dengan triwulan I dikarenakan kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector yang rutin.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	77	78,30	101,69	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan II tahun 2023 **sudah mencapai** target tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target akhir tahun 2023 tetap dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan II tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 70,89%, terdapat 69 surat tindak lanjut BBPOM di Surabaya belum diberikan feedback oleh pelaku usaha karena kurangnya kesadaran dan tidak ada sangsi bila tidak memberikan feedback, untuk pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional jarang ada feedback karena pemilik sarana (toko jamu, depot jamu tradisional) tidak mengerti bagaimana cara memberikan feedback/membalas surat tindak lanjut BBPOM di Surabaya. Untuk pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dan kosmetik yang hasil pemeriksaannya TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) telah diberikan contoh format surat balasan kepada pemilik sarana untuk mempermudah memberikan surat tindak lanjut ke Balai sehingga mendukung pencapaian target IKU.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 85,71%, terdapat 1 surat dari Dinas Kesehatan yang belum memberikan feedback terkait pemeriksaan sarana IRTP. Upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya agar pelaku usaha/ lintas sector memberikan feedback untuk pencapaian target yaitu :

- Tetap melakukan sosialisasi ke pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.
- Berkirim surat kembali sebagai Surat Peringatan CAPA/ Surat permintaan Tindak Lanjut hasil Pembinaan kepada pelaku usaha/ lintas sector.
- Monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ Surat Tindak Lanjut Pembinaan dari sarana (pelaku usaha)/ lintas sector.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 66. Rencana Aksi pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B Koordinasi/Konsultasi/Join Inspection	23 kali/trip	2	2	2	2	2	1
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B Koordinasi Lintas Sektor	60 kegiatan	2	1	2	4	2	3
	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	A Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Obat dan Makanan	50 kali/trip	5	1	4	9	5	9

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah:

- Koordinasi bersama lintas sektor meliputi bupati/walikota, dinas kesehatan, DPMPSTP, dinas perindustrian dan perdagangan, dan lain-lain.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana namun belum maksimal.
- Penggunaan aplikasi *Smart* POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan *feedback* lintas sektor (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 67. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	135.942.299	135.942.299	100	103,10	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi anggaran penambahan biaya Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Obat dan Makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 68. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan <i>feedback</i> /	Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan <i>feedback</i> /	Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk

Keterangan	April	Mei	Juni
	mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan	mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan	memberikan feedback / mengirim CAPA/ tindakan perbaikan
Rekomendasi Perbaikan	Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirim CAPA Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector	Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirim CAPA Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirim CAPA Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector Mengirimkan surat permintaan CAPA/permintaan hasil tindak lanjut pembinaan kepada pelaku usaha / lintas sektor
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke Dinkes terkait feedback dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke lintas sektor dan pelaku usaha terkait CAPA yang harus dikirimkan 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirim CAPA Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintassektor Mengirimkan surat permintaan CAPA/permintaan hasil tindak lanjut pembinaan kepada pelaku usaha /lintassektor
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Pelaku Usaha tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya	Pelaku Usaha tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha maupun lintas sektor tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku usaha mulai memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya Progress April : % Capaian terjadi peningkatan dari 103,10% menjadi 104,80%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi pada Mei 2023	Progress Mei : % Capaian terjadi penurunan dari 104,80% menjadi 100,30%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi pada Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku usaha mulai memberikan respon dengan mengirim CAPA sarana ke BBPOM Surabaya , namun untuk lintas sektor belum memberikan respon Progress Juni : % Capaian terjadi peningkatan dari 100,30% menjadi 101,17%. Diharapkan capaian bisa ditingkatkan pada TW III 2023
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	Close	Close	Close

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target triwulan I sudah tercapai dan berdasarkan laporan kinerja triwulan II tahun 2023 telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan koordinasi/ komunikasi dengan lintas sektor atau sarana (pelaku usaha) terkait feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya. Bila tidak ada respon berkirim surat

kembali dengan memberikan Surat Peringatan CAPA/ Permintaan Surat Hasil Tindak Lanjut Pembinaan kepada pelaku usaha/ lintas sektor.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 69. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	99	95,75	96,72	Belum memenuhi ekspektasi
Mei	99	95,49	96,46	Belum memenuhi ekspektasi
Juni	99	95,53	96,49	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} : \text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil

pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan II tahun 2023 diperoleh dari 8565 (95,53%) sertifikat yang diterbitkan tepat waktu terhadap jumlah permohonan yang masuk sebanyak 8.966. Persentase capaian sebanyak 96,49% yang masuk dalam kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	99	95,36	96,33	belum memenuhi ekspektasi
Triwulan II	99	95,53	96,49	belum memenuhi ekspektasi

Bila dibandingkan dengan triwulan I, terdapat sedikit peningkatan realisasi dan capaian pada triwulan II. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 1 orang petugas baru di fungsi sertifikasi sehingga membantu percepatan penyelesaian sertifikasi. Namun demikian, target masih belum dapat tercapai atau belum memenuhi ekspektasi karena masih ada kendala sistem ebpom tidak dapat diakses sama sekali pada bulan Mei sebanyak 3 hari kerja dan pada bulan April sebanyak 4 hari kerja sehingga pada hari berikutnya disaat ebpom dapat diakses terjadi penumpukan pengajuan/ permohonan.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	95,53	96,49	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2023 belum mencapai target Tahun 2023 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, dengan demikian perlu dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai target tahun 2023.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada triwulan II seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilaksanakan secara *on site*. Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*, terlebih untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat melakukan pengamatan secara keseluruhan.

Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemenuhan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik pada triwulan II diprioritaskan untuk pelaku usaha industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik bagi usaha menengah besar adalah dengan dilakukan audit terlebih dahulu sedangkan pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dilakukan setelah Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik telah terbit, yaitu paling lambat 12 bulan setelah Izin Penerapan terbit. Pada triwulan II juga dilaksanakan pemeriksaan sarana dalam rangka Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik kepada usaha mikro dan kecil, terutama yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB mendekati atau lebih dari 12 bulan.

Pemeriksaan sarana dalam rangka Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, dan Sertifikasi CDOB hingga triwulan II telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 100%. Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan *timeline* SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Namun perhitungan *timeline* SKI tetap sesuai peraturan yaitu 6 jam. Capaian yang tidak memenuhi ekspektasi

terutama disebabkan oleh pemenuhan penyelesaian SKI/SKE yang melebihi *timeline*. Kendala dalam pemenuhan timeline tersebut, antara lain:

- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Importir / eksportir yang tidak memahami permintaan pemenuhan data oleh petugas tidak segera berkonsultasi dengan petugas, namun mengunggah dokumen yang masih tidak sesuai sehingga terjadi penolakan lagi oleh petugas.
- Terdapat unggahan dokumen dari importir / eksportir yang perlu diklarifikasi secara langsung (tatap muka) dahulu oleh petugas sehingga waktu penyelesaian lebih lama dan berdampak pada survei kepuasan pelanggan.
- Terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi.
- Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan pusat sehingga membutuhkan waktu keputusan lebih lama.
- Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan evaluasi dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi evaluator untuk dapat membedakan pengajuan yang harus dilakukan evaluasi kembali terlebih dahulu setelah dilakukan perbaikan oleh pemohon.
- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terdapat petugas sertifikasi baru yang belum memiliki kompetensi cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi.
- Terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE, misalnya melaksanakan audit sarana, melakukan konsultasi denah, melakukan evaluasi izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik secara bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE.
- Terkait *timeline* yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan melakukan prioritas evaluasi berdasarkan timeline masing-masing komoditi dengan urutan sebagai berikut evaluasi SKI penolakan, SKI komoditi obat, kosmetik, lalu pangan.

- Untuk SKE, BBPOM di Surabaya sudah menetapkan *timeline* 1 hari sesuai dengan inovasi SKETSA. Adanya SKE yang tidak sesuai *timeline* disebabkan oleh kondisi tertentu yang harus dikonsultasikan lebih dulu ke Badan POM atau adanya gangguan sistem pada e-bpom.
- Sejak sistem e-bpom mulai migrasi dengan Pusat Data Nasional, seringkali terjadi kendala pada sistem sehingga mengganggu pemenuhan SLA yang telah ditetapkan.
- Sejak tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem *online* dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga harus sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dan evaluasi permohonan SKI/SKE.

Evaluasi terhadap realisasi impor *post border* juga dilaksanakan oleh petugas untuk mendata importir yang tidak memiliki SKI melebihi batas waktu yang ditetapkan di Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Pelaksanaan evaluasi tidak mudah karena cukup banyak *HS code* yang berurusan dengan bahan atau produk non komoditi obat dan makanan. Untuk importir yang melanggar akan diberikan surat peringatan.

Selain kegiatan sertifikasi rutin tersebut, petugas Sertifikasi Balai Besar POM di Surabaya juga melaksanakan evaluasi terhadap pemasukan barang kiriman dan barang tentengan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan, bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda dan Tanjung Perak. Rekomendasi dapat diberikan kepada pemohon bila sesuai dengan persyaratan mengacu pada Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Namun ada kalanya kebijakan bersyarat diberikan melihat kondisi tertentu dari pemohon.

Diterapkan sejak akhir Februari 2023, hingga triwulan II terdapat 111 permohonan rekomendasi pemasukan barang kiriman dan barang tentengan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Terhadap permohonan

tersebut, terdapat beberapa yang ditegah penuh karena tidak sesuai dengan peraturan dan terlalu beresiko bila diberi kebijakan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 72. Rencana Aksi pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi	189 kal/trip	16	26	17	33	17	35
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	I Bimtek Inspektur Kosmetik	1 kal/trip	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi. Keputusan sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB masih memenuhi timeline meskipun hasil keputusan tersebut tidak seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, petugas BBPOM di Surabaya memberikan layanan konsultasi pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan. Selain itu, juga dilakukan *desk* Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) terkait upaya perbaikan hasil temuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya arahan tersebut, pelaku usaha dapat lebih cepat memenuhi ketentuan Cara Produksi yang Baik maupun Cara Distribusi yang Baik.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 73. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	267.960.000	217.598.700	81,21	96,49	100% (efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi anggaran untuk penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas untuk audit dalam rangka sertifikasi dan registrasi Obat dan Makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 74. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom

Keterangan	April	Mei	Juni
	<p>2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir</p> <p>3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda</p> <p>4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat</p> <p>5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem</p> <p>6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan</p> <p>7. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama</p>	<p>2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir</p> <p>3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda</p> <p>4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat</p> <p>5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem</p> <p>6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan</p> <p>7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama</p> <p>8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat</p>	<p>2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir</p> <p>3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda</p> <p>4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat</p> <p>5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem</p> <p>6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan</p> <p>7. Penyelesaian CAPA IP CPPOB oleh Usaha Menengah Besar membutuhkan waktu lama terutama bila terkait perbaikan fisik</p> <p>8. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama</p> <p>9. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat</p>
Rekomendasi Perbaikan	<p>1. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala tersebut</p> <p>2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE</p> <p>3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda</p> <p>4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut</p> <p>5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB</p> <p>6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB</p> <p>7. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru</p>	<p>1. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala tersebut</p> <p>2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE</p> <p>3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda</p> <p>4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut</p> <p>5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB</p> <p>6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB</p> <p>7. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru</p>	<p>1. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala tersebut</p> <p>2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE</p> <p>3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda</p> <p>4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut</p> <p>5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB</p> <p>6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB</p> <p>7. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru</p>
Rencana Aksi	<p>1. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom</p> <p>2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE</p> <p>3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda</p> <p>4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut</p> <p>5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB</p> <p>6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik</p> <p>7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap</p> <p>8. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru</p>	<p>1. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom</p> <p>2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE</p> <p>3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda</p> <p>4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut</p> <p>5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB</p> <p>6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik</p> <p>7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap</p> <p>8. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru</p>	<p>1. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom</p> <p>2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE</p> <p>3. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda</p> <p>4. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut</p> <p>5. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB</p> <p>6. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik</p> <p>7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap</p> <p>8. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru</p>

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	open	Open	open

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja 2022, diketahui bahwa target IKU tidak tercapai. Penyumbang terbesar dari kecilnya realisasi dibanding dengan target adalah penyelesaian evaluasi permohonan SKI/SKI secara tepat waktu dan telah dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan. Realisasi pada triwulan I dan II tahun 2023 juga belum mencapai target, sehingga akan diusulkan penurunan target IKU tahun 2024.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 75. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	65	66,04	101,60	Memenuhi ekspektasi
Mei	65	62,94	96,83	Belum Memenuhi ekspektasi
Juni	65	65,00	100,00	Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 200 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 130 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 70 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan II adalah sebesar 65,00 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi

ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan II adalah 100,00 % dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	65	69,89	107,53	memenuhi ekspektasi
Triwulan II	65	65,00	100,00	memenuhi ekspektasi

Terdapat penurunan realisasi dan capaian triwulan II dibandingkan triwulan I. Pada triwulan II pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa, selain itu pada triwulan II terdapat beberapa kendala pemeriksaan antara lain libur cuti bersama Idul Fitri pada akhir April 2023, beberapa petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan kondisi Kesehatan dan cuti untuk beribadah haji, terdapat 3 kali pelatihan internal (bimtek CPOB dan bimtek CPOTB) di bulan Mei dan Juni. Meskipun demikian, capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah memenuhi ekspektasi.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65,00	100,00	memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **sudah mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 tetap dapat tercapai.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2023 adalah 65,00% telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Pada triwulan II tahun 2023, pemeriksaan sarana

dilakukan berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; terdapat intensifikasi pengawasan sarana distribusi kosmetika dan intensifikasi pengawasan saryanfar; terdapat GAP kompetensi yang cukup tinggi; terdapat beberapa pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Mei dan Juni 2023; selain itu terdapat beberapa petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatan dan ibadah haji. Meskipun demikian, capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah memenuhi ekspektasi.

Pada triwulan II jumlah sarana produksi kosmetik yang diperiksa sebanyak 7 sarana, dengan hasil 3 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 4 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan tersebut sebagian besar disebabkan oleh ketidakkonsistensian pelaku usaha dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) pada saat kegiatan produksi, overload dalam proses produksi dan temuan berulang pemeriksaan sebelumnya.

Dari 404 target sarana produksi yang diperiksa, sarana produksi pangan merupakan sarana yg paling banyak diperiksa yaitu 309 sarana, sehingga mempunyai kontribusi yang paling besar/ penyumbang terbesar untuk hasil tmk (tidak memenuhi ketentuan) hal ini disebabkan sarana produksi tidak konsisten dalam menerapkan cppoob dalam hal:

- Sanitasi higiene
- Dokumentasi, mulai maret 2022 pemeriksaan sarana produksi pangan menggunakan ceklis 68 dimana pada ceklist tersebut, aspek dokumentasi, prosedur tetap menjadi persyaratan yang harus dimiliki sarana produksi pangan sedangkan pada kondisi eksisting sarana produksi pangan sebagian besar tidak menyimpan/hilang/ tidak konsisten dalam implementasi
- Terkait label/penandaan yg tidak lengkap/ tidak sesuai dengan yg disetujui bpom
- Adanya temuan produk pangan tanpa ijin edar

Dengan banyaknya sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan, telah dilakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan antara lain dengan:

- Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana sampai dinyatakan close
- BBPOM Surabaya akan tetap melakukan intervensi melalui pengawasan rutin pemeriksaan sarana agar tetap menerapkan CPPOB secara konsisten dan melakukan pengawasan melalui sampling dan penandaan

- Merencanakan kegiatan bimtek pelaku usaha dan desk capa dengan mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan yang akan dilaksanakan pada triwulan 3 hingga 4 tahun 2023.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 78. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI		
					T	R	T	R	T	R	
13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	QIC.001.053	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A Advanced GMP Training for Inspectors Deputi 2	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0
			B Pendampingan Inspektur dalam penerapan CPOTB terkini pada pengawasan sarana melalui Joint Inspection	1	kalitrip	0	0	0	0	0	0
	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	239	kalitrip	7	10	29	18	29	33
			B Pemeriksaan CPOB	11	kalitrip	0	1	2	0	1	0
			C Inspeksi Bersama Sarana Produksi (CPOB)	7	kalitrip	0	0	1	1	1	1

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah pemeriksaan sarana produksi OMKA, pemeriksaan CPOB, dan inspeksi bersama sarana produksi. Sampai dengan triwulan II dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri farmasi) sebanyak 7 sarana; pemeriksaan pada sarana produsen Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca) sebanyak 1 kali; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 20 sarana; pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, IOT/IEBA sebanyak 4 sarana, sarana produksi suplemen kesehatan sebanyak 3 sarana; sarana produksi UKOT sebanyak 9 sarana; pemeriksaan sarana produksi UMOT sebanyak 3 sarana; pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 148 sarana, dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 5 sarana. Selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas inspeksi.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 79. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	194,600,000	172,796,050	88,80	100,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU, telah dilaksanakan revisi anggaran untuk penambahan biaya

Inspeksi Bersama Sarana Produksi (CPOB) dan penambahan jumlah petugas pemeriksaan CPOB. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk penambahan uang transport pemeriksaan CPOB dalam kota; pengurangan uang harian pemeriksaan CPOB dalam kota; pengurangan uang transport pemeriksaan CPOB luar kota dan penambahan biaya pencetakan form.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 80. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Penetapan target kinerja individual (SKP) petugas dengan menggunakan system penilaian terbaru (SIMAKIN 2023); Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Terdapat pemusnahan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG; Entry data dan penilaian SKP sehingga kegiatan inspeksi terhenti selama beberapa hari.	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Terdapat kegiatan audit internal yang dilaksanakan selama 2 hari sehingga beberapa personal pemeriksaan tidak dapat melakukan pemeriksaan; Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat dua orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit (stroke) dan cuti haji.	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat dua orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit (stroke) dan cuti haji.
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensinya; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensinya; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.
Rencana Aksi	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana. Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai ; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior..	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior
Status	open	open	open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 tercapai, namun target tahun 2023 belum tercapai sehingga pada triwulan I tahun 2023 dilaksanakan inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur), dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana produksi Obat dan makanan dengan harapan kepatuhan pelaku usaha meningkat dan sarana produksi yang memenuhi ketentuan dapat meningkat. Hal ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai upaya percepatan pencapaian target tahun 2023.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 81. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	64	72,54	113,41	Memenuhi ekspektasi
Mei	64	73,46	114,79	Memenuhi ekspektasi
Juni	64	70,08	109,50	Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21

Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 371 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 260 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 111 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II adalah sebesar 70,08%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 109,50 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	64	75,37	117,76	Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	64	70,08	109,50	Memenuhi ekspektasi

Terdapat penurunan realisasi dan capaian triwulan II dibandingkan triwulan I. Pada triwulan II pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa, selain itu pada triwulan II terdapat beberapa kendala pemeriksaan antara lain libur cuti bersama Idul Fitri pada akhir April 2023, beberapa petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatan dan cuti untuk beribadah haji, terdapat 3 kali pelatihan internal (bimtek CPOB dan bimtek CPOTB) di bulan Mei

dan Juni. Meskipun demikian, capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah memenuhi ekspektasi.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 83. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	70,08	109,50	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Namun demikian tetap dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan agar target akhir tahun 2023 bisa tetap dicapai.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada triwulan II tahun 2023, pemeriksaan sarana distribusi dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, pangan, kosmetika, penotifikasi kosmetika, sarana distribusi obat tradisional dan suplemen Kesehatan. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian antara lain terdapat banyak sarana distribusi obat (PBF) yang mengajukan permohonan resertifikasi CDOB, terdapat intensifikasi pengawasan peredaran produk kosmetika di klinik dan intensifikasi pengawasan obat yang beredar di saryanfar.

Pada triwulan 2 jumlah sarana distribusi kosmetik yang diperiksa sebanyak 23 sarana dengan hasil 8 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 15 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan tersebut sebagian besar adalah klinik kecantikan yang menjual produk cream racikan tanpa izin edar yang diduga mengandung bahan dilarang dalam produk kosmetik. Perolehan produk cream racikan berasal dari apotek lain dalam bentuk kerjasama pembuatan peracikan obat topical. Klinik kecantikan tersebut mengedarkan/menjual produk cream racikan tersebut ke konsumen/pasien dengan atau tanpa resep dari dokter.

Pemeriksaan distribusi obat pada triwulan II dititikberatkan pada pemeriksaan PBF dalam rangka audit sertifikasi/resertifikasi pemenuhan CDOB. Pada triwulan II terdapat pemeriksaan pada sarana PBF sebanyak 44 sarana dengan hasil 42 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Pemeriksaan sarana distribusi pangan sampai dengan triwulan II sebanyak 35 sarana dengan hasil 23 sarana memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut antara lain disebabkan adanya temuan terkait pangan rusak/kadaluarsa dan produk pangan tanpa ijin edar. BBPOM Surabaya melalui petugas pemeriksa selalu melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan untuk selalu memenuhi cara peredaran pangan olahan yang baik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 84. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A Inspeksi Bersama	15 kali/trip						
			B Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Dan Sarfanyar, Pangan/ Penerapan CDOB/ Audit Komprehensif/ Aksi Penertiban Obat Dan Makanan Ilegal	362 kali/trip	20	26	36	30	30	39
			C Pengawasan Kasus Khusus/Food Security	5 kali/trip	1	0	1	0	1	0
			D Pengawasan Periklanan	24 kali/trip	2	2	2	2	2	2
			F Pengawasan Penerapan Farmakovigilans	1 kali/trip	0	0	0	0	1	1
			QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik POM	2 kali/trip	1	0	0	0
	C Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen Sampling Obat	1 kali/trip	0		0	0	0	0	0	
	D Workshop Pemantapan Teknis Pengawasan Post-Market Obat Beredar	1 kali/trip	0		0	0	0	0	0	
	E Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan OT, SK dan Kosmetik	1 kali/trip	1		0	0	0	0	0	
	F Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	1 kali/trip	0		0	0	0	0	0	
	G Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT BPOM dalam pengawasan importir OT dan SK	1 kali/trip	0		0	0	0	0	0	
	H Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan	1 kali/trip	0		0	0	0	0	0	
	I Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam Rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024	1 kali/trip	0		0	0	0	0	0	
	J Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik	1 kali/trip	1	0	0	0	0	0		

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain: inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarfanyar, pangan/ penerapan CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan, dan workshop pemantapan teknis pengawasan post-market Obat. Sampai dengan triwulan II telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat sebanyak 123 sarana; pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat tersebut terdiri atas pemeriksaan pada GFK sebanyak 9 sarana; pemeriksaan pada sarana PBF sebanyak 44 sarana; pemeriksaan sarana apotek sebanyak 16 sarana; pemeriksaan sarana klinik sebanyak 24 sarana; pemeriksaan sarana puskesmas sebanyak 11 sarana; pemeriksaan sarana toko obat sebanyak 4 sarana .

Selain tersebut diatas, pada triwulan II tahun 2023 juga dilakukan pemeriksaan distribusi obat tradisional, distribusi suplemen Kesehatan, distribusi kosmetika dan distribusi pangan sebanyak 248 sarana; pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional meliputi pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional sebanyak 83 sarana. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan sebanyak 49 sarana. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 81 sarana, dan pemeriksaan pada penotifikasi kosmetika/klinik/importir sebanyak 17 sarana. Pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 35 sarana.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	360.500.000	253.386.805	70,29	109,50	92% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU dilaksanakan revisi anggaran untuk Pemanfaatan sisa anggaran kegiatan Workshop Pemantapan Teknis Pengawasan Post-Market Obat Beredar menjadi Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat; Penambahan anggaran pada kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat; Penghapusan uang transport kegiatan Food Security dalam dan luar kota dan penambahan biaya pencetakan form.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 86. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Penetapan target kinerja individual (SKP) petugas dengan menggunakan system penilaian terbaru (SIMAKIN 2023); Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Terdapat pemusnahan produk sirup yang mengandung cemaran EG-DEG; Entry data dan penilaian SKP sehingga kegiatan	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis risiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Terdapat kegiatan audit internal yang dilaksanakan selama 2 hari sehingga beberapa personal pemeriksaan tidak dapat melakukan pemeriksaan; Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat dua orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit (stroke) dan cuti haji.	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis risiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat dua orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit (stroke) dan cuti haji.

Keterangan	April	Mei	Juni
	inspeksi terhenti selama beberapa hari.		
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensinya; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensinya; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Rencana Aksi	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru; Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai ; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko; Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai ; Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior; Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Capaian IKU Pemeriksaan Sarana Distribusi TW II : 70,08 %.
Status	close	close	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, informasinya dimanfaatkan dengan melaksanakan kembali inovasi Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur) di tahun 2023, dimana dilakukan pengembangan kompetensi terhadap apoteker/penanggungjawab sarana distribusi dengan harapan kepatuhan pelaku usaha meningkat dan sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dapat meningkat.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 87. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hingga triwulan II tahun 2023 belum diperoleh Indeks Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Tim Penilai UPP. Pada tahun 2023 ini BBPOM Surabaya dipilih untuk mewakili BPOM dalam penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Pelayanan Jasa Administrasi.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena nilai indeks belum diperoleh.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	4,6	-	-	-

Realisasi indeks pelayanan publik triwulan I tahun 2023 belum tersedia menunggu penilaian dari tim penilai UPP dari BPOM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan BBPOM di Surabaya untuk mendapat kategori penilaian “Pelayanan Prima”, yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, seluruh aspek mendapatkan nilai maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

- Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala kurang dari 1 (tahun), dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
- Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di mata pelanggan.
- Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
- Upaya menunjukkan profesionalisme SDM yaitu adanya SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll
- Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinu memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, *capacity building* dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
- Pemberian reward dan punishment untuk petugas pelayanan publik

- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Fasilitas yang disiapkan sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat.
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti perubahan dekorasi, penambahan fasilitas *coffee corner*, penyediaan minuman dan kue tradisional, dll.
- Memastikan system antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik.
- Melakukan pemuktahiran system informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari, mengoptimalkan sistem informasi yang terhubung ke SIPPN, dll.
- Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai *timeline*, mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan nasional SP4N Lapor, penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.

Pengembangan inovasi yang berkelanjutan dengan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta anggaran.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 89. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
15 Indeks Pelayanan Publik	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A FORUM KOMUNIKASI PENERAPAN DAN PELAYANAN SKI/SKE DENGAN LINTAS SEKTOR	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			D Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	20 kali/trip	2	6	2	5	2	2
	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A Peningkatan Kompetensi Pegawai	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT B POM dalam pengawasan importir OT dan SK	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang menunjang di triwulan II tahun 2023 antara lain Forum Konsultasi Publik dengan berbagai pemangku kepentingan (pelaku usaha, importir/eksportir, akademisi,

tokoh masyarakat, lintas sektor, asosiasi, media masa, dll) untuk mendapatkan masukan dan saran tentang Standar Pelayanan Publik.

Kegiatan pemeriksaan terhadap sarana importir/eksportir dalam rangka pemenuhan pemberian sertifikat SKI/SKE sebanyak 13 kali, serta kegiatan peningkatan kompetensi untuk petugas layanan publik dilakukan melalui diseminasi melalui kegiatan internal substansi/*morning breeze* dilakukan pada triwulan II.

Selain itu, kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya adalah konsistensi dan pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **AMKM** (Anda Menanyakan Kami Menjawab), **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), **Jatim Glowing** (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Selain inovasi yang membantu pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung *back office* dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan *fairness*, serta akuntabilitas.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 90. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pelayanan Publik	36.218.500	18.419.645	50,86	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi anggaran belum bisa dihitung karena capaian indikator belum ada. Meski demikian, telah dilakukan banyak upaya penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik di kantor BBPOM di Surabaya untuk memenuhi ketentuan pelayanan prima antara lain penambahan guiding blok, rambatan untuk disabilitas, dan perbaikan jalur landai untuk mengakomodir adanya konsumen kelompok rentan yang datang ke kantor. Untuk pencapaian target IKU telah dilakukan revisi penambahan anggaran untuk kegiatan baru Desk Monitoring dan Evaluasi Realisasi Impor dalam rangka pelayanan prima.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 91. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	- Belum dilaksanakannya forum konsultasi publik, sebagai salah	- penyusunan draft Standar Pelayanan Publik belum final	Pemenuhan dokumen yang detail sesuai klausul dan fokus pada

Keterangan	April	Mei	Juni
	satu syarat mendasar Unit Pelayanan Publik - Pemenuhan toilet untuk kelompok rentan tidak dapat dipenuhi persyaratan secara maksimal - perlunya melakukan redesign untuk ruang pelayanan publik		kegiatan dg output sertifikat dalam rangka penilaian yanblik oleh Kemenpan RB.
Rekomendasi Perbaikan	- melakukan perencanaan kegiatan forum konsultasi publik - Diskusi dengan perencana renovasi toilet kelompok rentan dan ruang yanblik	Menyusun SPP tahun 2023 menyesuaikan dengan Standar Pelayanan BPOM terbaru	Menyiapkan data dukung secara kontinu agar dapat memenuhi persyaratan dokumen
Rencana Aksi	- menyusun rencana perbaikan - menetapkan tanggal kegiatan konsultasi publik	Melakukan reviu SPP tahun 2023	mengoptimalkan PIC di masing-masing aspek untuk melakukan pengkinian data dan memelihara apa yang sudah dimiliki, serta pelaksanaan yanblik yang konsisten sesuai dengan aturan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Belum dilaksanakannya forum konsultasi publik, sebagai salah satu syarat mendasar Unit Pelayanan Publik	Belum memiliki SPP tahun 2023	Data dukung belum terdokumentasi dengan baik dan adanya perbedaan persepsi klausul penilaian yang dipersyaratkan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : sudah dilaksanakan forum konsultasi publik	Kondisi Juni : SPP Tahun 2023 sudah disusun dan disahkan	dokumen dan perencanaan penilaian UPP tertata dengan baik,
Status	close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2022, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 4,9 melebihi target tahun 2023 dan target akhir periode renstra. Namun demikian, terdapat perubahan tools penilaian di tahun 2023 oleh menpan dan setelah dilakukan konversi nilai, maka nilai indeks pelayanan publik tahun 2022 adalah 4,52, sehingga dilakukan revisi penaikan target IPP tahun 2023 dari 4,51 menjadi 4,6 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 92. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	50,8	72,18	142,08	Tidak dapat disimpulkan
Mei	59,5	73,01	122,71	Memenuhi Ekspektasi
Juni	70,6	74,25	105,17	Memenuhi Ekspektasi

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin

berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2023. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2023.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan II tahun 2023 sebesar 74,25 dengan capaian sebesar 105,17% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 93. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	31,1	68,46	220,12	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II	70,6	74,25	105,17	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat kenaikan realisasi dan penurunan capaian triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan I. Hal ini dikarenakan upaya pendampingan terus menerus dilakukan dengan upaya percepatan melalui kegiatan inovasi Gempur Jatim.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 94. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	74,25	74,25	Tidak memenuhi ekspektasi

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan II tahun 2023 tidak memenuhi ekspektasi bila dihitung sesuai tahapan progres. Perbandingan realisasi terhadap target tahunan dapat dilakukan di bulan Desember karena tahapan pendampingan masih berproses dan realisasi akan dihitung bila seluruh tahapan pendampingan selesai dilaksanakan.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan II, diperoleh capaian progres tahapan sebesar 105,17 %, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik dilakukan sesuai *timeline* pendampingan untuk

meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot dan notifikos.

Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh. Pada triwulan II tidak lagi dilaksanakan Bimbingan Teknis secara khusus, namun pelaku UMKM yang baru bergabung tetap memperoleh materi Bimbingan Teknis seperti yang pernah disampaikan dan pelaku UMKM tetap didampingi secara penuh.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 95. Rencana Aksi pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	QDG.001.051	Advokasi dan Pendampingan UMKM	A GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) JATIM	22 kali/trip	1	6	4	4	4	2
			B SiPPOTra (Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional)	10 kali/trip	1	0	2	0	1	0
			C Jatim Glowing	10 kali/trip	1	0	2	0	1	2

Target pendampingan UMKM sesuai DIPA 2023 adalah 98 UMKM yang terdiri dari 77 UMK Pangan Olahan, 8 UMKM Obat Tradisional, dan 13 UMKM Kosmetik. Pada saat pelaksanaan rekrutmen pendampingan UMKM terdapat 243 UMK Pangan Olahan, 27 UMKM Obat Tradisional dan 68 UMKM Kosmetik. Balai Besar POM di Surabaya membuka pendaftaran pendampingan melalui media sosial dan jejaring lintas sektor sehingga banyak pelaku usaha mendaftar secara mandiri maupun diusulkan oleh lintas sektor. Balai Besar POM di Surabaya juga tidak menutup pendaftaran tersebut sepanjang tahun 2023, sehingga dimungkinkan ada penambahan jumlah UMKM yang didampingi hingga akhir tahun 2023.

Dalam rangka pendampingan UMKM, BBPOM di Surabaya membuat inovasi Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing) untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan izin edar produknya. Pada tahun 2022, inovasi Gempur Jatim berhasil meraih Top 45 Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Hal ini menjadikan Gempur Jatim semakin dikenal baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, sehingga semakin banyak pemerintah daerah yang tertarik dan meminta untuk dilaksanakan Gempur Jatim di wilayahnya masing masing.

Selama triwulan II telah dilaksanakan layanan jemput bola ke daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan yang tercakup dalam program Klinik POM. Selain inisiatif dari Balai Besar POM di Surabaya, Klinik POM juga diadakan untuk memenuhi permintaan lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Beberapa permasalahan yang dimiliki pelaku usaha adalah tidak memahami proses penerbitan atau pembaruan NIB menjadi versi RBA, tidak memahami proses penambahan dan/atau perbaikan KBLI, tidak memiliki NPWP atau NPWP berstatus KSWP tidak valid, kesulitan memiliki penanggung jawab teknis yang sesuai, tidak memahami teknologi proses produksi yang tepat. Terkait permasalahan tersebut, Balai Besar POM di Surabaya bekerja sama dengan DPMPSTSP Kabupaten/Kota untuk memudahkan pelaku usaha dalam proses terkait NIB, KKP Kabupaten/Kota terkait pembuatan NPWP dan/atau pembaruan status NPWP, asosiasi profesi terkait penanggung jawab teknis, dan BRIN terkait pendampingan teknologi proses produksi.

Selain permasalahan di atas, banyak pula pelaku UMKM yang tidak memiliki fasilitas perangkat teknologi seperti komputer atau laptop. Sayangnya tidak semua lintas sektor di daerah dapat menyediakan fasilitas tersebut sehingga pembuatan dokumen menjadi terhambat. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang berkomitmen tinggi sehingga dapat melakukan pemenuhan dokumen meskipun tidak memiliki fasilitas perangkat tersebut.

Pada triwulan II juga dilaksanakan pendampingan bersama mahasiswa program PAGC (Pangan Aman Goes To Campus) ke 10 (sepuluh) UMK pangan olahan. Diharapkan dengan terlibatnya mahasiswa program PAGC, pemenuhan dokumen sebagai persyaratan penerbitan PB UMKU Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dapat terlaksana lebih cepat sehingga dapat segera melakukan pendaftaran produk pangan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 96. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	167.598.000	91.575.000	54,64	1105,17	88% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU tidak dilakukan revisi anggaran karena anggaran masih cukup memadai dan target indikator telah tercapai.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 97. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB mulai bertambah dibandingkan sebelumnya 2. UMKM obat tradisional yang memperoleh CPOTB Bertahap masih rendah 3. UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB mulai bertambah dibandingkan sebelumnya 2. UMKM obat tradisional yang memperoleh CPOTB Bertahap mulai bertambah 3. UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB mulai bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB mulai bertambah dibandingkan sebelumnya 2. UMKM obat tradisional yang memperoleh CPOTB Bertahap mulai bertambah 3. UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB mulai bertambah
Rekomendasi Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023"
Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional 2. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha kosmetik 3. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional 2. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha kosmetik 3. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional melalui kegiatan desk CAPA dan registrasi 2. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha kosmetik melalui kegiatan desk CAPA dan registrasi 3. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pangan melalui kegiatan desk IP CPPOB dan registrasi

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB mulai bertambah dibandingkan sebelumnya UMKM obat tradisional yang memperoleh CPOTB Bertahap masih rendah UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya UMKM obat tradisional yang memperoleh CPOTB Bertahap mengalami peningkatan UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB mengalami peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya UMKM obat tradisional yang memperoleh CPOTB Bertahap mengalami peningkatan UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB mengalami peningkatan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi Mei:</p> <ol style="list-style-type: none"> UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB mulai bertambah dibandingkan sebelumnya UMKM obat tradisional yang memperoleh CPOTB Bertahap mulai bertambah UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB mulai bertambah 	<p>Kondisi Juni:</p> <ol style="list-style-type: none"> UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB mulai bertambah dibandingkan sebelumnya UMKM obat tradisional yang memperoleh CPOTB Bertahap mulai bertambah UMKM kosmetik yang memperoleh SPA CPKB mulai bertambah 	
Status	close	close	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target renstra tahun 2024 belum tercapai sehingga diperlukan upaya perbaikan di tahun 2023 ini. Selain itu juga dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator:

- Melakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten melakukan desk sarana dan pendampingan untuk pengajuan melalui aplikasi OSS RBA, aplikasi e-sertifikasi, dan aplikasi e-reg.
- Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP BBPOM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 98. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	93,38	95,24	101,99	Memenuhi ekspektasi
Mei	93,38	94,36	101,05	Memenuhi ekspektasi
Juni	93,38	93,38	100,00	Memenuhi ekspektasi

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Surabaya memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

BBPOM di Surabaya melaksanakan Survei Efektifitas KIE hingga triwulan I tahun 2023 dengan jumlah responden sebanyak 36 orang. Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkrū'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya pada triwulan II tahun 2023 adalah 93,38 dari target 93,38 atau dengan capaian 100,00% yang artinya **sudah mencapai target** yang ditetapkan dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	93,38	93,74	100,39	Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	93,38	93,38	100,00	Memenuhi ekspektasi

Terdapat sedikit penurunan realisasi dan capaian di triwulan II dibandingkan triwulan I. Hal ini menjadi perhatian agar tetap melakukan upaya peningkatan efektifitas KIE di triwulan 3 dan 4 agar target dapat tetap tercapai. Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I dan triwulan II tahun 2023 telah memenuhi target dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 100. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38	93,38	100,00	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 **sudah mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2023 tetap dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil survey pada triwulan II tahun 2023, capaian yang diperoleh sesuai dengan target. Hal-hal yang mempengaruhi capaian target:

- Perencanaan konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang terstruktur, sistematis, dan menarik.

Perencanaan ini termasuk pemilihan media yang diminati dan yang sesuai untuk seluruh segmen masyarakat (seperti usia, domisili perkotaan/pedesaan, tren terkini, dll), baik menggunakan media langsung. media non elektronik, maupun media elektronik.

- Perencanaan kegiatan yang mencakup frekuensi, perluasan, dan pemerataan target KIE/sosialisasi/penyebaran informasi ke seluruh daerah.

Perencanaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan di satu daerah, tetapi dilakukan pemerataan ke seluruh wilayah dengan berbagai ragam media KIE yang digunakan.

- Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memanfaatkan konten informasi yang dimiliki BBPOM di Surabaya untuk digunakan dan disebarluaskan melalui platform milik pemerintah daerah.
 - Melakukan kajian dan telaah secara kontinu dengan melakukan pengamatan minat masyarakat terkini yang paling efektif dalam menerima informasi sehingga BBPOM di Surabaya terus melakukan perbaikan.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 101. Rencana Akis pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI		
					T	R	T	R	T	R	
17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	QDC.001.051	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	F Penyuluhan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan	16	kegiatan	0	4	0	5	0	0
			G Sosialisasi Keamanan dan Penandaan Obat dan Makanan	16	kegiatan	0	0	0	7	0	6
			H KIE Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Label Obat Tradisional	14	kegiatan	0	0	0	0	0	0
			I Pemberdayaan Masyarakat Tentang Keamanan dan Manfaat Obat Tradisional	14	kegiatan	7	0	0	0	7	0
			J KIE Informasi Obat dan Makanan Melalui Website BPOM dan Aplikasi BPOM Mobile	14	kegiatan	0	0	0	0	0	0
			K Pemberdayaan Masyarakat tentang Keamanan, Mutu, dan Penandaan Obat	14	kegiatan	0	0	0	0	0	0
			L Sosialisasi Konsumen Cerdas Tolak Penyalahgunaan Obat	12	kegiatan	0	0	0	0	0	0
			M KIE Cerdas Memilih Kosmetika yang Aman dan Bermanfaat	12	kegiatan	0	0	0	0	0	0
			N Edukasi Konsumen tentang Bahan Berbahaya pada Pangan dan Kemasan Pangan	8	kegiatan	0	0	0	0	0	0
			O KIE Pengawasan Bahan Berbahaya Pada Produk Kosmetik	8	kegiatan	0	1	0	0	0	0

Untuk mencapai target Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, salah satu kegiatan yang mendukung yaitu dilakukannya kegiatan KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI dimana pada triwulan II terlaksana sebanyak 12 titik yaitu di Surabaya, Banyuwangi, Situbondo, dan Bojonegoro dengan total peserta sekitar 10.908 orang yang terdiri dari Masyarakat Umum (PKK, Dharmawanita, Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna), Produsen/ IRTP/ UMKM termasuk pedagang kaki lima, ritel, Lintas sektor (Petugas Kelurahan, Kecamatan, DPRD).

Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE antara lain kegiatan Cangkruan yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting, kegiatan pameran, sosialisai Klinik POM, pameran, dan laboratorium keliling. Selama triwulan II tahun 2023, total telah dilakukan intervensi kepada 298 orang peserta.

Selain itu, kegiatan lain yang dioptimalkan juga untuk penyebaran informasi tentang Badan POM dan informasi Obat dan Makanan adalah pada kegiatan sebagai narasumber yang

diselenggarakan lintas sektor, yaitu terdapat 16 permintaan sebagai narasumber dari berbagai daerah.

KIE melalui media sosial dan media elektronik juga dilakukan secara konsisten setiap hari (untuk media sosial) dan setiap bulan (untuk media elektronik) untuk menunjukkan eksistensi BPOM di masyarakat dan pemangku kepentingan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 102. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	4.690.251.715	4.690.251.715	100,00	100,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan blokir anggaran KIE sebanyak 60 titik senilai 8.878.200.000, selain itu juga telah dilakukan revisi penambahan kegiatan baru yaitu Konsultasi Publik Standar Pelayanan di BBPOM Surabaya. Pada triwulan II tahun 2023 telah dilakukan revisi penambahan kegiatan baru yaitu Koordinasi Pembentukan SAKA POM Pramuka.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 103. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Pelaksanaan KIE tatap muka tidak banyak dilakukan karena terpotong libur nasional Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	Terdapat informasi salah satu tomas tidak melaksanakan kegiatan KIE tatap muka di semester 1	Kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan pada Semester I
Rekomendasi Perbaikan	Mengintesifkan sosialisasi dan publikasi melalui media elektronik	Mengkomunikasikan kembali dengan TA dan mendorong tetap ada kegiatan yang dilaksanakan di semester 1	Menjadwalkan KIE yang belum terlaksana agar tidak menumpuk di akhir tahun
Rencana Aksi	Publikasi yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri	- komunikasi aktif dengan TA - melaporkan kondisi ini ke Biro RenKeu	Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Tomas untuk menjadwalkan pelaksanaan KIE pada Semester II
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	Target semester 1 dapat tidak tercapai	KIE tidak dapat dilaksanakan sesuai target Semester I
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : Pelaksanaan KIE tatap muka dilaksanakan kembali	Kondisi Juni : KIE dapat dilaksanakan sesuai target semester 1	Tokoh Masyarakat Anggota DPR Komisi IX memiliki kesibukan yang sangat padat sehingga belum dapat melaksanakan KIE
Status	close	Open	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2022 adalah 92,92 sesuai target pada tahun 2022. Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu terdapat penambahan titik pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat dan penambahan jumlah peserta tiap titik dari 250 orang per titik menjadi 500 orang per titik. Penambahan jumlah peserta ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil survey efektifitas KIE. Dalam laporan interim triwulan I tahun 2023, diperoleh hasil Tingkat Efektifitas KIE telah melampaui target. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, konsistensi, dan ragam kegiatan KIE yang dilakukan.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 104. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	32,1	28,66	89,28	Belum memenuhi ekspektasi
Mei	39,6	43	108,58	Memenuhi ekspektasi
Juni	47,1	62,2	132,06	Tidak Dapat Disimpulkan

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang

baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Lamongan. Target tahun 2023 adalah 36 sekolah baru dan 76 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020, 2021 dan 2022.

Hingga akhir triwulan II tahun 2023, progres program PJAS yang telah dilaksanakan adalah audiensi dan advokasi terhadap 6 (enam) Kabupaten/Kota yang menjadi target intervensi yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Jombang. Tahapan selanjutnya yaitu Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk kader keamanan pangan sekolah dengan realisasi sampai akhir triwulan II tahun 2023 telah dilakukan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah terhadap 30 sekolah dari target 36 sekolah. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan kepada 171 sekolah dari target 176 sekolah, pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan terhadap 36 sekolah target intervensi serta kegiatan pengawalan terhadap sekolah yang sudah di intervensi kegiatan PJAS tahun sebelumnya. Capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman melebihi target yang ditetapkan yaitu 132,06%, dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**. Hal ini dikarenakan sudah terlaksananya kegiatan yang penetapan targetnya bukan pada triwulan I dan II yaitu tahapan kegiatan pengawalan terhadap sekolah yang sudah diintervensi pada tahun sebelumnya.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	17,1	22,82	133,48	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	47,1	62,2	132,06	Tidak Dapat Disimpulkan

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yang hanya 22,82% maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian triwulan II sangat dipengaruhi oleh ketersediaan waktu para Kepala Daerah menerima Tim Audiensi BBPOM Surabaya, sehingga kegiatan tahapan selanjutnya yaitu advokasi, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan Teknis Kader dan pemberian Paket Produk Informasi Keamanan Pangan terhadap sekolah target intervensi dapat dilaksanakan. Kendala audiensi dengan Kepala

Daerah karena beberapa Kepala Daerah mempunyai agenda yang sangat padat sehingga BBPOM Surabaya menemui kesulitan mendapatkan alokasi waktu untuk melakukan audiensi.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II tahun 2023 Dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100%	62,2	62,2	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan II tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang

telah didahului dengan survey pasar. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 36 sekolah target intervensi tahun 2023. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Dalam rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan Rapid Test Kit Bahan Berbahaya.

Pada triwulan III tahun 2023 juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 106. Rencana Aksi Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	QDB.001.051	Koordinasi lintas sektor	A Koordinasi ke Kab/Kota Dalam Rangka Keamanan Pangan	94 kali/trip	33	0	7	0	5	0
	QDB.001.052	Intervensi keamanan PJAS	A Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	6 kali/trip	0	1	3	1	3	3
			B Pemeriksaan Keamanan PJAS	36 sekolah	0	0	0	0	0	0
			C Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	32 kali/trip	0	0	0	0	0	0
		D Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)	1 kegiatan	0	0	1	0	0	0	

Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Sampai triwulan II tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, sosialisasi keamanan pangan, pemberian paket produk informasi dan pengawasan sekolah yang telah diintervensi tahun sebelumnya .

Tahapan Kegiatan advokasi telah dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten/kota target intervensi. Tahapan selanjutnya yaitu pembentukan Kader Keamanan Pangan Sekolah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk sekolah target intervensi 2023. Kegiatan Bimtek Kader dan sosialisasi keamanan pangan telah dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang. Kegiatan Bimtek Kader dan sosialisasi di Kota Kediri belum dapat dilaksanakan karena tahapan intervensi dan jumlah sekolah harus disesuaikan dengan permintaan khusus dari Walikota Kediri dimana beliau meminta agar semua sekolah di Kota Kediri mendapatkan intervensi kegiatan PJAS. Sesuai keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Kediri bersama dengan BBPOM di Surabaya dan Loka POM di Kabupaten Kediri pada kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu tanggal 17 April 2023, maka sekolah yang akan mendapatkan intervensi adalah 170 sekolah dari jenjang SD dan SLTP. Sampai Bulan Juni 2023, Dinas Pendidikan belum dapat memberikan usulan daftar sekolah dan tanggal kegiatan Bimtek, sehingga kegiatan masih belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan

informasi hal ini dikarenakan adanya pergantian pimpinan di Kota Kediri, sehingga kegiatan perlu dilaporkan dan di telaah kembali oleh Pemkot. Agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai pedoman, maka upaya yang telah dilakukan adalah mengintensifkan terus komunikasi aktif dan koordinasi dengan Pemkot Kediri melalui pejabat OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Kediri yang hadir pada kegiatan audiensi dan advokasi. Pejabat OPD terkait diharapkan dapat segera melaporkan rencana kegiatan kepada pimpinan OPD yang baru sehingga kegiatan mendapat dukungan penuh dan agenda kegiatan dapat segera terlaksana dengan baik.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 107. Efisiensi Anggaran Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	304.170.000	273.262.044	89,94	132,06	92% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien**. Capaian indikator terlalu tinggi melebihi 120% karena pengawalan sekolah yang telah diintervensi tahun sebelumnya dilaksanakan sebelum perencanaan yang telah ditetapkan. Revisi anggaran dalam triwulan II tahun 2023 antara lain pengurangan biaya perjalanan dinas pada kegiatan bimtek PJAS, pengurangan biaya perjalanan dinas pada kegiatan Pemeriksaan Keamanan PJAS, pergeseran anggaran satu kegiatan paket meeting luar kota (paket fullday, UH fullday, dan transport peserta) ke anggaran paket meeting kegiatan bimtek PJAS.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 108. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	- Permintaan khusus dari Walikota Kediri untuk melakukan intervensi ke seluruh sekolah di Kota Kediri - terdapat dua kab/kota yang belum dilakukan audiensi	Audiensi belum dilaksanakan di 2 kab/kota, dan advokasi belum dilaksanakan di 3 kab/kota. Hal ini mengakibatkan tahapan kegiatan terhambat. Adanya pergantian pimpinan di Kota Kediri, sehingga kegiatan perlu direviu kembali bersama pemda	Data Sekolah peserta Bimtek PJAS belum diperoleh dari Dinas Pendidikan sehingga kegiatan Bimtek PJAS belum dapat dilaksanakan
Rekomendasi Perbaikan	Mengintensifkan komunikasi aktif dengan beberapa PIC di kab/kota untuk kegiatan audiensi	- Mengintensifkan komunikasi dengan pemda kabupaten/kota target intervensi yang belum terlaksana kegiatan audiensi dan advokasi	Mengintensifkan kembali komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Keterangan	April	Mei	Juni
		- Komunikasi aktif dengan Pemkot Kediri dan pejabat baru tentang rekomendasi kegiatan advokasi	
Rencana Aksi	Koordinasi dengan Pemkot Kediri untuk teknis pelaksanaan kegiatan PJAS di Kota Kediri	- Koordinasi dengan OPD dan ajudan di masing2 Pemda - Pertemuan/koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kediri	-Komunikasi dengan Plt Kepala Diknas yang hadir saat kegiatan audiensi dan advokasi melalui WA, telp dan surat - Komunikasi dengan Dinkes agar dibantu untuk pemilihan sekolah peserta Bimtek Tahap I
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Target dapat tidak tercapai - Kegiatan audiensi dan advokasi belum bisa tercapai sesuai timeline target	Target tidak tercapai	Target tidak tercapai
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : Seluruh kab/kota sudah audiensi dan advokasi	Kondisi Juni : segera melaksanakan tahapan berikutnya	Kondisi Juli : Diknas siap untuk segera menindaklanjuti
Status	close	Close	Close
Timline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target telah tercapai 100% namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. IKU ini bersifat jumlah kumulatif setiap tahun dan baru terealisasi di akhir tahun. Berdasarkan laporan kinerja interim diketahui bahwa capaian triwulan I dan II melebihi 120% (tidak dapat disimpulkan), oleh karena itu akan segera diusulkan perubahan target bulanan dari bulan Juli hingga Desember 2023.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 109. Jumlah desa pangan aman triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	31,7	31,67	99,89	belum memenuhi ekspektasi
Mei	35	48,33	138,10	Tidak dapat disimpulkan
Juni	42,8	61,67	144,08	Tidak dapat disimpulkan

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemandirian pangan (desa baru) meliputi tahapan : advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan

keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain : desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Capaian jumlah desa pangan aman hingga Triwulan II sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 144,09%, dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 110 .Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan aman triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	20%	26,67	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	42,8	61,67	144,08	Tidak dapat disimpulkan

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yang hanya 26,67% maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian triwulan II sangat dipengaruhi oleh ketersediaan waktu para Kepala Daerah menerima Tim Audiensi BBPOM Surabaya, sehingga kegiatan tahapan selanjutnya yaitu advokasi, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan Teknis Kader dan pemberian Paket Produk Informasi Keamanan Pangan terhadap sekolah target intervensi dapat dilaksanakan. Kendala audiensi dengan Kepala Daerah karena beberapa Kepala Daerah mempunyai agenda yang sangat padat sehingga BBPOM Surabaya menemui kesulitan mendapatkan alokasi waktu untuk melakukan audiensi.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 111. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	100	61,67	61,67	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah desa pangan aman triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan

dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Hingga akhir triwulan II tahun 2023, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Audiensi dan advokasi terhadap 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Jombang.
 - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo
 - Pengadaan paket informasi
 - Bimtek komunitas desa, fasilitasi keamanan pangan terhadap komunitas dan
 - intensifikasi keamanan pangan di 3 (tiga) desa/kelurahan yaitu Desa Gunung Maddah Kabupaten Sampang, Kelurahan Kapasari dan Kelurahan Mojo Kota Surabaya
 - Pengawasan terhadap desa yang diintervensi tahun sebelumnya.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 112. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah desa pangan aman

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI		
					T	R	T	R	T	R	
19 Jumlah desa pangan aman	QDB.002.051	Perkuatan kapasitas desa	A Advokasi Kegiatan Terpadu Program Desa, Sekolah dan Pasar	6	kab/kota	3	3	0	3	0	0
			A Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	6	kegiatan	1	1	1	1	3	2
	QDB.002.052	Pemberdayaan komunitas desa	B Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa	9	kegiatan	0	0	0	1	3	2
			A Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui kegiatan Mobling	18	desa	0	0	0	1	3	2
	QDB.002.053	Pengawasan keamanan pangan desa	A Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman	18	desa	0	0	0	1	3	2
			B Pengawasan di Desa yang sudah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0
			C PELATIHAN FASILITATOR UPT BPOM PENYULUH KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PENERAPAN CPPOB/HACCP di UMKM	1	kali/trip	0	0	0	0	1	0
	QDB.002.054	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A								
			B								

Pelaksanaan advokasi program desa dilakukan bersamaan dengan advokasi sekolah dan pasar sehingga mengefisienkan biaya pelaksanaan kegiatan.

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 113. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 20212	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah desa pangan aman	606.299.000	380.898.952	62,82	144,09	84% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator melebihi 120% sedangkan realisasi anggaran sangat rendah. Hal ini terjadi karena hingga triwulan II terdapat efisiensi anggaran pada pelaksanaan advokasi yang dilaksanakan bersamaan untuk program desa, sekolah dan

pasar. Telah dilakukan revisi anggaran dalam triwulan II tahun 2023 antara lain Penambahan biaya perjalanan dinas kegiatan advokasi dengan mengurangi perjadin kegiatan intensifikasi pengawasan keamanan pangan desa, pergeseran anggaran perjalanan dinas pada kegiatan Pelatihan KKPD, pengurangan anggaran Jasa penyelenggaraan kegiatan Gebyar Keamanan Pangan untuk anggaran dekorasi, pengurangan anggaran perjalanan dinas kegiatan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui kegiatan Mobling untuk dialihkan ke anggaran perjadin Pelatihan KKPD, revisi pagu minus anggaran transport peserta kab/kota yang diambil dari anggaran transport narasumber kab/kota pada kegiatan Advokasi Kegiatan Terpadu Program Desa, Sekolah dan Pasar.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 114. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Terdapat dua kab/kota yang belum dilakukan audiensi	Pengumpulan data komunitas yang berubah-ubah di Kabupaten Sampang yang dapat menghambat tahapan kegiatan	- Sebelum pelaksanaan keg Bimtek, Desa tidak segera menyerahkan data calon kader peserta Bimtek -Pemilihan komunitas pelaku usahan pangan di kelurahan Mojo Kota Surabaya tidak sesuai dan adanya peserta yang tidak bisa hadir
Rekomendasi Perbaikan	Mengintensifkan komunikasi dengan pemda yang belum audiensi dan advokasi	Mendorong perangkat desa dan kader desa untuk memfinalkan data komunitas yang akan diintervensi	- Mendorong perangkat desa untuk segera menyiapkan daftar peserta calon kader - Mengganti nama komunitas yang diundang
Rencana Aksi	koordinasi dengan OPD dan ajudan di masing2 Pemda	Komunikasi aktif dengan perangkat desa dan kader Kab Sampang	Komunikasi dan koordinasi lebih aktif dengan Dinas Kesehatan dan desa
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Target tidak tercapai	Belum ada data yang final	- Komposisi Data Kader tidak sesuai dan bahkan ada yang belum lengkap - Mencari pengganti nama komunitas yang tidak bisa hadir dan tidak sesuai dengan kriteria komunitasnya
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : semua lokus sudah audiensi dan advokasi	Kondisi Juni : data sudah final, sudah dilakukan bimtek komunitas dan fasilitasi	data Kader dan komunitas sudah diserahkan sebelum kegiatan dan dapat di cek terlebih dahulu kesesuaian dengan kriteria juknis
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target telah tercapai 100% namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. IKU ini bersifat jumlah kumulatif setiap tahun dan baru terealisasi di akhir tahun. Berdasarkan laporan kinerja interim, diperoleh informasi bahwa capaian triwulan I dan II melebihi 120% (tidak dapat disimpulkan), sehingga akan diusulkan perubahan target bulanan dari bulan Juli hingga Desember 2023.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 115. Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	41,1%	31,25%	76,03%	tidak memenuhi ekspektasi
Mei	52,9%	52,92%	100,03%	Memenuhi ekspektasi
Juni	59,5%	61,25%	102,94%	Memenuhi ekspektasi

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga akhir triwulan II Tahun 2023 adalah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 102,94%, dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 116 .Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	13,3	18,33	137,82	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	59,5	61,25	102,94	Memenuhi ekspektasi

Realisasi triwulan II meningkat dibandingkan triwulan I, sedangkan capaian triwulan II menurun dibandingkan triwulan I. meskipun terjadi penurunan capaian, namun target masih tercapai dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023**

Tabel 117. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan II tahun 2023 Dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100%	61,25	61,25	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektas, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode tahun 2023.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Hingga akhir triwulan II tahun 2023, progres program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah audiensi dan advokasi, survey pasar dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelola pasar di 6 (enam) Kabupaten/Kota yang menjadi target intervensi yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Jombang. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan dan Kota Probolinggo sebagai bentuk pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi tahun sebelumnya serta kegiatan monitoring dan evaluasi tahap I di 3 (tiga) kabupaten kota target diintervensi tahun 2023 yaitu pasar di Kabupaten Sampang, Kota Surabaya dan Kota Kediri..

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 118. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI		
					T	R	T	R	T	R	
20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	QDB.003.052 QDB.003.053	Pengadaan peralatan pendukung Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/ bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A TEST KIT PASAR	6	paket	0	6	0	0	0	0
			A Survey Pasar	6	kali/trip	0	1	0	2	0	1
			B Penyuluhan Pedagang Pasar	6	kegiatan	0	0	0	0	2	0
			C Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya	6	kegiatan	4	2	2	1	0	3
			D Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	6	kali/trip	0	0	0	0	2	0
	E Pelatihan Fasilitator Pasar	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0		
	QDB.003.054	Pemantauan dan evaluasi	A Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar	12	pasar	4	3	5	6	0	3

Program intervensi pasar yang telah dilaksanakan adalah adalah audiensi dan advokasi, survey pasar dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelola pasar di 6 (enam) Kabupaten/Kota yang menjadi target intervensi yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Jombang. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan dan Kota Probolinggo sebagai bentuk pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi tahun sebelumnya serta kegiatan monitoring dan evaluasi tahap I di 3 (tiga) kabupaten kota target diintervensi tahun 2023 yaitu pasar di Kabupaten Sampang, Kota Surabaya dan Kota Kediri.

- f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 119. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	387.558.000	191.608.520	49,44	102,94	86% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena realisasi anggaran terlalu kecil dibandingkan capaian indikator. Hal ini terjadi karena di triwulan II terdapat efisiensi anggaran pada pelaksanaan advokasi yang dilaksanakan bersamaan untuk program desa, sekolah dan pasar. Pada triwulan II tahun 2023 telah dilakukan revisi anggaran yaitu pengurangan anggaran pengadaan test kit mikro untuk dialihkan ke anggaran pengadaan test kit pasar intervensi sebelumnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas, pengurangan anggaran perjalanan dinas verifikasi pasar untuk dialihkan ke perjalanan dinas kegiatan Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 120. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Tahapan kegiatan terhambat karena terdapat 4 kab/kota yang belum kegiatan advokasi	- Adanya permasalahan di aplikasi pelaporan Sipaman, karena aplikasi baru sehingga masih ada perbaikan dan laporan menjadi terhambat. - Hasil uji mikrobiologi belum disimpulkan MS/TMS	Hasil uji mikrobiologi masih belum dapat disimpulkan MS/TMS
Rekomendasi Perbaikan	Mengintensifkan komunikasi dengan pemda yang belum audiensi dan advokasi	- Kendala aplikasi berkoordinasi dengan pusat - PIC Pasar berkoordinasi dengan pusat dan laboratorium untuk menetapkan metode terbaik untuk menyimpulkan hasil uji mikrobiologi	Berkoordinasi lenh lanjut kembali dengan pusat dan laboratorium untuk menetapkan metode terbaik untuk menyimpulkan hasil uji mikrobiologi
Rencana Aksi	koordinasi dengan OPD dan ajudan di masing2 Pemda	- Memantau rekomendasi perbaikan aplikasi Sipaman - diskusi/rapat khusus dengan laboratorium	diskusi/rapat khusus dengan laboratorium
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Target tidak tercapai	- pelaporan belum maksimal - metode yang digunakan belum dapat disimpulkan MS/TMS	Metode yang digunakan belum dapat disimpulkan MS/TMS
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : semua lokus sudah audiensi dan advokasi	Kondisi Juni : - laporan di aplikasi SIPAMAN sesuai timeline - sudah ada diskusi untuk menetapkan metode uji mirkobiologi	Sudah ada diskusi untuk menetapkan metode uji mikrobiologi
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target telah tercapai 100% namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. IKU ini bersifat jumlah kumulatif setiap tahun dan baru terealisasi di akhir tahun. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I dan II, capaian sampai dengan akhir triwulan II adalah 102,94% (memenuhi ekspektasi) sehingga tidak ada pengusulan untuk revisi target bulanan.

SASARAN STRATEGIS 6

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP
BBPOM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 121. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	27	28,88	106,96	Memenuhi ekspektasi
Mei	35	38,26	109,31	Memenuhi ekspektasi
Juni	45	48,27	107,27	Memenuhi ekspektasi

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 48,27% . Dari 1347 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 1659 sampel yang masuk ke laboratorium sebanyak 1206

sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **dias target** yang ditetapkan yaitu sebesar 107,27% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya berbeda dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, hal ini karena diterapkannya system regionalisasi laboratorium, yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan regionalisasi laboratorium.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Tabel 122. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	20	21,49	107,43	Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	45	48,27	107,27	Memenuhi ekspektasi

Realisasi pada triwulan II meningkat, sedangkan capaian triwulan II sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sehingga hal ini menjadi perhatian agar pemenuhan capaian tetap dipertahankan.

c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 123. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	48,27	48,27	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2023 dapat tercapai dengan pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai timeline.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran hingga triwulan II tahun 2023 mencapai target yang ditentukan. Pada triwulan II tahun 2023 seluruh sampel dikerjakan sesuai parameter pada pedoman sampling dan memenuhi waktu timeline.

Persentase realisasi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 48,27%. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **diatas target** yang ditetapkan yaitu 107,27 % dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya berbeda dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, hal ini karena diterapkannya sistem regionalisasi laboratorium, yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan regionalisasi laboratorium.

Sesuai dengan SOP dan pedoman, timeline pengujian sampel adalah 30 hari kerja dan timeline tidak dihitung bila kendala dalam pemenuhan timeline adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode. Meskipun capaian target telah terpenuhi namun terdapat beberapa kendala dalam pengujian diantaranya :

1. Instrumen LC MSMS mengalami kerusakan dan membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk perbaikannya, sehingga sampel regionalisasi yang seharusnya diuji di BBPOM di Surabaya terpaksa dikirim ke BBPOM di Mataram. Permohonan anggaran untuk perbaikan LC MSMS telah disampaikan pada beberapa rapat regionalisasi maupun secara tertulis kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya ditunjuk sebagai Laboratorium Regional, maka dari itu akan mendapatkan transferan alat LC MSMS dari Balai Besar POM di Bandung.
2. Uji kandungan EG DEG tidak hanya pada komoditi obat, namun juga OT-SK dan Pangan menyebabkan antrian penggunaan instrumen GC MS. Sedangkan GC MS yang dimiliki oleh laboratorium BBPOM di Surabaya hanya satu dan telah berusia lebih dari 10 tahun. Perlu adanya peremajaan instrumen GC MS.
3. Terdapat kendala pemenuhan baku pembanding Amfetamin Sulfat dan Barbital yang diperlukan dalam pengujian produk OT-SK karena keterbatasan anggaran, sedangkan baku tersebut tidak tersedia di P3OMN
4. Keterlambatan pengadaan reagen menyebabkan beberapa pengujian terhambat karena reagen telah habis, diperlukan percepatan pengadaan reagen dan media mikro
5. Jumlah SDM di laboratorium semakin berkurang, pada tahun 2023 terdapat 5 orang yang memasuki masa purnabakti dan 1 orang mengajukan MPP, pada tahun 2024 tercatat 3 orang akan memasuki masa pensiun. Perlu dilakukan penataan SDM

mengingat beban laboratorium semakin bertambah dengan adanya regionalisasi laboratorium

Kurang lebih 20% instrumen di laboratorium BBPOM di Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Realisasi anggaran pemeliharaan alat BBPOM di Surabaya meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 anggaran pemeliharaan alat sebesar Rp. 350,500,000,00; tahun 2021 sebesar Rp. 362.406.000,00; dan pada tahun 2022 realisasi anggaran pemeliharaan alat meningkat sebesar 25% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 452.205.000,00. Perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan alat baru dan penambahan anggaran pemeliharaan alat. Selain anggaran pemeliharaan alat, transfer alat dari laboratorium lain serta pemenuhan sarana dan prasarana sebelum alat tersebut ditempatkan di laboratorium juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Antrian penggunaan instrumen juga merupakan salah satu kendala sehingga antrian alat disebabkan oleh :

1. Penggunaan bersama oleh beberapa laboratorium seperti instrumen GC-MS dan LC-MSMS.
2. Jumlah alat yang terbatas dibandingkan dengan jumlah sampel yang diuji, seperti Alat KLT Densitometri.

BBPOM di Surabaya hanya memiliki satu alat KLT Densitometri System, bila alat tersebut rusak atau terdapat sampel kasus maka pengujian sampel obat tradisional, suplemen kesehatan dan kuasi rutin akan terhenti karena menunggu perbaikan atau mengutamakan sampel kasus. Penambahan alat KLT Densitometri System untuk memperpendek antrian penggunaan alat sangat dibutuhkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 124. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A Pengadaan Sampel (acak)	24 kali/trip	2	2	2	1	2	2
	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	1 pkt lelang	0	0	1	0	0	0

Kegiatan yang dilakukan sepanjang triwulan II tahun 2023 adalah pengadaan sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi melalui ecatalog.

Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi,

kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya ditunjuk sebagai Laboratorium Regional dengan anggota antara lain : BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende. Pemilihan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional didasarkan kepada luas bangunan, ketersediaan instrumen, SDM, jumlah industri baik industri farmasi, obat tradisional, kosmetik maupun pangan, jumlah kasus dan masih banyak lagi pertimbangan. Sistem Regionalisasi laboratorium baru ini akan dilaunching pada bulan Juli 2023 dengan 2 laboratorium yang ditunjuk sebagai pilot project. Regionalisasi laboratorium baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan beraneka ragam parameter uji yang dibutuhkan untuk pengawasan obat dan makanan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 125. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	607.188.700	436.675.260	71,92	107,27	92% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU dilakukan revisi pengurangan anggaran reagen untuk dialihkan ke anggaran media mikro.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 126. Tindak lanjut rekoemndasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan alat LC MSMS pada collision ion guide sehingga tidak bisa memperoleh kromatogram - Reagen di laboratorium (methanol, asetonitril, etanol dll) habis - Dengan adanya surat dari Kedeputusan II perihal Pengawasan Cemaran EG-DEG pada kosmetik (sampel pasta gigi), dijadwalkan pengujian dilakukan pada TW 2. Namun lab belum mampu melakukan pengujian karena terkendala pengadaan baku pembanding (Dietilen glikol monoetil eter), baku internal (1,3-propanediol), pelarut (etanol habis), dan verifikasi MA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan alat LC MSMS pada collision ion guide sehingga tidak bisa memperoleh kromatogram. Kerusakan terjadi mulai Bulan Maret 2023, sehingga BIMTEK Pangan dan pengujian sampel berbagai komoditi yang diuji dengan LCMS menjadi terhambat penyelesaiannya. - Reagen di laboratorium (methanol, asetonitril, etanol dll) mengalami keterlambatan pengiriman dari penyedia. - Dalam rangka penunjukan BBPOM di Surabaya sebagai laboratorium Regional, dibutuhkan beberapa anggaran diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Transfer instrumen dari Balai lain, dengan Total anggaran untuk transfer alat kurang lebih 65 juta (belum termasuk transfer microbalance, sedang menunggu penawaran) - Pengadaan pendukung instrumen yang akan ditransfer (Meja lab untuk Ion Chromatography, AC ½ PK untuk ruang sitotoksik Kabinet) - Pengadaan instrumen untuk pemenuhan standard Regionalisasi Laboratorium (sudah mendapatkan rekomendasi pengadaan alat dari P3OMN untuk tahun 2024) - Pengajuan renovasi Gedung Laboratorium untuk penempatan instrumen yang ditransfer (membutuhkan renovasi ruang antara untuk sitotoksik cabinet) - Perawatan Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> - TLC Auto sampler di Lab OT sempat bermasalah karena terjadi kebocoran pada jarum penotolan sampel. - TLC Scanner Densitometri di Lab OT tidak bisa berfungsi sehingga menghambat pekerjaan laboratorium karena sebagian besar identifikasi BKO pada pengujian sampel OT menggunakan Densitometri - dalam rangka regionalisasi lab obat BBPOM di Surabaya akan mendapat transfer kabinet sitotoksik dari Denpasar, namun belum tersedia ruangan yang memenuhi persyaratan - Terdapat 13 sampel kosmetik region Manado yang diujikan di BBPOM Mataram yang sudah dikembalikan ke BBPOM Manado oleh BBPOM Mataram
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> -Meminta provider alat LCMS-MS untuk melakukan perbaikan - Percepatan pengadaan reagen yang kosong dengan anggaran yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> -Provider alat memberikan penawaran perbaikan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 250.000.000,- - Penyedia sudah mengirimkan reagen sejak tanggal 2 Juni 2023 dan saat ini masih dalam perjalanan. Sedangkan untuk reagen Diethyl eter, perkiraan sampai di Indonesia bulan Agustus 2023. - Sudah dikomunikasikan dengan Perencana untuk penambahan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebocoran pada jarum penotol sampel dikarenakan ada tekanan gas yang tidak semestinya namun dapat kendala dapat diatasi dengan bantuan Pak Rizal - Meminta provider alat Scanner Densitometri untuk melakukan pengecekan dan perbaikan -BBPOM Surabaya Sudah bersurat ke BBPOM Manado -- Kerusakan alat LC MSMS pada collision ion guide sehingga tidak bisa memperoleh kromatogram. Kerusakan terjadi mulai Bulan Maret 2023, sehingga BIMTEK Pangan dan pengujian sampel berbagai komoditi yang diuji dengan LCMS menjadi terhambat penyelesaiannya. - menyiapkan anggaran untuk renovasi ruangan dan transfer alat

Keterangan	April	Mei	Juni
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> -Menghubungi teknisi dari provider alat untuk melakukan pengecekan terhadap alat LCMS-MS -Mengadakan reagen yang kosong secara cito dengan anggaran yang ada -Berkoordinasi dengan PPK untuk percepatan pengadaan reagen 	<ul style="list-style-type: none"> -Mengusulkan penambahan anggaran untuk perbaikan alat dan berkomunikasi intens dengan BBPOM Bandung terkait transfer alat LC MSMS -Berkoordinasi dengan PPK untuk percepatan pengadaan reagen - Mengusulkan penambahan anggaran ke Perencana dalam Rangkaian penunjukan BBPOM di Surabaya sebagai laboratorium Regional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghubungi Pak Rizal untuk perbaikan TLC Auto Sampler - Menghubungi teknisi dari provider alat untuk melakukan pengecekan terhadap Scanner Densitometri - Mengusulkan penambahan anggaran untuk perbaikan alat dan berkomunikasi intens dengan BBPOM Bandung terkait transfer alat LC MSMS
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan alat LC MSMS pada collision ion guide sehingga tidak bisa memperoleh kromatogram - Reagen di laboratorium (methanol, asetoneitril, etanol dll) habis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan alat LC MSMS pada collision ion guide sehingga tidak bisa memperoleh kromatogram - Reagen di laboratorium (methanol, asetoneitril, etanol dll) habis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebocoran jarum penotol pada alat TLC Auto Sampler sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan penotolan pada plat KLT - Kerusakan alat Scanner Densitometri sehingga Scanner tidak berfungsi - Kerusakan alat LC MSMS pada collision ion guide sehingga tidak bisa memperoleh kromatogram - menghubungi penyedia renovasi, AHU dan provider alat untuk mendapatkan penawaran anggaran dan mengusulkan anggaran ke Roren
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - LC MSMS masih dalam proses observasi provider - Sebagian reagen datang dengan jumlah yang terbatas karena menggunakan anggaran yang ada, serta dibagi sesuai kebutuhan tiap lab 	<ul style="list-style-type: none"> -Sebagian reagen sudah dipesan dan dalam perjalanan namun dengan jumlah yang terbatas karena menggunakan anggaran yang ada, serta akan dibagi sesuai kebutuhan tiap lab -Telah dilakukan komunikasi dengan vendor untuk reagen Diethyl eter, perkiraan sampai di Indonesia bulan Agustus 2023 - Anggaran untuk transfer alat telah disediakan sebesar 71 juta 	<ul style="list-style-type: none"> -TLC Auto Sampler sudah bisa digunakan secara normal - Scanner Densitometri masih dalam observasi provider
Status	Open	Open	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target telah tercapai, namun dengan adanya penunjukan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional dibutuhkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana seperti penambahan luasan laboratorium, renovasi ruangan, penambahan alat laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Target hingga tahun 2024 tetap sama 100%, sehingga perlu banyak dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium. Pada awal tahun 2023 sudah dilakukan upaya bersurat ke Biro Perencanaan dan Keuangan dan P3OMN untuk penambahan anggaran pembelian alat laboratorium, namun jawaban yang diperoleh hanyalah persetujuan pengadaan alat laboratorium namun tidak ada penambahan anggaran. Untuk pemenuhan regionalisasi laboratorium, juga telah

diusulkan permintaan penambahan anggaran untuk perbaikan alat laboratorium yang sedang rusak sedangkan DIPA yang tersedia tidak mencukupi.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 127. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	30	32,34	107,80	Memenuhi ekspektasi
Mei	38	42,49	111,82	Memenuhi ekspektasi
Juni	45	49,64	110,31	Memenuhi ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). BBPOM di Surabaya termasuk laboratorium regional VII dengan koordinator BBPOM di Denpasar.

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan II tahun 2023 adalah 49,64%. Dari 589 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa dan dari 790 sampel yang masuk laboratorium

sebanyak 540 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 110,31% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya**

Tabel 128 .Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	20	23,94	119,72	Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	45	49,64	110,31	Memenuhi ekspektasi

Realisasi triwulan II meningkat, sedangkan capaian triwulan II tahun 2023 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan agar pelaksanaan pengujian tidak melewati timeline, dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023**

Tabel 129. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	49,64	49,64	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2023 dapat tercapai.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium telah diuji sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling dan timeline (100%). Timeline pengujian sampel sesuai dengan SOP dan pedoman adalah 30 hari kerja. Timeline tidak dihitung bila kendala dalam pemenuhan timeline adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode. Perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan alat baru dan penambahan anggaran pemeliharaan alat hal ini karena kurang lebih 20% instrumen di laboratorium BBPOM di Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Salah satu alat di laboratorium Pangan dan Air yang

mengalami rusak berat adalah Nitrogen evaporator yang merupakan alat penunjang dalam pengujian kloramfenikol dan nitrofurantoin (parameter baru tahun 2023) yang merupakan parameter spesifik yang diuji BBPOM di Surabaya dalam rangka regionalisasi laboratorium. Alat tersebut hanya ada satu dan kondisinya sudah kurang dari 50% bagian yang dapat digunakan, perlu segera dilakukan pengadaan alat baru untuk mengantisipasi jumlah parameter regionalisasi yang menggunakan alat tersebut pada tahun 2023 yang semakin bertambah.

Antrian penggunaan instrumen juga merupakan salah satu kendala sehingga pengujian sampel melebihi 30 hari kerja, dengan adanya regionalisasi laboratorium yang merupakan sistem pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian Laboratorium pangan dan air BBPOM di Surabaya mendapatkan tugas untuk menguji parameter asetaldehid pada kemasan menggunakan GC MS dan uji residu kloramfenikol menggunakan LC MSMS. Kedua alat ini merupakan alat yang digunakan bersama antara laboratorium Pangan, Obat, Obat Tradisional-Suplemen Makanan dan Kosmetik.

Parameter - parameter baru yang diuji dalam rangka regionalisasi laboratorium juga menyebabkan pengujian mengalami kesulitan dalam mendapatkan kondisi yang optimal. Selain kesulitan uji terkait metode baru, beberapa instruksi pusat untuk menguji komoditi terkait isu yang sedang berkembang di masyarakat juga cukup berpengaruh terhadap kelangsungan pengujian, seperti misalnya pengujian BPA pada AMDK serta pengujian cemaran EG DEG yang beberapa kali dilakukan dan dibutuhkan hasil segera.

Kendala yang dialami laboratorium pangan selama Triwulan II diantaranya kerusakan alat LC MSMS yang digunakan untuk pengujian kloramfenikol dan nitrofurantoin. Adanya kerusakan tersebut menyebabkan tertundanya kegiatan pelatihan internal yang telah dijadwalkan. Perbaikan LC MSMS membutuhkan anggaran yang cukup besar dan belum dimiliki oleh Balai Besar POM di Surabaya, saat ini upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengusulkan anggaran perbaikan ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta mengupayakan transfer alat LC MSMS dari Balai Besar POM di Bandung segera terealisasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 130. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1 pkt lelang	0	0	1	0	0	0
	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A Pengadaan Sampel (acak)	8 kali/trip	1	1	0	0	1	1

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sampling dan pengujian sampel makanan, selain itu juga sedang dilaksanakan proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi secara ecatalog.

Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya ditunjuk sebagai Laboratorium Regional dengan anggota antara lain : BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende. Pemilihan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional didasarkan kepada luas bangunan, ketersediaan instrumen, SDM, jumlah industri baik industri farmasi, obat tradisional, kosmetik maupun pangan, jumlah kasus dan masih banyak lagi pertimbangan. Sistem Regionalisasi laboratorium baru ini akan dilaunching pada bulan Juli 2023 dengan 2 laboratorium yang ditunjuk sebagai pilot project. Regionalisasi laboratorium baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan beraneka ragam parameter uji yang dibutuhkan untuk pengawasan obat dan makanan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 131. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	391.738.300	68.443.648	17,47	110,31	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena realisasi anggaran terlalu rendah jika dibandingkan dengan capaian indikator. Hal ini disebabkan proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi yang masih berlangsung dan belum ada pembayaran. Selama triwulan II tahun 2023 terdapat revisi penambahan penambahan biaya pembelian sampel makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 132. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	- beberapa reagen yang diperlukan oleh laboratorium habis - jumlah sampel fortifikasi (tepung) meningkat sehingga kebutuhan reagen (IAC) yang relatif mahal meningkat - Baku pembanding DON belum tersedia di infalab sehingga dilakukan pengadaan mandiri dengan keterbatasan anggaran	- alat microwave mengalami kerusakan sehingga harus meminjam microwave lab kosmetik, diketahui kerusakan pada grounding dan UPS	- 2 Unit KCKT Lab Pangan mengalami kerusakan - Komputer Spektrofotometer mengalami kerusakan, tidak bisa connect dengan instrumen - Kurangnya SDM di lab Pangan karena penguji yang pensiun
Rekomendasi Perbaikan	- pengadaan reagen dan baku pembanding	- memanggil provider alat untuk perbaikan microwave - pengusulan pengadaan UPS	- memanggil provider alat untuk perbaikan KCKT - memanggil provider alat untuk perbaikan Spektrofotometri - mengusulkan penambahan staf lab pangan
Rencana Aksi	- melakukan revisi anggaran dan berkomunikasi dengan PPKagora pengadaan reagen dipercepat	- memanggil provider alat untuk perbaikan - pengusulan anggaran untuk pengadaan UPS	- memanggil provider alat untuk perbaikan KCKT - memanggil provider alat untuk perbaikan Spektrofotometri - mengusulkan penambahan staf lab pangan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- penyelesaian sampel terhambat	pengujian logam yang menggunakan microwave terhambat	pengujian sampel terhambat
Kondisi Setelah Rencana Aksi	pengujian sampel fortifikasi telah terselesaikan	- telah dilakukan revisi anggaran untuk pengadaan UPS microwave lab pangan	-
Status	Open	Open	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target tidak tercapai, dikarenakan masih ada pengujian sampel yang melewati timeline karena belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana seperti alat laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Target hingga tahun 2024 tetap sama 100%, sehingga perlu banyak dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target telah tercapai, namun dengan adanya penunjukan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional dibutuhkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana seperti penambahan luasan laboratorium, renovasi ruangan, penambahan alat laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Pada awal tahun 2023 sudah dilakukan upaya bersurat ke Biro Perencanaan dan Keuangan dan P3OMN untuk penambahan anggaran pembelian alat laboratorium, namun jawaban yang diperoleh hanyalah persetujuan pengadaan alat laboratorium namun tidak ada penambahan anggaran. Untuk pemenuhan regionalisasi

laboratorium, juga telah diusulkan permintaan penambahan anggaran untuk perbaikan alat laboratorium yang sedang rusak sedangkan DIPA yang tersedia tidak mencukupi.

SASARAN STRATEGIS 7
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN
KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP
BBPOM DI SURABAYA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 133. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	14,3	28,85	201,72	Tidak dapat disimpulkan
Mei	18,5	30,42	164,41	Tidak dapat disimpulkan
Juni	26,5	38,14	143,92	Tidak dapat disimpulkan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik

menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2023 adalah 38,14 dari target 26,52. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2023 **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 143,82% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya**

Tabel 134 .Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	12,1	21,67	179,06	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II	26,5	38,14	143,92	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat kenaikan realisasi dan penurunan capaian triwulan II jika dibandingkan dengan triwulan I. Meskipun demikian, capaian indikator ini telah tercapai jauh melebihi target triwulan yang ditetapkan di awal tahun. Hal ini didukung oleh terselesaikannya target 8 perkara dari 9 perkara dalam 1 tahun.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023**

Tabel 135. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72	38,14	52,97	tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi

ekspektasi. Diperlukan upaya perbaikan secara masif dan berkesinambungan pada triwulan-triwulan berikutnya agar target Tahun 2023 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023 telah mencapai bahkan melebihi target triwulan.

Pencapaian target realisasi tersebut karena telah tercapai 8 perkara dari 9 target perkara untuk tahun 2023 dan terdapat penyelesaian perkara carry over sebanyak 7 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebanyak 6 perkara
- Tahap 1 (Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum) sebanyak 2 perkara
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) perkara carry over tahun 2022 sebanyak 3 perkara
- Dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan) terhadap 4 perkara carry over dengan rincian perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara dan perkara tahun 2020 sebanyak 3 perkara karena tidak cukup alat bukti

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber dan onsite. Berdasarkan hasil pendalaman informasi tersebut maka pada triwulan II tahun 2023 telah dilakukan operasi penindakan antara lain pada bulan April terhadap 4 sarana distribusi obat tradisional yang berada di Surabaya dan Kab. Gresik, pada bulan Juni 2023 dilakukan operasi penindakan terhadap 1 sarana distribusi obat tradisional di Kab. Nganjuk.
- Membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat segera setelah dilakukan penyitaan barang bukti oleh penyidik.
- Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan, antara lain terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka tindak lanjut surat P17 dan pemenuhan P19 serta terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2).
- Pada bulan April 2023 telah diterima surat P17 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk perkara mengedarkan kosmetika tanpa izin edar di Kab.Lamongan. Melakukan koordinasi

dengan polsek Mulyorejo terkait persetujuan penggeledahan barang bukti perkara obat tradisional dengan locus di Surabaya.

- Pada bulan Mei 2023 melakukan koordinasi dengan Polsek Bugul Kidul-Kota Pasuruan dan Polres Probolinggo terkait peredaran Obat-Obat Tertentu yang dikirim melalui ekspedisi, koordinasi ke Pengadilan Negeri Gresik terkait persetujuan penyitaan barang bukti perkara obat tradisional dengan locus di Kab. Gresik karena permohonan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Gresik sudah menggunakan aplikasi E-Berpadu namun masih diminta hard copy berkas, koordinasi dengan ahli bahasa yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya terkait rencana pemeriksaan tersangka WNA.
- Pada bulan Juni 2023 melakukan pengiriman surat pemberitahuan penetapan tersangka (sarana importir kosmetika dan pangan), pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan) perkara dengan locus di Kab.Nganjuk ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur, pengajuan penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri Nganjuk, menghadiri sidang sebagai saksi petugas di Pengadilan Negeri Surabaya untuk perkara pendistribusian obat tradisional TIE dan mengandung Bahan Kimia Obat, penyerahan berkas perkara (tahap I) pendistribusian obat tradisional TIE dan mengandung Bahan Kimia Obat serta perkara pendistribusian kosmetika TIE dan mengandung bahan dilarang dengan locus di Surabaya. Diterima surat tanggapan penetapan tersangka dari Penasihat Hukum PT. OFI (sarana importir kosmetika dan pangan). Diterima pengembalian berkas perkara an. Nasrur Rohman dari Kejati Jawa Timur.
- Dilakukan update peta rawan kasus setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.
- Dilakukan patroli siber setiap bulan untuk mengidentifikasi akun yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down. Selain itu juga dilakukan profiling terhadap akun tertentu untuk dilaporkan ke Direktorat Siber Badan POM RI.

Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yaitu sosialisasi aplikasi dashboard penindakan secara daring yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Penindakan, mengikuti Bimtek Penanganan Pertama BB Elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Siber Badan POM, mengikuti Rapat Koordinasi PPNS yang diselenggarakan oleh Korwas Polda Jawa Timur dan mengikuti Forkom PPNS di Bandung yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan Badan POM, selain itu telah dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk

bahan analisis "Tuntutan dan Putusan Perkara Kosmetika Ilegal" oleh Direktorat Cegah Tangkal Badan POM.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 136. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	AEA.001.052	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A Perencanaan Penyusunan Analisis	2 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			B Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	8 kali/trip	1	0	1	0	1	0
			C FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	2 kali/trip	0	0	0	0	0	0
	AEA.001.053	Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A Rapat Perencanaan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan	1 kali/trip	1	0	0	0	0	0
			B Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	12 bulan	1	1	1	1	1	0
			C Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat	6 kali/trip	1	1	0	1	1	0
			D Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat	2 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			E Penyusunan Laporan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
	AEA.001.054	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A Koordinasi Lintas Sektor Penindakan Obat dan Makanan	4 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			B Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan	1 kali/trip	0	0	0	0	1	0
			C Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			D Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Untuk Penguatan Intelijen di Daerah	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			E Forum Koordinasi Intelijen	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Evaluasi Operasi Siber dan Coaching Clinic	1 kali/trip	0	0	0	0	1	0
			G Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyidik RI	1 kali/trip	0	0	0	0	1	0
			H Pembentukan Petugas Intelijen BPOM	1 kali/trip	0	0	1	0	0	0
			I Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM	1 kali/trip	0	0	0	0	1	0
			J Workshop Intelijen Strategis	1 kali/trip	0	0	1	0	0	0
			K Penanganan Kasus Dengan Mekanisme Ultimum Remedium	8 kali/trip	1	0	0	0	1	0
	QCD.U09.051	Operasi Intelijen	M Pemusnahan Barang Bukti/Barang Rusak	1 paket	0	0	0	0	0	0
			A Sewa Gudang Untuk Barang Bukti	9 paket	0	0	0	0	0	0
	QCD.U09.052	Gelar Kasus dan Pelaporan	A Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	9 perkara	0	4	0	0	5	1
			B Pelaksanaan Operasi Intelijen Obat	9 perkara	1	4	1	0	0	1
C Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			2 kali/trip	0	0	0	0	1	0	
QCD.U09.053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A Gelar Kasus dan Pelaporan	9 perkara	0	0	1	0	1	0	
		A Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	9 perkara	1	0	1	0	1	0	
QCD.U09.054	Operasi Penindakan	A Operasi Penindakan	9 perkara	1	4	1	0	1	1	
		B Penangkapan dan Penahanan	9 perkara	0	0	0	0	1	0	
QCD.U09.055	Pemberkasan	A Pemberkasan	9 perkara	0	1	1	1	1	0	
		B Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	9 perkara	0	0	0	1	3	1	
		C Gelar Perkara	9 perkara	0	0	1	1	1	0	
		D Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	9 perkara	0	0	1	0	1	1	
		E Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	9 perkara	0	0	1	0	1	0	

Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator pada triwulan I dan triwulan II tahun 2023 adalah sewa gudang barang bukti, kegiatan operasi intelijen, gelar kasus dan pelaporan, rapat pembahasan rencana penyidikan, skenario penindakan dan olah TKP, operasi penindakan, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, gelar perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, perencanaan penyusunan analisis, patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan, serta verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan. Selain itu pada triwulan II tahun 2023 juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Balai Bahasa Universitas Negeri Surabaya dalam rangka upaya tindak lanjut dan penyelesaian pemberkasan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 137. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANG2RAN 2022	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	789.897.000	731.695.028	92,63%	143,82%	92% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Selama triwulan II tahun 2023 telah dilakukan revisi anggaran yaitu pengurangan anggaran beberapa kegiatan serta penghapusan kegiatan Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan, untuk dialihkan ke anggaran makan dan snack kegiatan Gelar Perkara. Penambahan biaya sewa kendaraan dan transport, serta pengurangan penginapan kegiatan operasi intelijen. Penambahan anggaran dokumentasi dan transport, serta pengurangan anggaran UH dan penginapan kegiatan Operasi Penindakan. Perubahan volume anggaran komunikasi kegiatan Pemberkasan dari 5 menjadi 8 paket. Pengurangan anggaran makan dan snack kegiatan Gelar Perkara. Biaya pelatihan kegiatan Operasi Penindakan yang diperoleh dengan mengurangi anggaran pembelian perlengkapan Operasi Intelijen, anggaran honor keterangan ahli, anggaran honor Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara, dan anggaran bantuan hukum, serta menghapus anggaran Perlengkapan Operasi Penindakan dan anggaran pengadaan ATK. Penambahan anggaran belanja sewa kendaraan kegiatan Pelaksanaan Operasi Intelijen sebesar 27 juta dari anggaran belanja sewa kendaraan kegiatan Operasi Penindakan. Penambahan anggaran UH dan transport serta pengurangan anggaran penginapan kegiatan Pelaksanaan Operasi Intelijen. Penambahan anggaran perjadin biasa kegiatan Operasi Penindakan untuk perjadin luar kota dan perjadin pelatihan.

Pengurangan anggaran UH dan penginapan serta penambahan anggaran transport kegiatan Pemberkasan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 138. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Diterimanya surat P17 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait perkara LC Beauty di Lamongan - Perencanaan kegiatan penindakan sesuai target perkara tahun 2023 yaitu sebanyak 9 perkara - Penetapan geledah perkara atas nama Shinta Surabaya yang pengajuan permohonan dilakukan oleh Polsek Mulyorejo Surabaya sampai sekarang belum dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 19 perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Gresik yang menggunakan aplikasi Eberpadu, tetapi permintaan Pengadilan Negeri Gresik masih minta berkas berupa hard copy dan adanya perbedaan pemahaman antara pihak PN Gresik dan petugas BBPOM di Surabaya - Penetapan tersangka perkara OFI di Surabaya yang merupakan warga negara asing (Mesir) diperlukan seorang ahli bahasa - Perencanaan kegiatan penindakan sesuai target perkara tahun 2023 yaitu sebanyak 9 perkara - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 19 perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlapor melarikan diri pada saat kegiatan penindakan obat tradisional ilegal di Kab. Nganjuk - Pemilik sarana melarikan diri pada saat dilakukan pemeriksaan sarana di Kab. Gresik - Diterima surat tanggapan penetapan tsk dari sarana importir kosmetika dan pangan (PT. OFI) - Diterima pengembalian berkas perkara an. Nasrur Rohman dari Kejati Jawa Timur - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 15 perkara
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Melakukan operasi penindakan sarana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan - Melakukan koordinasi ke Polsek Mulyorejo Surabaya - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan melakukan pemeriksaan - Melakukan koordinasi ke Polsek Bugul Kidul-Kota Pasuruan dan Polres Probolinggo - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan - Melakukan koordinasi ke Pengadilan Negeri Gresik - Melakukan koordinasi dengan ahli bahasa yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan - Melakukan operasi penindakan di Kab. Nganjuk - Pengiriman surat pemberitahuan penetapan tersangka (sarana importir kosmetika dan pangan) - Pengiriman SPDP perkara Nganjuk ke Kejati Jawa Timur melalui Korwas Polda Jatim - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan - Pengajuan penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri Nganjuk - Menghadiri sidang sebagai saksi petugas di PN Surabaya untuk perkara pendistribusian obat tradisional TIE - Penyerahan berkas perkara pendistribusian obat tradisional ilegal dan perkara pendistribusian kosmetika ilegal di Surabaya
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan

Keterangan	April	Mei	Juni
	<p>Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan operasi penindakan sarana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan - Melakukan koordinasi ke Polsek Mulyorejo Surabaya - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkas 	<p>dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan - Melakukan koordinasi ke Polsek Pasuruan dan Probolinggo - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkas - Melakukan koordinasi ke Pengadilan Negeri Gresik - Melakukan koordinasi dengan ahli bahasa yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya 	<p>Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemanggilan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan - Melakukan operasi penindakan di Kab. Nganjuk - Pengiriman surat pemberitahuan penetapan tersangka (sarana importir kosmetika dan pangan) - Pengiriman SPDP perkara Nganjuk ke Kejati Jawa Timur melalui Korwas Polda Jatim - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkas - Pengajuan penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri Nganjuk - Menghadiri sidang sebagai saksi petugas di PN Surabaya untuk perkara pendistribusian obat tradisional TIE - Penyerahan berkas perkara pendistribusian obat tradisional ilegal dan perkara pendistribusian kosmetika ilegal di Surabaya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Terealisasi 7 perkara dari 9 target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 21 perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Terealisasi 7 perkara dari 9 target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 21 perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Terealisasi 8 perkara dari 9 target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 15 perkara
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pengiriman surat panggilan saksi-saksi atas perkara Shinta Surabaya dan 3 perkara di Gresik atas nama Gudang Mr Jack, Gudang Mr 5758 dan Gudang UD Kharisma 	<p>Kondisi Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan operasi penindakan di Kab. Nganjuk - Telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan penetapan tersangka (sarana importir kosmetika dan pangan) - Telah dilakukan pengiriman SPDP perkara Nganjuk ke Kejati Jawa Timur melalui Korwas Polda Jatim - Telah dilakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkas - Telah dilakukan pengajuan penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri Nganjuk - Telah menghadiri sidang sebagai saksi petugas di PN Surabaya untuk perkara pendistribusian obat tradisional TIE - Telah dilakukan penyerahan berkas perkara pendistribusian obat tradisional ilegal dan perkara pendistribusian kosmetika ilegal di Surabaya 	<p>Kondisi Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> -
Status	Close	Close	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sudah tercapai, namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. Terdapat kendala dalam penyelesaian perkara, sehingga untuk menindaklanjutinya maka dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasian, terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2). Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I, diperoleh informasi bila capaian tidak dapat disimpulkan, begitu pula capaian pada triwulan II, sehingga akan diusulkan perubahan target bulanan dari bulan Juli hingga bulan Desember 2023.

SASARAN STRATEGIS 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup
BBPOM di Surabaya yang optimal

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 139. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang

selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Nilai indeks RB BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023 belum diperoleh menunggu hasil penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP pada akhir tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena menunggu hasil penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP pada akhir tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023

Tabel 140. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7	-	-	-

Realisasi indeks RB BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2023 belum diperoleh karena hasil penilaian oleh APIP baru akan diperoleh di akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2021, BBPOM Surabaya telah berhasil memperoleh predikat WBBM. Namun demikian, tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya untuk mempertahankan predikat WBBM dan upaya mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Pada triwulan I tahun 2023, BBPOM Surabaya telah melakukan evaluasi inovasi yang sudah diterapkan di tahun 2022, dengan hasil mengganti 2 inovasi yang sudah tidak relevan dengan 2 inovasi baru yaitu inovasi Jatim Truly dan inovasi PAMAN. Selain itu

terdapat beberapa pengembangan dari inovasi sebelumnya antara lain pengembangan aplikasi simpelsi (penambahan menu tanda tangan tanda terima tunjangan kinerja), pengembangan aplikasi Teman Odin (menambah fitur notifikasi), dan penyelesaian aplikasi SILASKAR (layanan saksi ahli). Prestasi yang berhasil di raih oleh Agent Of Change adalah penghargaan sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I. Pada awal tahun juga dikembangkan inovasi aplikasi untuk mempermudah pengawasan barang tentengan, namun inovasi ini dibatalkan karena akan ada penyeragaman aplikasi dari pusat. Hasil desk sementara dengan APIP adalah adanya apresiasi karena BBPOM di Surabaya tetap mempertahankan predikat WBBM dengan terus menambah inovasi terutama inovasi layanan terhadap masyarakat. Nilai sementara hasil desk adalah 95,53, namun belum ada nilai resmi dari APIP. Terdapat 1 orang pegawai BBPOM di Surabaya yang mendapat hukuman disiplin pegawai terkait integritas di tahun 2023 yang bisa mempengaruhi penilaian RB BBPOM di Surabaya, sehingga perlu terus dilakukan pengawasan melekat dari ketua tim terhadap anggotanya terutama bila ada indikasi pelanggaran kode etik maupun integritas serta dilakukan pencegahan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 141. Rencana Aksi pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
24 Indeks RB BBPOM di Surabaya	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBBM	6 kegiatan	0	1	2	1	0	1
			C Pemeliharaan dan Peningkatan QMS	3 kegiatan	0	0	0	2	1	1
			K Workshop Penyelenggaraan Kearsipan	1 kali/trip	0	0	0	1	1	0
			M Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan POM	1 kali/trip	0	0	0	0	1	0
	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	E Sosialisasi dan Internalisasi Fraud Control Plan (FCP)	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Koordinasi lintas sektor	8 kali/trip	1	0	0	0	1	0
	EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A Pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	1	1	1	1	1	1
	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan	A Kebersihan dan Keamanan Kantor	1 paket	0	0	0	0	0	0
			B Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1
			D Pengadaan Keperluan Sehari-Hari	12 bulan	1	1	1	1	1	1
			E Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	12 bulan	1	1	1	1	1	1
			F Terselenggaranya Operasional Perkantoran	12 bulan	1	1	1	1	1	1
			G Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	12 bulan	1	1	1	1	1	1
H Pemeliharaan Sarana Gedung			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
I Kesehatan Pegawai			12 bulan	1	1	1	1	1	1	
J Langganan, Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	1	1	1	1	1	1			
EBA.962.051	Layanan Umum UPT	A Pemeriksaan Kesehatan	1 kali/trip	0	0	0	0	1	1	
CAB.002.053	Pengadaan peralatan fasilitas	A Pengadaan Fasilitas Perkantoran	1 paket	1	0	0	0	0	0	

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Indeks RB adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks RB serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selama triwulan II tahun 2023, BBPOM di Surabaya banyak dikunjungi UPT dari seluruh

Indonesia untuk sharing terkait keberhasilan pencapaian predikat WBBM, dari kegiatan tersebut juga telah dilakukan sharing apa saja yang sudah dilakukan di UPT tersebut, sehingga bisa menjadi masukan perbaikan untuk BBPOM di Surabaya. Seluruh rencana aksi RB yang telah direncanakan di triwulan II tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, bahkan terdapat beberapa tambahan inovasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Kegiatan penunjang yang juga dilaksanakan hingga triwulan II tahun 2023 antara lain Pemeliharaan dan Peningkatan QMS, Peningkatan Kompetensi Agent of Change, Pelatihan Lead Auditor, Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBBM, Workshop Penyelenggaraan Kearsipan, dan semua kegiatan operasional perkantoran serta belanja pegawai.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 142. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks RB BBPOM di Surabaya	14.191.285.333	13.444.540.868	94,74	-	-

Efisiensi anggaran pada triwulan II tahun 2023 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Selama triwulan II tahun 2023 terdapat revisi anggaran untuk penyesuaian gaji, penambahan anggaran audit internal di loka, penambahan anggaran pemeliharaan gedung kantor dan langganan air.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 143. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	masih ada beberapa data dukung yang harus dilengkapi sesuai hasil desk ZI	sesuai penilaian APIP terhadap implementasi ZI BBPOM di Surabaya, terdapat 1 aspek yang tidak memenuhi syarat yaitu WBS/pengaduan, dikarenakan terdapat 1 hukuman disiplin pegawai	terdapat permintaan survey indeks persepsi RB yang belum diselesaikan
Rekomendasi Perbaikan	segera melengkapi data dukung ZI	Memberikan himbauan agar seluruh ketua tim lebih intensif membina anggota tim supaya selalu mematuhi kode etik dan disiplin pegawai	survey dipelajari dulu oleh AOC, dan dilakukan pendampingan pengisian survey kepada seluruh pegawai pada saat apel online
Rencana Aksi	segera melengkapi data dukung ZI	Memberikan himbauan agar seluruh ketua tim lebih intensif membina anggota tim supaya selalu mematuhi kode etik dan disiplin pegawai	survey dipelajari dulu oleh AOC, dan dilakukan pendampingan pengisian survey kepada seluruh pegawai pada saat apel online
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	masih ada beberapa data dukung yang harus dilengkapi sesuai hasil desk ZI	Belum ada sosialisasi ke ketua tim	terdapat permintaan survey indeks persepsi RB yang belum diselesaikan

Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : data dukung sudah dilengkapi	Kondisi Juni : Sosialisasi dilaksanakan saat rapat bulanan tgl. 7 Juni 2023	Kondisi Juli: Survey sudah diisi oleh seluruh pegawai
Status	close	close	close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sudah tercapai, begitu pula dengan target tahun 2023 dan 2024 sudah terlampaui. Namun belum diajukan perubahan target karena terdapat perubahan cara penilaian RB dari Kemenpan dimana terdapat RB tematik dan RB General dan perubahan penilaian belum ditentukan sampai sekarang.

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 144. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 145. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Hingga triwulan II tahun 2023, belum diperoleh penilaian AKIP dari APIP/Inspektorat.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena nilai AKIP dari APIP baru akan diperoleh di akhir tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 146. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya Triwulan II tahun 2023 dengan Target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRIERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6	-	-	-

Belum ada realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2023, hasil penilaian AKIP oleh APIP akan diperoleh di akhir tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 84,99 (A), namun demikian perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut karena target 2023 juga meningkat. Rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2022 antara lain :

- Menciptakan inovasi terkait pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi
- belum adanya penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja serta inovasi terkait pelaporan kinerja
- Progres rencana aksi belum tergambar pada Laporan Kinerja Interim
- Belum ada penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim
- Belum adanya inovasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement)

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, pada triwulan I tahun 2023, telah dilakukan perbaikan pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2023 dengan menambahkan penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja, menambahkan progres rencana aksi setiap triwulan, menambahkan penjelasan upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan. Inovasi terkait pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi simakin yang telah mengukur IKI individu hingga pimpinan UPT setiap triwulan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja

dapat diidentifikasi. Telah tersedia inovasi temanqu untuk pelaporan kinerja, dimana semua pegawai dapat mengakses laporan kinerja tahunan, laporan tahunan, laporan kinerja interim triwulan, dan laporan evaluasi internal triwulan. Telah tersedia inovasi insight yang menampilkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan aplikasi simetris yang telah memuat rekapitulasi kendala, rencana aksi, dan tindak lanjut. Selain itu telah terdapat peningkatan kinerja dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dibuktikan dengan kenaikan NPS dan penambahan jumlah IKU yang mencapai target. Pada triwulan I hingga triwulan II tahun 2023 juga telah disusun Laporan evaluasi Renstra Paruh Waktu yang berisi evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2020 hingga tahun 2022 serta proyeksi ketercapaian target tahun 2024. Berdasarkan evaluasi renstra paruh waktu, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 9 IKU yang perlu diturunkan targetnya karena diproyeksikan tidak akan mencapai target pada tahun 2024, sehingga pada penyusunan RKT tahun 2024, ditambahkan usulan penurunan target beserta justifikasinya. Pada triwulan II telah dilakukan upaya pemberian reward punishment berdasarkan kinerja dengan adanya nilai SKP kurang pada 1 orang pegawai di triwulan I karena perilaku kerjanya dibawah ekspektasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 147. Rencana aksi pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
25 Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	D Forum Komunikasi Perencana BPOM	2 kali/trip	1	0	0	1	0	0
			E Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2022	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM)	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			H Perencanaan dan Evaluasi	1 paket	1	0	0	0	0	0
			N Evaluasi Sakip Regional	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			O Asistensi Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Bimbingan Teknis SAI dan Laporan Keuangan di UPT POM	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	D Bimtek SAKIP dan Monev Online	1 kali/trip	0	0	0	0

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, tim sakip mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, dan mengikuti rapat kerja nasinal badan pengawas obat dan makanan. Dengan selalu ditingkatkannya kompetensi tim sakip setiap tahun, diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem akip yang lebih baik secara menyeluruh.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 148. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	29.560.000	12.424.152	42,03	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Tindak lanjut hasil evaluasi sakipt tahun 2022 telah dilakukan dan tidak memerlukan biaya, sehingga tidak ada revisi anggaran di triwulan II tahun 2023.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 149. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Meskipun nilai pencapaian sasaran 104,91, namun masih terdapat 1 IKU yang tidak memenuhi ekspektasi (pasar) dan 4 IKU yang belum memenuhi ekspektasi (sertifikasi, sekolah, desa, dan IPDI)	Laporan evaluasi Renstra 2020-2024 belum selesai direviu oleh pusat sehingga pengusulan revisi target tahun 2024 belum bisa diajukan	Meskipun NPS diatas 100%, namun masih ada 3 IKU yang belum tercapai
Rekomendasi Perbaikan	untuk IKU sekolah, desa, dan pasar dilakukan percepatan tahapan advokasi sehingga tahapan lain segera berjalan. untuk IKU sertifikasi mengikuti rekomendasi sebelumnya, untuk IKU IPDI dimana ada perubahan perhitungan SIPT, maka dilakukan pemantauan ketat terhadap SIPT pengujian	Terus berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memantau hasil reviu Laporan Evaluasi Renstra 2020-2024	membuat usulan perubahan target tahun 2024 terhadap IKU yang sesuai evaluasi tidak akan tercapai di tahun 2024, karena target tahun 2023 sudah tidak bisa diubah
Rencana Aksi	untuk IKU sekolah, desa, dan pasar dilakukan percepatan tahapan advokasi sehingga tahapan lain segera berjalan. untuk IKU sertifikasi mengikuti rekomendasi sebelumnya, untuk IKU IPDI dimana ada perubahan perhitungan SIPT, maka dilakukan pemantauan ketat terhadap SIPT pengujian	Terus berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memantau hasil reviu Laporan Evaluasi Renstra 2020-2024	membuat usulan perubahan target tahun 2024 terhadap IKU yang sesuai evaluasi tidak akan tercapai di tahun 2024
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	masih terdapat 1 IKU yang tidak memenuhi ekspektasi (pasar) dan 4 IKU yang belum memenuhi ekspektasi (sertifikasi, sekolah, desa, dan IPDI)	Usulan revisi target tahun 2024 belum dikirimkan	masih ada 3 IKU yang belum tercapai targetnya
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : IKU sekolah dan desa telah mencapai target, namun IKU yg tidak mencapai target menjadi 5 IKU (Obat MS, fortifikasi, sertifikasi, sarana produksi, dan IPDI)	Kondisi Juni : belum ada hasil reviu dari pusat	Kondisi Juli : -
Status	open	open	open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sudah tercapai, namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai. Telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi sakipt tahun 2022 pada triwulan I tahun 2023 sehingga diharapkan target tahun 2023 dapat tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi bulanan pencapaian 29 IKU, terdapat 3 IKU dengan capaian tidak dapat disimpulkan di triwulan II,

sehingga akan diusulkan revisi target bulan Juli hingga Desember. Diharapkan upaya ini juga akan dapat menambah penilaian AKIP tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 9
Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Tabel 150. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;*
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;*
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;*
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan*
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.*

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai

- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Hingga triwulan II tahun 2023 belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya. Nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

- b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**
Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena nilai IP ASN baru akan diperoleh di akhir tahun 2023.
- c. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Tabel 151. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5	-	-	-

Belum tersedia realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan II tahun 2023. Realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2023

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Belum diperoleh nilai hingga triwulan II tahun 2023. Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP setiap triwulan. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi.

Untuk menegakkan disiplin pegawai, dilakukan apel *online* via zoom setiap senin dan kamis (inovasi apel manis) untuk mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai. Untuk memacu kinerja pegawai, diterapkan juga mekanisme

reward dan *punishment* pegawai, dimana pegawai yang mempunyai kinerja terbaik dan disiplin tinggi diberi penghargaan pegawai teladan dengan diberi kompensasi peningkatan kompetensi sesuai pilihan pribadi dengan biaya dari kantor. Pada tahun 2022, diperoleh 2 orang dengan nilai SKP “cukup”, hal ini dapat mengurangi perolehan bobot kinerja. Selain itu terdapat 1 orang yang diberi hukuman disiplin selama tahun 2023 sehingga dapat mengurangi perolehan bobot kinerja. Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan nilai kompetensi pegawai.

Terdapat perubahan penilaian indeks profesionalitas ASN di tahun 2023, dimana pengurangan poin untuk pegawai yang terkena disiplin pegawai hanya dilakukan 1 tahun (sebelumnya 5 tahun), terdapat perbedaan nilai untuk SKP dari kriteria sangat baik hingga sangat kurang, serta terdapat perbedaan nilai untuk kualifikasi pegawai disesuaikan dengan persyaratan pendidikan minimal diangkat kedalam jabatan. Dengan menggunakan aturan penilaian terbaru, telah dilakukan penilaian mandiri indeks profesionalitas ASN, dan diperoleh nilai sementara sebesar 91,08, melebihi target tahun 2023.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 152. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	B Diklat untuk Pegawai Teladan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			C Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Perkuatan SDM Unggul	1 kali/trip	0	0	1	0	0	0
			G Pelatihan Dasar dan Rekrutmen CPNS	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0
			H Peningkatan Kompetensi Pegawai	11 kali/trip	0	0	0	1	0	1
			P Pembinaan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator hingga triwulan II tahun 2023 antara lain Peningkatan Kompetensi Pegawai, dan Rekrutmen CP3K. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 153. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	7.789.517	7.789.517	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung, karena capaian indikator belum tersedia. Capaian indikator baru diperoleh di akhir tahun. Pada triwulan II tahun 2023 tidak ada revisi anggaran pada kegiatan yang ditagging untuk IKU ini.

g. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Tabel 154. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	SKP kepala Balai belum bisa diisi di aplikasi simakin	Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi target 20 JP untuk peningkatan kompetensi	belum seragamnya persepsi para ketua tim dalam melakukan penilaian SKP
Rekomendasi Perbaikan	berkomunikasi dengan Biro SDM	monitoring ketat oleh ketua tim dan pemberian kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui IDEAS	akan dilakukan pertemuan harmonisasi SKP dengan mengundang seluruh ketua tim dan analis kepegawaian serta perencana
Rencana Aksi	berkomunikasi dengan Biro SDM	monitoring ketat oleh ketua tim dan pemberian kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui IDEAS	akan dilakukan pertemuan harmonisasi SKP dengan mengundang seluruh ketua tim dan analis kepegawaian serta perencana
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	SKP kepala Balai belum bisa diisi di aplikasi simakin	Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi target 20 JP untuk peningkatan kompetensi	belum seragamnya persepsi para ketua tim dalam melakukan penilaian SKP
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : SKP Kepala Balai sudah selesai diinput di simakin	Kondisi Juni : pegawai yang memenuhi target JP sebesar 75,36%	Kondisi Juli : -
Status	close	open	open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2023 telah tercapai di tahun 2022, namun tidak dilakukan usulan menaikkan target tahun 2023 dan 2024 karena pada tahun 2022 dan seterusnya terdapat SKP dengan nilai cukup atau kurang dan terdapat 1 pegawai yang mendapat hukuman disiplin di tahun 2023 sehingga akan mengulangi nilai indeks IP ASN.

SASARAN STRATEGIS 10
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan obat dan makanan

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 155. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium triwulan I tahun 2023 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, belum diperoleh nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Surabaya. Nilai akhir akan diperoleh di akhir tahun 2023. Nilai sementara sesuai evaluasi mandiri di triwulan II adalah 85,88, hanya meningkat tipis dari hasil audit GLP triwulan I tahun 2023 yang semula 85,29 sedangkan target tahun 2023 adalah 88.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena nilai baru akan diperoleh dari P3OMN di akhir tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan triwulan II tahun 2023

Tabel 156. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88	-	-	-

Belum ada realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada triwulan II tahun 2023. Nilai akan diperoleh di akhir tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) BBPOM di Surabaya senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dari tiga unsur penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Surabaya didapatkan poin sebagai berikut

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) = 87,5%
2. Pemenuhan Kompetensi SDM = 87,27%
3. Pemenuhan Peralatan = 81,14%

Usaha yang dilakukan pada triwulan I untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.
- Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

Kendala Pemenuhan GLP antara lain sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

- Belum tersedianya alat Ion Chromatography (IC) dan Turbidimeter yang diperlukan untuk parameter uji Lab Spesifik Air sedangkan untuk tahun 2023 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan alat di BBPOM Surabaya
- Alat GCMS hanya ada 1 unit dan penggunaannya secara bergantian dengan antrian untuk laboratorium Pangan, Obat Tradisional Kosmetik dan Obat (jumlah sampel tahun 2022 sebanyak 419 sampel dengan durasi uji 2 - 4 jam per sampel), hal ini menyulitkan penambahan ruang lingkup.
- Parameter-parameter yang terdapat pada SRL sebagian tidak dapat diuji karena berbeda dengan parameter yang terdapat pada prioritas sampling. Sehingga

ketersediaan reagen, alat dan baku pembanding menjadi kendala karena Balai mengutamakan parameter-parameter wajib yang terdapat pada prioritas sampling.

- Banyak sampel dari pihak ketiga yang parameter ujinya tidak masuk dalam standar ruang lingkup.
- Penambahan ruang lingkup untuk parameter uji diazolidinyl urea (Kosmetik) belum dapat dilakukan karena optimasi yang dilakukan belum berhasil.
- Ruang lingkup kategori residu pestisida memerlukan peningkatan kompetensi personel. Dimana RL tersebut tidak termasuk ke dalam materi PAI tahun 2023
- Ruang lingkup pengujian spesifik residu obat (Metabolit Nitrofurazon AMOZ, AOZ, Amino hidantoin, Semicarbazide) memerlukan peningkatan kompetensi personel. Dimana RL tersebut tidak termasuk ke dalam materi PAI tahun 2023

2. Kompetensi

- Adanya personel penguji laboratorium yang memasuki masa purnabakti menyebabkan penurunan nilai kompetensi, sedangkan penguji yang baru harus memenuhi kelengkapan kompetensi agar dapat meningkatkan persentase pemenuhan kompetensi
- Terdapat personil yang kesulitan memenuhi nilai SKL kompetensi karena laboratorium penempatan personil tersebut tidak melaksanakan pengujian terkait.

3. Peralatan

- Pengurangan nilai peralatan disebabkan alat rusak dan usang, lebih dari 20% instrumen di Balai Besar POM di Surabaya berusia lebih dari 10 tahun.
- Untuk alat inkubator yang digunakan dalam pengujian mikrobiologi, penetapan jumlah alat dalam standar berdasarkan suhu penggunaan. Namun dalam penggunaan di laboratorium terdapat pengujian sampel dengan suhu inkubasi tertentu yang lebih banyak dibandingkan suhu inkubasi yang lain (yang terdapat dalam standar alat), sehingga mempengaruhi jumlah alat berdasarkan suhu penggunaan dan nilai SKL peralatan.
- Laboratorium OTSK hanya mempunyai 1 (satu) alat TLC System, sedangkan hampir semua parameter OTSK menggunakan alat tersebut untuk pengujian dasar, sehingga mengakibatkan terjadinya antrian pada alat tersebut. Antrian diperpanjang dengan adanya sampel kasus yang tidak terprediksi baik jumlah ataupun waktu datangnya, sehingga alat tersebut lebih diprioritaskan untuk penyelesaian sampel kasus, dan mengakibatkan timeline pengujian sampel rutin semakin panjang karena menunggu antrian alat

- Alat GCMS hanya ada 1 dan sudah berusia lebih dari 10 tahun, beberapa suku cadang sudah diskontinyu dan tidak dapat dilakukan update aplikasi.
- Peralatan laboratorium sebagian besar sudah berusia 20 tahun, perlu dilakukan refreshment peralatan untuk mendukung proses pengujian yang memerlukan teknologi modern.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 157. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	PDD.001.054	Peningkatan ruang lingkup pengujian	A Bimtek Pemeliharaan Dan Perbaikan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			B Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai /Balai Besar POM Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			C Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Kosmetik	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			D Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			E Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM pengujian Mikrobiologi	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			F Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Kimia Pangan Olahahan Dan Air	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			G Bimbingan Teknis Pengujian	5 kegiatan	0	0	3	0	0	0
			I Peningkatan Kompetensi Pegawai	3 paket	0	0	0	0	1	0
			J Operasional Laboratorium	12 bulan	1	1	1	1	1	1
			K Rekalibrasi Peralatan Laboratorium	1 kali/trip	0	0	0	0	1	0
			L Pengadaan Suku Cadang dan Glassware	3 paket	0	0	1	0	1	0
			M Kalibrasi Eksternal Peralatan Laboratorium	3 paket	0	0	0	0	0	0
			PDD.001.056	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan	A Forum Diseminasi hasil riset dan kajian Obat dan Makanan	1 kali/trip	0	0	0	0
B Konsultasi Sistem Mutu	1 kali/trip	0			0	0	0	1	0	
C Surveilans Laboratorium Pengujian oleh KAN BSN	1 kali/trip	0			0	0	0	0	0	
D Pertemuan Teknis KAN	1 kali/trip	0			0	0	0	0	0	
E Verifikasi Metode Analisis	5 paket	1			1	0	0	1	0	
F Uji Profisiensi/Uji Banding	5 paket	1			1	1	1	0	0	
G Kolaborasi Metode Analisa	5 paket	1			1	0	0	1	1	
H Reassesmen GLP	2 kegiatan	0			0	0	0	0	0	
I Koordinasi dan Konsultasi	10 kali/trip	0			0	0	0	7	0	
RAB.001.051	Pemenuhan/peremajaan alat	A Pengadaan Alat Laboratorium	1 paket	1	1	0	0	0	0	

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator triwulan II tahun 2023 antara lain adalah bimbingan teknis pengujian, peningkatan kompetensi, penyediaan operasional laboratorium, pengadaan suku cadang, konsultasi sistem mutu, verifikasi metode analisis, dan uji profisiensi/uji banding.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 158. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2.160.746.400	1.065.985.706	49,33	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena data capaian indikator belum tersedia. Selama triwulan II tahun 2023 terdapat beberapa revisi diantaranya pengurangan biaya uji profisiensi untuk belanja reagensia uji sampel kasus khusus/prekursor/ed pendek/KLB; Pengurangan anggaran pendukung preparasi sampel untuk belanja reagensia uji sampel pihak ketiga; Pengurangan anggaran pendukung preparasi sampel kegiatan operasional lab untuk dialihkan ke anggaran reagensia/media mikrobiologi kegiatan Uji Kolaborasi Metode Analisa; Pergeseran detail perjalanan dinas peningkatan kompetensi dari penghapusan anggaran perjalanan dinas Pertemuan Teknis KAN, dan penambahan anggaran perjalanan dinas dalam kota untuk keperluan peningkatan kompetensi.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 159. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obatdan Makanan sesuai standar GLP sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	- Bimtek internal laboratorium pangan tertunda karena adanya kerusakan LC MSMS	Dalam rangka pemenuhan instrumen terkait laboratorium regional maka BBPOM di Surabaya akan ditransfer alat dari UPT lain. Dibutuhkan anggaran untuk transfer, kesiapan sarana dan prasarana terkait tempat, ruangan, jaringan listrik dsb	- Dengan adanya perubahan laboratorium regional maka dibutuhkan pemenuhan kompetensi personel untuk pengujian dan handling sampel cytotoxic serta penggunaan instrumennya - Target pemenuhan SRL belum tercapai karena (1) instrumen rusak (LC MSMS); (2) sampel belum selesai dikerjakan karena baru datang di akhir TW 2; (3) baku pembanding tidak tersedia di PPOMN sehingga perlu membeli dari penyedia lain dan baku pembanding tersebut belum datang karena inden - Beberapa pengujian sampel terkendala karena LC MSMS tidak dapat digunakan - Perbaikan LC MSMS belum dapat dilakukan karena terkendala anggaran
Rekomendasi Perbaikan	- perbaikan LC MSMS dan penjadwalan kembali bimtek internal pangan	- membutuhkan revisi anggaran untuk transfer, renov ruangan dan pengadaan meubelair pendukung	- Meningkatkan kompetensi personel terkait pengujian cytotoxic - Melakukan perbaikan LC MSMS - Berkoordinasi dengan substansi terkait mengenai perencanaan sampling
Rencana Aksi	- mengusulkan penjadwalan kembali bimtek internal laboratorium pangan - menghubungi vendor untuk perbaikan LC MSMS	- menghubungi laboratorium asal alat untuk mengetahui kondisi alat, update kesiapan transfer alat, spesifikasi alat - menghubungi provider untuk mendapat penawaran biaya transfer dan pengecekan lokasi untuk penempatan alat	- Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PPOMN terkait pengujian cytotoxic yang kemudian dilakukan transfer pengetahuan melalui diseminasi - Bersurat kepada Rorenkeu terkait anggaran untuk perbaikan LC MSMS - Mengingatkan kembali ke substansi terkait agar sampel

Keterangan	April	Mei	Juni
		- mengusulkan alokasi anggaran untuk renov pengadaaan mebelair dan transfer alat - melaporkan progress update kondisi dan timeline transfer alat ke biro umum	target SRL dapat disampling pada tiap awal TW
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Bimtek belum dapat dilaksanakan	belum diketahui anggaran dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk transfer alat	- belum memiliki personel dengan kompetensi pengujian cytotoxic - target pemenuhan SRL tidak tercapai
Kondisi Setelah Rencana Aksi	bimtek dijadwalkan kembali	telah diketahui anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk transfer alat	- memiliki personel dengan kompetensi pengujian cytotoxic - target pemenuhan SRL dapat tercapai
Status	Open	Open	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 telah tercapai, namun target tahun 2023 dan 2024 belum tercapai, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan dengan sarana dan prasarana laboratorium yang terbatas. Berdasarkan pemenuhan SKL sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 ini, maka dapat diproyeksikan bahwa pemenuhan SKL pada tahun 2023 sebesar 88 tidak dapat dicapai demikian juga dengan tahun 2024 dengan target sebesar 91 tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, akan diusulkan penurunan target tahun 2024.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 160. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan II tahun 2023

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	2,75	2,6	94,55	Belum memenuhi ekspektasi
Mei	2,75	2,6	94,55	Belum memenuhi ekspektasi
Juni	2,75	3	109,09	Memenuhi ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email, sharing folder, dashboard* BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada triwulan II tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 109,09%, sudah **mencapai target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	2,75	3	109,09	Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	2,75	3	109,09	Memenuhi ekspektasi

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 sama dengan triwulan I dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024

Tabel 161. Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75	3	109,09	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan II tahun 2023 **sudah mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Realisasi nilai 3 merupakan nilai maksimal, sehingga tidak perlu dilakukan reviu untuk menaikkan target, namun perlu upaya untuk mempertahankan capaian agar target renstra tahun 2024 tetap tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator triwulan II tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
3	3	3	3	3	3	3

Pada Bulan Awal Triwulan II, Realisasi Indeks belum dapat memenuhi target dengan Nilai Indeks SIPT pada Nilai Indeks 2. Hal ini terjadi disebabkan oleh perubahan perhitungan indeks SIPT yang semula, %Pengujian tidak dihitung mulai bulan April, %Hasil Uji menjadi salah satu faktor perhitungan indeks SIPT. Selain itu terdapat penurunan %Pemeriksaan Sarana, karena Form 33 pada pemeriksaan distribusi pangan belum dapat digunakan.

Walaupun pada awal TW II, Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi belum dapat tercapai, dengan melakukan monev rutin setiap pertengahan bulan, pada akhir triwulan II tahun 2023 indeks pengelolaan data dan informasi sudah dapat mencapai target yang ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan monev *input* SIPT setiap pertengahan bulan.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu
- meningkatkan akses *email* pegawai dengan mentautkan Absensi Online “SIKEMAH” dengan halaman *login email pom.go.id*, serta mengirim *email* pemberitahuan terkait

kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui *email* pom.go.id dengan permintaan untuk *reply*.

- Meningkatkan viewer berita aktual dari internal Balai dengan menautkan absen apel online dengan berita aktual terbaru yang telah diupload tim berita

Perlu tetap dilakukan *money* secara rutin setiap bulan untuk menjaga agar target tetap tercapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 162. Rencana Aksi pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	JANUARI		PEBRUARI		MARET	
					T	R	T	R	T	R
28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bulan	1	1	1	1	1	1
	CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 paket	0	0	0	0	0	0

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal adalah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pemeliharaan Peralatan Kantor. Pada triwulan II tahun 2023 pengadaan laptop dan PC masih dalam proses pengadaan dengan rencana realisasi pada triwulan III.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 163. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	271.058.333	230.042.544	84,87	109,09	95 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada triwulan II tahun 2023 terdapat revisi penambahan anggaran pemeliharaan peralatan kantor dari sisa anggaran jasa kebersihan dan keamanan serta pengurangan anggaran belanja laptop dan printer untuk dialihkan ke anggaran belanja PC desktop dan Access Point.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 164. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	indeks April turun menjadi 2,6 karena sipt pengujian mulai diperhitungkan dalam penilaian. (2) Form 33 pada pemeriksaan distribusi pangan belum dapat digunakan	indeks Mei tetap pada posisi 2,6 - Input pemeriksaan sarana menurun dibandingkan bulan sebelumnya	Indeks Juni naik menjadi 3
Rekomendasi Perbaikan	Memaksimalkan input sarana dan hasil pengujian	Memaksimalkan input sarana dan hasil pengujian	Mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks PDI terutama pada Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT
Rencana Aksi/Tindak Lanjut	penyampaian informasi kepada MT Pengujian untuk memacu input hasil pengujian	penyampaian informasi kepada Ketua Tim di Fungsi Inspeksi untuk lebih memaksimalkan input pemeriksaan sarana	penyampaian informasi kepada Ketua Tim di Fungsi Inspeksi untuk lebih memaksimalkan input pemeriksaan sarana dan pada Ketua Tim pada Fungsi Pengujian untuk meningkatkan input hasil uji
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	%Sarana : 77,72 %Sampling : 107,39 %Pengujian : 48,74	%Sarana : 73,52 %Sampling : 110,1 %Pengujian : 65,19	%Sarana : 78,8 %Sampling : 107,99 %Pengujian : 66,06
Kondisi Setelah Rencana Aksi	%Sarana : 77,72 %Sampling : 107,39 %Pengujian : 48,74	%Sarana : 73,52 %Sampling : 110,1 %Pengujian : 65,19	%Sarana : 79,68 %Sampling : 111,42 %Pengujian : 82,82
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022, 2023, dan 2024 telah tercapai, namun tidak dilakukan revisi target karena di tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan terutama pada komponen pemanfaatan SIPT.

SASARAN STRATEGIS 11 Terkelolanya keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Tabel 165. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	61	68,13	111,69	Memenuhi ekspektasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Mei	63	70,14	111,34	Memenuhi ekspektasi
Juni	66	72,87	110,41	Memenuhi ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

$$(Nilai EKA \times 60\%) + (Nilai IKPA \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat perubahan cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang awalnya memuat 13 (tiga belas) indikator berubah menjadi 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2023 adalah 72,87, diperoleh dari nilai IKPA 95,62 dan nilai EKA 57,7. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2023 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 110,41% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	56	65,16	116,35	Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	66	72,87	110,41	Memenuhi ekspektasi

Capaian pada triwulan I dan triwulan II tahun 2023 telah memenuhi ekspektasi, namun terjadi penurunan capaian sebesar 5,95 dari triwulan I ke triwulan II. Hal ini dikarenakan kenaikan realisasi pada triwulan II tidak selaras dengan target pada triwulan II.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 166. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2	72,87	76,54	tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi nilai kinerja anggaran triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Tahun 2023 dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi**. Telah dilakukan reuiu atas capaian target nilai kinerja anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2022, kriteria capaian nilai kinerja anggaran untuk tahun 2020 memenuhi ekpektasi sedangkan untuk tahun 2021 sampai 2022 tidak memenuhi ekpektasi. Dari hasil reuiu diketahui bahwa pada indikator nilai kinerja anggaran ini terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. Dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi maka nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Setelah dilakukan perhitungan proyeksi, maka diperkirakan target tahun 2024 tidak akan bisa tercapai bila masih ada instruksi target penyerapan anggaran 99%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi nilai kinerja anggaran triwulan II tahun 2023 telah mencapai target triwulan II tahun 2023. Capaian nilai kinerja anggaran dipengaruhi oleh komponen IKPA dan EKA. Nilai IKPA triwulan II tahun 2023 sebesar 95,62. Dari 8 (delapan) indikator IKPA, terdapat 5 (lima) indikator yang belum mendapat nilai 100, yaitu indikator Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output dengan perincian sebagai berikut:

- deviasi 56,49% pada belanja barang (52) dimana rencana lebih tinggi daripada penyerapan anggaran karena pelaksanaan KIE yang terkendala oleh kehadiran tokoh masyarakat sehingga tidak dapat dilaksanakan di semester 1;
- target penyerapan (triwulan 2) 40,71% sedangkan realisasi anggaran masih 38,40%;
- terdapat keterlambatan pendaftaran 4 kontrak di bulan januari;
- terdapat 2 RO dari 21 RO yang tidak mencapai target capaian output (triwulan 2) sebesar 40,71%.

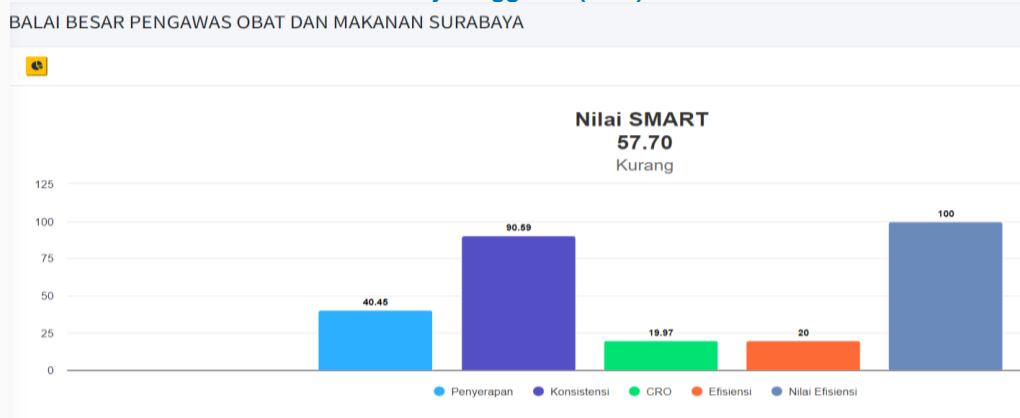
Perlu dilakukan upaya peningkatan atas indikator-indikator IKPA yang belum mendapat nilai 100 tersebut agar bisa menunjang peningkatan nilai NKA.

Tabel Nilai IKPA Triwulan II

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	75.35	96.62	97.34	100.00	96.99	100.00	97.30	95.62	100%	95.62
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10.00	7.54	19.32	9.73	10.00	9.70	5.00	24.32			
	Nilai Aspek	87.68		98.19					97.30			

Nilai EKA triwulan II tahun 2023 sebesar 57,7 dengan komponen nilai penyerapan 40,45; konsistensi 90,59; capaian RO 19,97; efisiensi 20; dan nilai efisiensi 100. Rendahnya nilai pada komponen Penyerapan Anggaran dan Capaian RO dipengaruhi oleh kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat yang belum terlaksana sesuai rencana karena kesibukan para tokoh masyarakat. Sedangkan tidak sempurnanya nilai pada komponen Konsistensi dipengaruhi karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan penarikan anggaran atas belanja modal yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah direncanakan.

Grafik Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Triwulan II Tahun 2023



- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 167. Rencana Aksi pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN	APRIL		MEI		JUNI	
					T	R	T	R	T	R
29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	B Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara	3 kali/trip	0	0	3	0	0	0
			G Workshop Pengadaan Barang/Jasa Badan POM	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			J Reviu LK BMN Regional	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			I Pemusnahan	1 kali/trip	0	0	0	0	0	0
			L Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Mataram)	1 kali/trip	0	0	0	0	0	

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator di triwulan II tahun 2023 hanya Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara. Namun demikian tetap dilakukan kegiatan lain antara lain melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan yang membahas: realisasi output; realisasi anggaran; dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan, telah dilakukan revisi halaman III DIPA tepat waktu, dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 7 setiap bulan. Selain itu juga telah diupayakan pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai cara konkrit untuk menaikkan realisasi RO (rincian output) supaya bisa melebihi target tanpa membutuhkan banyak biaya dalam rangka meningkatkan nilai efisiensi.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 168. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	32,560,000	28,205,261	86,63	116,35	95% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Di triwulan II banyak kegiatan yang dilakukan tanpa membutuhkan anggaran, dan belum dilakukan revisi anggaran untuk mendukung indikator NKA.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 169. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	terdapat deviasi (diatas 5%) pada belanja modal (53) dimana rencana lebih tinggi daripada penyerapan anggaran sebesar 22,54% dan deviasi (diatas 5%) pada belanja barang (52) dimana rencana lebih rendah daripada penyerapan anggaran sebesar 22,54%	Ketentuan baru berupa keharusan input TKDN pada aplikasi SAKTI mulai tanggal 29 Mei 2023 harus sudah diimplementasikan, namun masih belum semua operator SAKTI memahami tahapan untuk melakukan penginputan TKDN pada aplikasi SAKTI	Terdapat deviasi diatas 5% pada belanja modal (53) dimana rencana lebih tinggi daripada penyerapan anggaran sebesar 8.49%
Rekomendasi Perbaikan	Menyesuaikan pembayaran belanja modal dengan rencana penarikan yang telah disusun	Dilakukan sharing knowledge dan permohonan pendampingan pengisian dengan CSO KPPN Surabaya 2	monitoring pelaksanaan realisasi belanja modal
Rencana Aksi	Menyesuaikan pembayaran belanja modal dengan rencana penarikan yang telah disusun	Dilakukan sharing knowledge dan permohonan pendampingan pengisian dengan CSO KPPN Surabaya 2	Memberikan notifikasi PPK belanja modal agar lebih teliti dalam pelaksanaan belanja modal

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Nilai deviasi 81,77	Proses input TKDN pada aplikasi SAKTI masih terhambat	Deviasi bulan Juni 8,49%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Mei : masih terdapat deviasi belanja modal sebesar 65.47%	Juni: Operator sudah bisa melakukan pengisian data TKDN pada aplikasi SAKTI	Juli:
Status Tindak Lanjut	open	Close	Open
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022, 2023, dan 2024 belum tercapai. Sehingga dilakukan upaya untuk mengusulkan penurunan target tahun 2024.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Pada tanggal 27 Desember 2022 dilakukan revisi automatic adjusment/blokir dalam rangka penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp.11.288.914.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian **output** terhadap % capaian **input** (dalam laporan ini, capaian **input** yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 170. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	-0,056	TIDAK EFISIEN
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0,33	EFISIEN
3.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0,22	EFISIEN
4.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	0,41	EFISIEN
5.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	TIDAK EFISIEN
6.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5,99	TIDAK EFISIEN
7.	Layanan Umum	73,42	TIDAK EFISIEN
8.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,33	EFISIEN
9.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	0,56	EFISIEN
10.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,85	EFISIEN

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
11.	Desa Pangan Aman	0,87	EFISIEN
12.	Pasar aman dari bahan berbahaya(Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0,84	EFISIEN
13.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	-0,05	TIDAK EFISIEN
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1,56	EFISIEN
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	2,53	TIDAK EFISIEN
16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	-0,063	TIDAK EFISIEN
17.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	1,65	TIDAK EFISIEN
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	0,20	EFISIEN
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0,36	EFISIEN
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,44	EFISIEN
21	Layanan Perkantoran	0,06	EFISIEN

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 8 kegiatan tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,063 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM) hingga 73,42 (Layanan Umum). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak anggaran yang belum direalisasikan di triwulan II sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi menjadi tidak efisien.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)

- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tabel 171. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

	Sasaran Strategis	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50,68	104,65	1,06	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	100,00	-	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	62,47	-	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	79,52	103,23	0,30	Efisien
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	92,45	110,74	0,20	Efisien
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50,57	108,79	1,15	Tidak Efisien
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	92,63	120	0,30	Efisien
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	94,63	-	-	-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	100,00	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	53,29	-	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	86,63	110,41	0,27	Efisien

Diantara 11 sasaran strategis, terdapat 5 sasaran strategis yang tidak dapat dihitung efisiensinya karena nilai capaian kinerja belum diperoleh. Sedangkan 4 sasaran strategis efisien dan 2 sasaran strategis tidak efisien karena penyerapan anggaran yang masih kecil, antara lain masih terdapat proses pengadaan barang/jasa yang belum dibayarkan.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- i. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar Rp521.872.057,-. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi,

maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah **tidak efisien** karena realisasi anggaran sangat kecil dibandingkan capaian sasaran. Terdapat pengadaan reagensia dan media mikrobiologi yang sedang berjalan dan belum dilakukan pembayaran.

- ii. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp144.576.150,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan melalui media. Sasaran ini belum dapat dihitung efisiensinya dikarenakan belum ada capaian indikator. Capaian indikator baru diperoleh pada akhir tahun 2023.
- iii. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp155.174.465,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis fasilitator pendampingan UMKM Obat tradisional, Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola, Klinik POM, Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling, Koordinasi Teknis Antar Instansi, Pemantauan Toksikovigilans, dan Penyebaran Informasi Keamanan Obat dan Makanan Melalui Pameran. Sasaran ini belum dapat dihitung efisiensinya dikarenakan belum ada capaian indikator. Capaian indikator baru diperoleh pada akhir tahun 2023.
- iv. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.060.347.935,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pengawasan periklanan, pengawasan penerapan farmakovigilans, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dan SKI/SKE, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM (Gempur Jatim, Sippotra dan Jatim Glowing). Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- v. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp5.536.021.231,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan

kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat dan pelaksanaan advokasi dalam rangka intervensi sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- vi. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp505.118.907,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan dan sarana prasarana penunjang pengujian seperti reagensia, media, baku pembanding, dll. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah **tidak efisien** karena realisasi anggaran sangat kecil dibandingkan capaian sasaran. Terdapat pengadaan reagensia dan media mikrobiologi yang sedang berjalan dan belum dilakukan pembayaran.
- vii. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 731.695.028,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- viii. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp13.456.965.020,-. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, pemeliharaan dan peningkatan QMS, dan forum komunikasi perencana. Tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum tersedia, dan baru tersedia di akhir tahun 2023.
- ix. Pada sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 7.789.517,-. Anggaran ini

dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak pada tercapainya target sasaran. Tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum tersedia, dan baru tersedia di akhir tahun 2023.

- x. Pada sasaran strategis kesepuluh yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.296.028.250,- Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, pemeliharaan alat pengolah data dan alat laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum tersedia, dan baru tersedia di akhir tahun 2023.
- xi. Pada sasaran strategis kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 28.205.261,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan. Anggaran yang dipergunakan memang sangat kecil dan belum berdampak nyata terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesebelas adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih tinggi dari anggaran yang dikeluarkan.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada Triwulan II tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 11 sasaran strategis dengan 29 indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator pada triwulan II tahun 2023, telah dilakukan 21 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi, hanya 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi. Dari 6 sasaran strategis semuanya memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”.
2. Capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,65% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
 - b. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan II tahun 2023, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
 - c. Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan II tahun 2023, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
 - d. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 103,23% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
 - e. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 110,74% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam

- meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
- f. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 108,79% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
 - g. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 120% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023;
 - h. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan II tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal;
 - i. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan II tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal;
 - j. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan II tahun 2023 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
 - k. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 110,41% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan II tahun 2023.
3. Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2023 antara 96,49% sampai dengan 144,09%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” disebabkan karena Sistem ebpom untuk proses SKI bermasalah sehingga tidak dapat diakses pada waktu tertentu padahal sudah banyak pengajuan yang masuk. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Jumlah desa pangan aman”, hal ini disebabkan karena intervensi terhadap desa tahun sebelumnya dilaksanakan lebih cepat dari jadwal sehingga capaian yang diperoleh sangat tinggi.

4. Hingga triwulan II tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan 8 kegiatan tidak efisien dan 2 sasaran tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,063 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM) hingga 73,42 (Layanan Umum). Sedangkan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) 6 sasaran diperoleh bervariasi antara 0,20 hingga 1,15. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

4.2 Saran

1. Dari 20 indikator kinerja yang dapat dievaluasi, masih terdapat 3 indikator yang belum mencapai target triwulan II tahun 2023 yaitu
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat, disebabkan oleh banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan atau hasil uji terdiri dari komoditi Obat Tradisional 45 sampel, 10 sampel Kosmetik dan 2 sampel obat. Perlu dilakukan intervensi melalui kegiatan Bimtek pelaku usaha dengan mengundang pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi syarat agar selanjutnya dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Capaian indikator tahun 2022 untuk IKU ini belum mencapai target, begitu pula pada triwulan II tahun 2023, sehingga perlu diusulkan penurunan target tahun 2024.
 - b. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, disebabkan oleh 8 sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu garam beryodium yang tidak memenuhi standar kadar KIO₃ dan 3 tepung terigu dengan tidak memenuhi syarat Penetapan Kadar Asam Folat dan 2 sampel TMS identifikasi Fe. Masih terdapat 30 sampel minyak goreng yang belum disampling dan diuji hingga triwulan II, diharapkan tidak ada lagi sampel TMS sehingga target tahun 2023 dapat tercapai. Terhadap sampel garam dan tepung yang tidak memenuhi syarat dilakukan tindak lanjut dengan melakukan intervensi terhadap sarana produksi agar memperbaiki kualitas fortifikan yang digunakan. Capaian indikator tahun 2022 untuk IKU ini belum mencapai target, begitu pula pada triwulan II tahun 2023, sehingga perlu diusulkan penurunan target tahun 2024.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, oleh karena itu akan dilakukan hal-hal sebagai berikut: berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala tersebut, menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE, melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda, berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut, menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB,

menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB, melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru. Capaian indikator tahun 2022 untuk IKU ini belum mencapai target, begitu pula pada triwulan II tahun 2023, sehingga perlu diusulkan penurunan target tahun 2024

2. Masih ada 3 indikator yang tidak dapat disimpulkan dengan capaian diatas 120% terhadap target triwulan II yaitu indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; Jumlah desa pangan aman; dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dengan demikian, dengan demikian akan diusulkan revisi target RAPK bulan Juli hingga Desember 2023.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran I

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Surabaya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 20 Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Surabaya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.7
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.55
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.38


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	37
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	89.7
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	85.6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.75
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.2

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia


Anggaran :
Rp.
61,048,715,000.00

Surabaya, 20 Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

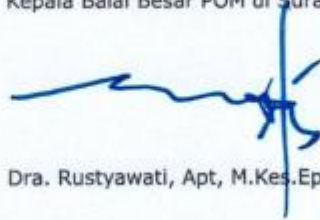
No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	595.329.600,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	289.803.360,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	148.832.400,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	149.292.640,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63.394.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	280.539.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												85.7	223.620.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.55	209.320.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	64.653.500,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	46.830.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	283.620.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	525.300.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	452.771.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	792.959.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	64.653.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.3	10.8	31.1	50.8	59.5	70.6	76.5	83.8	89.1	91.3	96	65	315.156.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	18.943.840.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.8	2.1	17.1	32.1	39.6	47.1	57.1	62.1	72.1	82.2	95.5	112	811.162.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	31.7	35	42.8	54.4	67.8	77.8	80	90	37	1.154.484.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	27	35	45	55	65	75	85	95	100	744.162.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	30	38	45	55	65	75	85	95	100	439.096.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2	6.8	12.1	14.3	18.5	26.5	33.4	37.7	50.7	59.1	66.8	72	1.312.841.000,00
23.	Indeks RB UPT												89.7	28.786.178.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												85.6	90.810.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.5	246.648.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												88	2.835.300.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	514.075.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	46	56	61	63	66	67	69	71	72	74	95.2	88.500.000,00	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.8	1.7	13.3	41.1	52.9	59.5	72.9	72.9	85.4	97.9	100	24	575.545.000,00
Total												61.048.715.000,00		

Surabaya, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815, 5048833 | Fax. (031) 5015486

E-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_surabaya@pom.go.id | website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
NOMOR HK.02.02.15A.15A5.06.22.0174 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Juli 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA NOMOR
 HK.02.02.15A.15A5.07.22.0174 TAHUN
 2022
 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI SURABAYA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	kerja BBPOM di Surabaya	8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,51
		16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	17.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		19.	Jumlah desa pangan aman	37
		20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24.	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		25.	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		28.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2


KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
RUSTYAWATI

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2023 BALAI BESAR POM DI SURABAYA

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%) $e=(d/cx100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $h=(g/fx100)$
A	b	c	D	e	f	g	h
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	7	50,00	394.553.000	209.077.028	52,99
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	16754	8966	53,52	916.627.000	368.674.211	40,22
3.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	50,00	1.143.993.000	467.297.484	40,85
4.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	80	58	72,50	280.539.000	144.576.150	51,54
5.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	61,72	170.525.000	105.254.400	61,72
6.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	0	25,00	97.475.000	3.486.000	3,58
7.	Layanan Umum	1	1	50,00	84.690.000	568.975	0,67
8.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	50,00	2.822.966.000	1.057.394.306	37,46
9.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	9	8	88,89	918.288.000	522.618.000	56,91
10.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112	0	62,20	811.162.000	273.262.044	33,69
11.	Desa Pangan Aman	37	0	61,67	1.154.484.000	380.898.952	32,99
12.	Pasar aman dari bahan berbahaya	24	0	61,25	575.545.000	191.608.520	33,29
13.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	64355	15068	23,41	19.153.160.000	4.727.070.315	24,68
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	98	0	74,25	315.156.000	91.575.000	29,06
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	942	519	55,10	878.192.000	136.887.296	15,59
16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	2451	1347	54,96	1.488.324.000	873.350.519	58,68
17.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	100	70	70,00	63.394.000	16.753.150	26,43
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	408	193	47,30	460.701.000	181.816.050	39,47
19.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	724	364	50,28	902.629.000	332.679.595	36,86

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
	Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM						
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	12.334.000	8.591.400	69,66
21	Layanan Perkantoran	1	1	50,00	28.404.038.000	13.350.354.428	47,00

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
		%	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	50,00	52,99	0,94	-0,056	75 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	53,52	40,22	1,33	0,33	95 %
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	50,00	40,85	1,22	0,22	95 %
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	72,50	51,54	1,41	0,41	92%
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	61,72	61,72	1,00	0,00	75 %
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	25,00	3,58	6,99	5,99	75 %
7	Layanan Umum	50,00	0,67	74,42	73,42	75 %
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	50,00	37,46	1,33	0,33	95 %
9	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	88,89	56,91	1,56	0,56	92 %
10	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62,20	33,69	1,85	0,85	88 %
11	Desa Pangan Aman	61,67	32,99	1,87	0,87	88 %
12	Pasar aman dari bahan berbahaya	61,25	33,29	1,84	0,84	88 %
13	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	23,41	24,68	0,95	-0,05	75 %
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	74,25	29,06	2,56	1,56	80 %
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	55,10	15,59	3,53	2,53	75 %
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	54,96	58,68	0,94	-0,063	75 %
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	70,00	26,43	2,65	1,65	78 %
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	47,30	39,47	1,20	0,20	100 %
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	50,28	36,86	1,36	0,36	95 %
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	69,66	1,44	0,44	92 %
21	Layanan Perkantoran	50,00	47,00	1,06	0,06	100 %

2. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

3. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

4. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

5. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN (99,09)

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	April		Mei		Juni		Total		RAPK s.d TW II (Jan-Juni)		
			Rekomendasi *	TL**	Rekomendasi *	TL**	Rekomendasi *	TL**	Rekomendasi *	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanak an oleh UPT	Obat	24	16	9	10	17	16	71	70	70	71	98,5915493
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	2	3	2	2	3	2	37	36	36	37	97,2972973
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	100
		Kosmetik	0	0	0	0	4	3	14	13	13	14	92,8571429
		Pangan	37	38	17	9	21	23	122	116	116	122	95,0819672
		Total	63	57	28	21	46	45	246	237	237	246	96,34
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanak an oleh UPT	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	1	0	0	3	3	12	12	12	12	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	100
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	100
		Pangan	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	100
		Total	1	1	1	1	3	3	22	22	22	22	100,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanak an oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	100
		Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Total	0	0	1	1	1	1	4	4	4	4	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanak an oleh UPT	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	1	1	2	2	0	0	5	5	5	5	100
		Pangan	0	1	0	0	0	0	5	5	5	5	100
		Total	1	2	2	2	0	0	11	11	11	11	100,00
TOTAL	65	60	32	25	50	49	283	274	274	283	99,09		

7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER (78,30)

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	April		Mei		Juni		Total		RAPK s.d TW II (Jan - Juni)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	16	14	10	8	16	12	70	55	55	70	78,571429
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	6	2	2	2	1	37	20	20	37	54,054054
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	50
		Kosmetik	0	0	0	0	3	0	13	5	5	13	38,461538
		Pangan	38	18	9	17	23	23	115	87	87	115	75,652174
		Total	57	38	21	27	45	36	237	168	168	237	70,89
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	1	0	0	0	7	6	6	7	85,714286
		Total	0	0	1	0	0	7	6	6	7	85,71	
TOTAL			57	38	22	27	45	36	244	174			78,30

8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (95,53)

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	April			Mei			Juni			Total			RAPK s.d TW II (Jan - Juni)		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Import (SKI)	Surat Keterangan	437	437	477	1018	1018	334	736	736	684	4655	4655	4352	4352	4655	93,49
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	510	510	504	755	755	743	735	735	722	4099	4099	4001	4001	4099	97,61
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPDIB, CDDB, CPDIB, CPKB	Rekomendasi	26	26	26	36	36	36	37	37	37	209	209	209	209	209	100,00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	100,00
Total			1033	1033	1007	1809	1809	1713	1508	1508	1443	8966	8966	8565	8565	8966	95,53

9. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (65,00)

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun*	April			Mei			Juni			Total			RAPK s.d. TW 2 (Jan - Juni)		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	38	14	1	1	0	2	2	0	1	1	0	6	6	0			
2	Industri Bahan Baku Obat	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	4	6	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0			
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1			
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)	3	20	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0			
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	67		0	0	0	2	1	1	0	0	0	9	6	3			
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15	5	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0				
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)	6		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0				
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)	14		0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0			
11	Industri Kosmetik	86	47	1	0	1	1	1	0	7	3	4	20	12	8			
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Industri Pangan	900	294	3	5	4	23	13	16	44	32	12	148	94	54			
14	Industri Rumah Tangga Pangan Surabaya	28286	15	2	0	2	0	0	0	2	1	1	5	1	4	200	130	70
Total			29448	408	13	6	7	37	20	17	57	40	17	200	130	70	65,00	

10. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI (70,08)

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	April			Mei			Juni			Total			RAPK s.d. TW 2 (Jan - Juni)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)		86	4	3	1	11	11	0	6	6	0	44	42	2	44	42	2	
2	Apotek		41	1	0	1	3	1	2	5	2	3	16	6	10	16	6	10	
3	Toko Obat		16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	4	3	1	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)		28	1	0	1	3	2	1	0	0	0	9	5	4	9	5	4	
5	Rumah Sakit (RS)		45	3	1	2	4	4	0	0	0	0	15	13	2	15	13	2	
6	Puskemas		36	1	1	0	3	3	0	0	0	0	11	9	2	11	9	2	
7	Klinik		39	5	3	2	5	3	2	3	2	7	24	10	14	24	10	14	
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	673	141	1	1	0	3	6	3	8	6	2	83	54	29	83	54	29	
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	675	87	6	5	1	3	9	0	11	9	2	49	45	4	49	45	4	
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	302	113	1	1	0	11	7	4	17	5	12	64	38	26	64	38	26	
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	275	31	3	2	1	1	1	0	5	2	3	17	12	5	17	12	5	
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	1120	59	16	8	8	2	0	2	1	1	0	35	23	12	35	23	12	
	Surabaya	2770	724	44	27	17	61	47	14	62	33	29	371	260	111	371	260	111	70,08

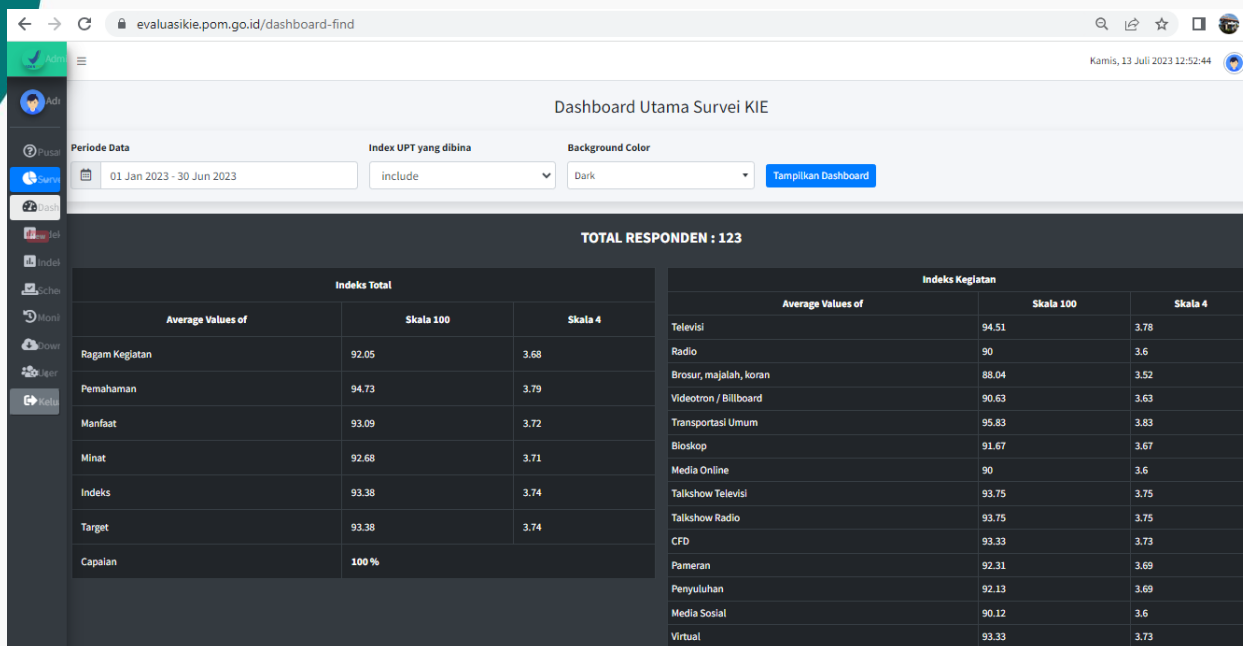
11. Indeks Layanan Publik BPOM

-

12. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK (74,25)

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	Progres s,d, bula
								Jun
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	8	8	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi	20%	30%	Maret-April			20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			40
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-			8,89
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			2,5
								81,39
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	13	13	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			18,24
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0
Total Progres								68,24
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	77	77	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-			40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			3,12
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0
Total Progres								73,12
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						98	98	74,25

13. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (93,38)



14. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Total progres
						April	Mei	Juni	
BBPOM di Surabaya	1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - April	36,00	112,00	3,33	10,00	0,00	20,00
	2 Sosialisasi keamanan pangan (176)	10,00	Maret - April			0,00	0,00	1,70	9,70
	3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (36)	15,00	April - Juni			2,50	2,50	7,50	12,50
	4 Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan (36)	10,00	April - Nov			0,00	0,00	10,00	10,00
	5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah					0,00	0,00	0,00	0,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah					0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (36)	20,00	Agustus - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Pengawasan (76)	10,00	Okt - Des	0,00	1,84	0,00	10,00			
	Total skor		0,00	36,00	112,00	5,83	14,34	19,20	62,20

15. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Total
					April	Mei	Juni	
1 Advokasi Kelembagaan Desa (6 kab/kota)	20,00	Januari-April	9	37	3,33	10,00	0,00	20,00
2 Pengadaan paket informasi	5,00	Januari-April			0,00	0,00	0,00	5,00
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (9 desa)	15,00	April-Juli			1,67	3,33	6,67	11,67
4 Bimtek Komunitas sekaligus survei ((9 desa)	15,00	Mei-Oktober			0,00	1,67	3,33	5,00
5 Fasilitas Keamanan Pangan (9 desa)	10,00	Juni-November			0,00	1,11	2,22	3,33
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (Pre : 5%; Post 5%)	10,00	Mei-Oktober - Post Nov			0,00	0,56	1,11	1,67
7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	November-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember			0,00	0,00	0,00	5,00
9 Pengawasan	10,00	Juni-Desember			0,00	0,00	0,00	10,00
Total	100	0	9	37	5,00	16,67	13,33	61,67

16. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Total
					April	Mei	Juni	
1 Adokasi (6)	20,00	Januari-April	6	24	3,33	10,00	0,00	20,000
2 Survey Pasar (6)	5,00	Januari			0,83	1,67	0,83	5,000
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator (6)	15,00	April-Mei			5	2,50	7,50	15,000
4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (12= 6+6)	15,00	April-Mei			3,75	7,50	0,00	11,250
5 Penyuluhan (6)	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kampanye (6)	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar (6)	15,00	September-Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Pengawasan	10,00	Februari-Oktober			0,00	0,00	0,00	10,00
Total	100,00		6	24	12,92	21,67	8,33	61,25

17. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
4	April	2451	831	Benar	2900	692	Benar	28,88
5	Mei	2451	1064	Benar	2900	960	Benar	38,26
6	Juni	2451	1347	Benar	2900	1206	Benar	48,27

No	Bulan	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
4	April	1042	396	Benar	1263	337	Benar	32,34
5	Mei	1042	501	Benar	1263	466	Benar	42,49
6	Juni	1042	589	Benar	1263	540	Benar	49,64

18. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

Tahapan	Juni										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	9	7	6		1,00		0,15	15,00%	40,68%	93,75%	38,14%
Tahap I			2	4	0,25		0,4	19,55%			
P21					0,00		0,3	4,09%			
Tahap II				3	0,00		0,20	2,05%			
Total	9	7	8	7							

19. INDEKS RB BBPOM DI SURABAYA

-

20. NILAI AKIP

21. INDEKS PROFESIONALITAS ASN

22. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

23. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL (3)

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email			
	TW II		
	April	Mei	Juni
total_akun_individu	135	134	134
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_login	130	133	131
total_individu_aktif	130	133	131
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	28,89	29,78	29,33
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	28,89	29,78	29,33
Perhitungan (%)	97,78	99,56	98,66
Perhitungan per TW	98,8	98,95	98,9
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual			
	TW II		
	April	Mei	Juni
Jumlah Upload	11	12	12
Jumlah Viewer	1446	1182	1929
Perhitungan Rata2 Berita	11	11,2	11,33
Perhitungan Rata2 Pengunjung	151,95	140,5	144,07
Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER			
	TW II		
	April	Mei	Juni
Aktifitas			
Jumlah Entry	51	45	50
Jumlah Verifikasi	51	45	50
Perhitungan	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks per TW	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC			
	TW II		
	April	Mei	Juni
Aktifitas			
Login BOC	40	40	40
Akses BCC	60	60	60
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder			
	TW II		
	April	Mei	Juni
Aktifitas			
Jumlah Akses	290	339	376
Perhitungan	233,25	254,4	274,67
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT			
	TW II		
	April	Mei	Juni
Penilaian			
% Sarana	77,72	73,52	79,68
% Sampling	107,39	110,1	111,42
% Pengujian	48,74	65,19	82,82
Rata-Rata	77,95	82,94	91,31
Indeks per Bulan	2	2	3
Komposit SIPT	1,6	1,6	2,4

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi			
	TW II		
	April	Mei	Juni
Indeks			
Indeks Pemanfaatan	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	2,2	2,2	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,6	2,6	3

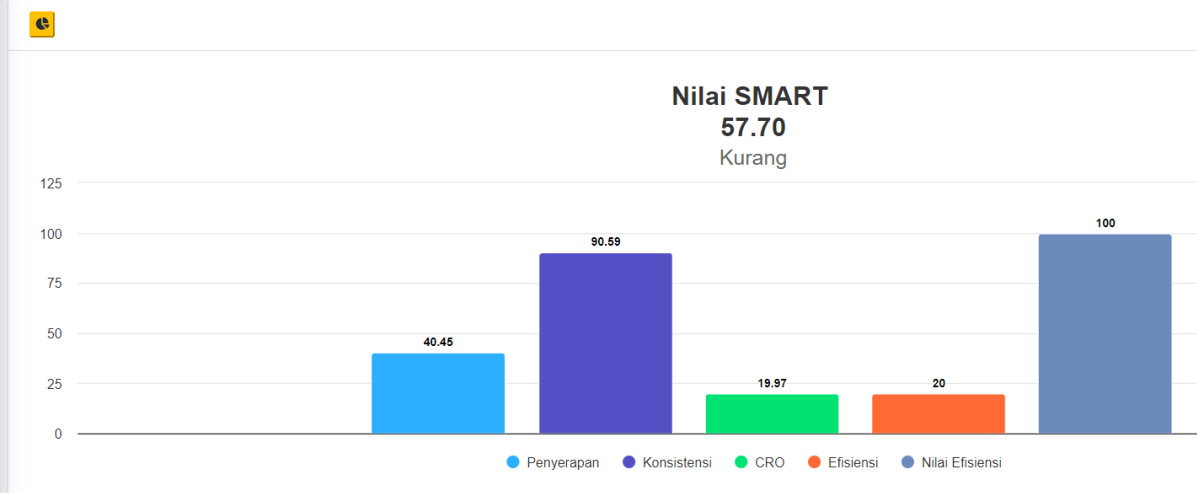
24. NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai IKPA (95,62)

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				CAPAIAN OUTPUT
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100,00	75,35	96,62	97,34	100,00	96,99	100,00	97,30	95,62	100%	95,62
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10,00	7,54	19,32	9,73	10,00	9,70	5,00	24,32			
	Nilai Aspek	87,68		98,19				97,30				

Nilai EKA (57,70)

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA



Nilai NKA : $(95,62 \times 40\%) + (57,70 \times 60\%) = 72,87$